

RENCANA STRATEGIS

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Tahun 2020-2024



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA





**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri (Renstra Kemendagri) Tahun 2020-2024 dapat diselesaikan, dan ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 pada tanggal 6 Agustus 2020, serta diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892 pada tanggal 11 Agustus 2020.

Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025; Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Renstra Kemendagri ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan Kementerian Dalam Negeri 5 Tahun kedepan (Tahun 2020 s.d 2024), yang disusun dengan mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 (tujuh) Agenda Prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri Dalam Negeri.

Renstra Kemendagri Tahun 2020-2024 menjadi pedoman bagi seluruh Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I dan penyusunan Rencana Kerja Tahunan, sehingga dapat diwujudkan **"Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"**, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan pengabdian kepada Bangsa dan Negara.

Jakarta, 4 September 2020
Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian



KEMENTERIAN KULIAH MEDIS
REPUBLIK INDONESIA

DIRGAHAY



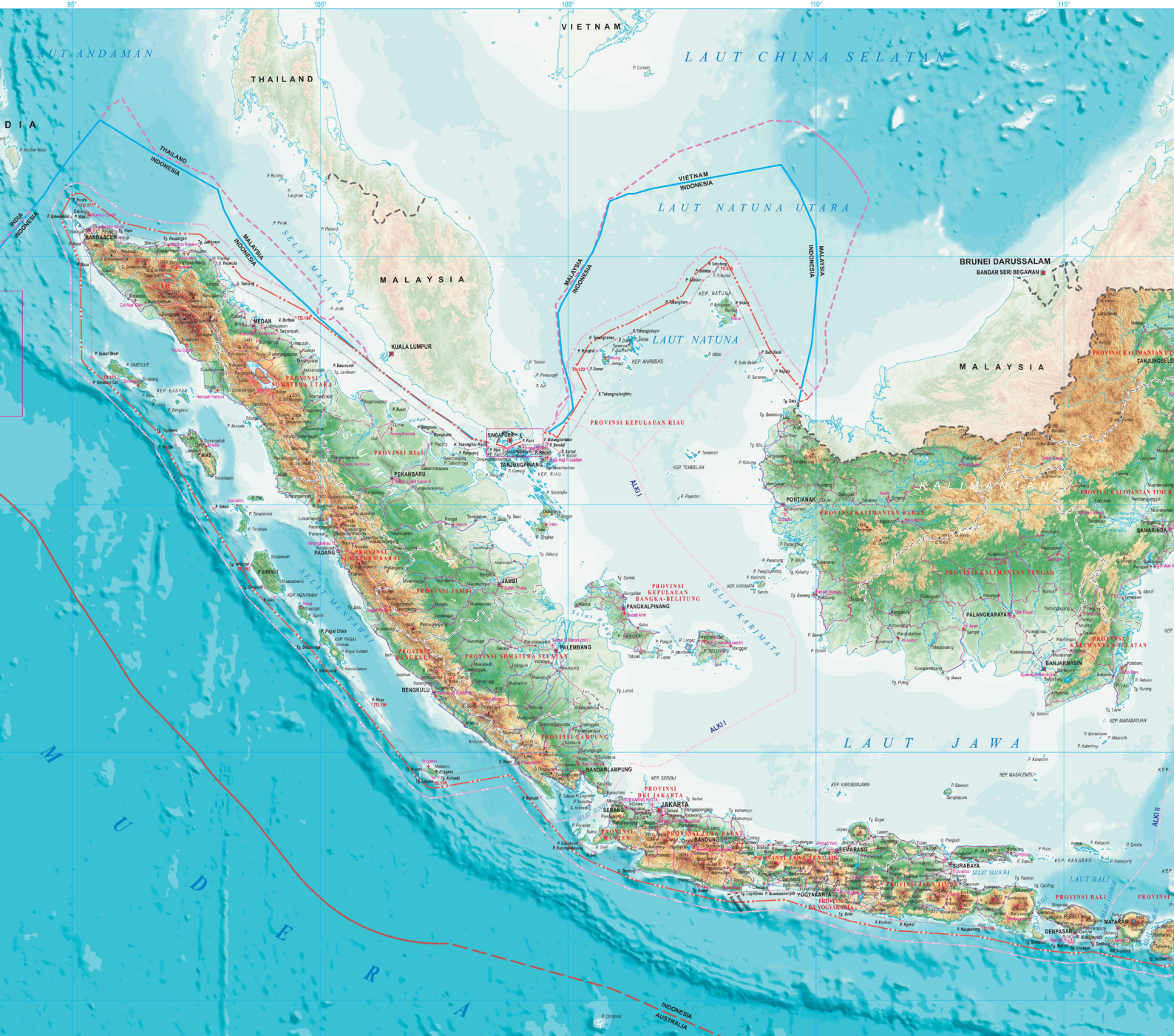


INDONESIA
MAJU

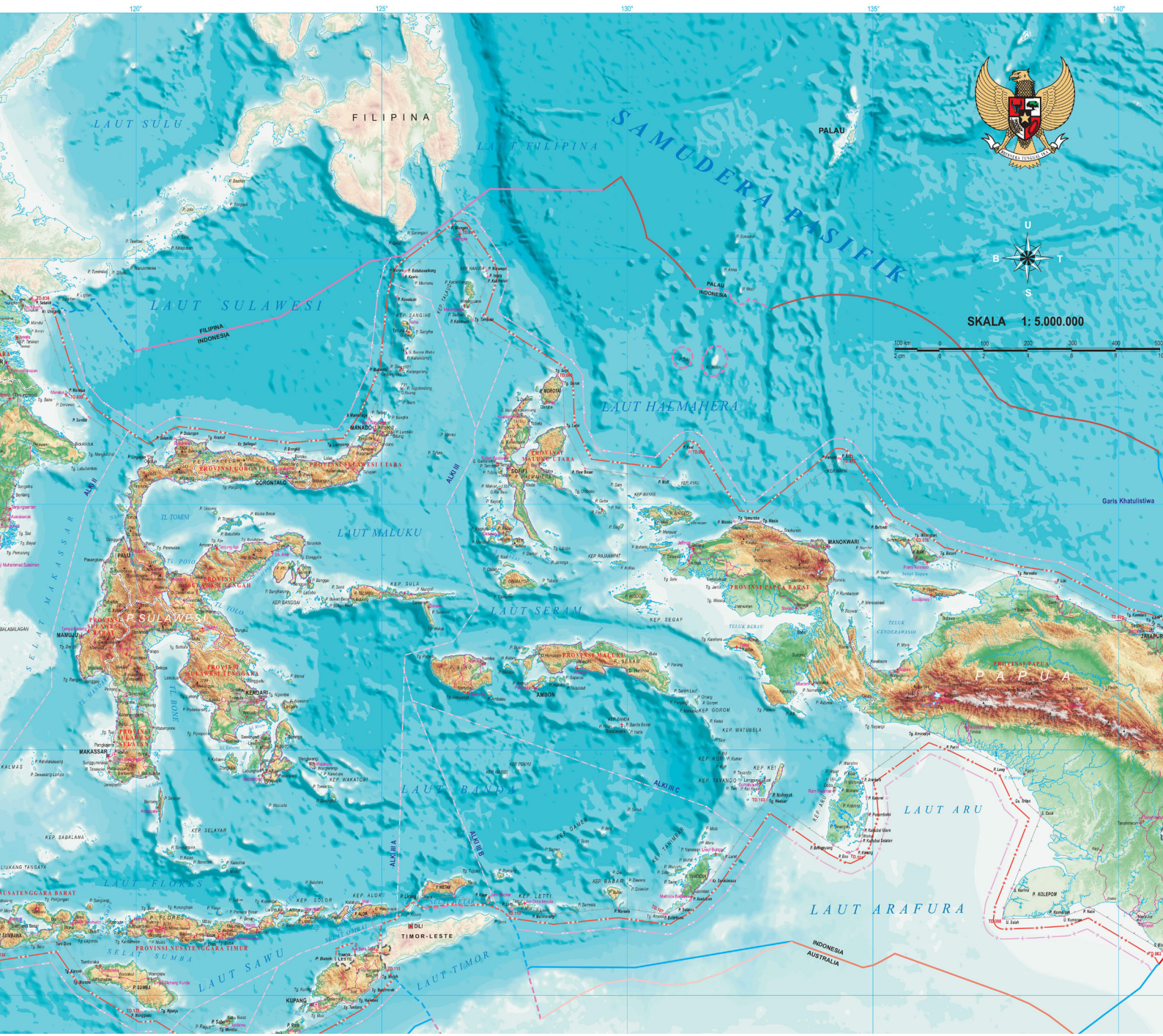
75
TUH INDONESIA



PETA NEGARA KESATUAN



REPUBLIK INDONESIA





SEK JEN
KEMENDAGRI



DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | 3 |
| Daftar isi | 9 |
| BAB I PENDAHULUAN | 11 |
| 1.1 Kondisi Umum | 12 |
| 1.1.1 Capaian Strategis 2015 -2019 | 13 |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan | 42 |
| 1.2.1 Potensi / Tantangan | 42 |
| 1.2.2 Isu Strategis | 46 |
| BAB II VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN | 65 |
| 2.1 Visi | 68 |
| 2.2 Misi | 69 |
| 2.3 Tujuan Strategis | 69 |
| 2.4 Sasaran Strategis | 70 |
| BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN | 75 |
| 3.1 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 | 76 |
| 3.1.1 Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 | 76 |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri | 77 |
| 3.3 Kebijakan <i>Quick Wins</i> Kementerian Dalam Negeri | 82 |
| 3.4 Kerangka Regulasi | 83 |
| 3.5 Kerangka Kelembagaan | 84 |
| BAB IV TARGET DAN KINERJA PENDANAAN | 91 |
| 4.1 Target Kinerja | 92 |
| 4.2 Kerangka Pendanaan | 95 |
| BAB IV PENUTUP | 99 |
| LAMPIRAN I MATRIKS KERANGKA REGULASI | |
| LAMPIRAN II TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN | |
| LAMPIRAN III REKAPITULASI INDIKATOR DAN INDIKASI TARGET KINERJA PRIORITAS NASIONAL RPJMN | |



BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu unsur perangkat Pemerintah yang membidangi sebagian urusan pemerintahan, khususnya urusan dalam negeri. Penyelenggaraan urusan dalam negeri tersebut dipertegas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selanjutnya, mempedomani Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, serta sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri di bidang urusan pemerintahan dalam negeri tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 untuk menjadi pedoman dalam mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam lima tahun ke depan.

Namun, sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, pada awal Tahun 2020, Indonesia dikejutkan dengan terjadinya serangan pandemi *Corona Virus Diseases (Covid-19)*, yang menurut *World Health Organization (WHO)* kejadian tersebut berawal ditemukan adanya kasus kluster pneumonia dengan etiologi (penyebab penyakitnya) tidak jelas di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dengan terjadinya pandemi *Covid-19* tersebut, berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat baik global maupun local Indonesia. Dampak tersebut perlu diantisipasi dalam perumusan Renstra Kementerian Dalam Negeri, khususnya dalam perumusan arah kebijakan, program dan kegiatan strategis lima tahun ke depan. Hal ini mengingat karena tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan pandemi *Covid-19* tersebut akan berakhir.

Dalam penyusunan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 ini, selain memperhatikan pencapaian program dan kegiatan strategis lima tahun sebelumnya (Renstra 2015-2019), kondisi internal dan eksternal berupa potensi/tantangan dan isu strategis dalam 5 tahun ke depan, dan dampak pandemi *Covid-19*, juga memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sebagai berikut: (1) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, (2) prinsip pembangunan berkelanjutan, (3) prinsip pengarusutamaan gender, dan (4) prinsip inovatif dan berdaya saing.

1.1.1 CAPAIAN STRATEGIS 2015 - 2019

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Dalam Negeri sebagai poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, arah kebijakan dan strategi Kementerian Dalam Negeri dikelompokkan pada 6 bidang prioritas pembangunan, meliputi:

- Bidang Politik Dalam Negeri, diarahkan untuk mewujudkan terpeliharanya persatuan, kesatuan dan karakter bangsa, serta terjaganya stabilitas politik dalam negeri yang mendukung demokratisasi.
- Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah, diarahkan untuk penguatan pelaksanaan otonomi daerah melalui penataan regulasi, kelembagaan, dan inovasi daerah, serta kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif.
- Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas *database* kependudukan nasional sebagai dasar penertiban dokumen kependudukan, serta pendayagunaan *database* kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional.
- Bidang Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah, diarahkan untuk penguatan administrasi kewilayahan, penyelenggaraan trantibum-linmas, peran gubernur sebagai wakil pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dan mendorong keserasian pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- Bidang Pemerintahan Desa, diarahkan untuk meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien.
- Bidang Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan, diarahkan untuk penguatan kapasitas kelembagaan dalam koridor reformasi birokrasi dengan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintahan dalam negeri, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung reformasi birokrasi.



Pelaksanaan dan pencapaian kinerja Kementerian Dalam Negeri pada keenam bidang prioritas pembangunan tersebut di atas selama 5 Tahun (2015-2019), secara umum digambarkan sebagai berikut:

1. Bidang Politik Dalam Negeri

Untuk mewujudkan terpeliharanya persatuan, kesatuan dan karakter bangsa, beberapa hasil yang telah dicapai adalah: (a) telah dilakukan fasilitasi pembentukan gugus tugas revolusi mental di daerah yang diharapkan dapat memberikan pemahaman sekaligus menjadi pedoman awal pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di daerah, (b) penyelenggaraan Pekan Kerja Nyata Gerakan Nasional Revolusi Mental (PKN/GNRN) dilakukan secara rutin dan berkesinambungan setiap tahun mulai tahun 2017, (c) penyelenggaraan forum dialog dalam rangka meningkatkan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan bagi masyarakat, terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan di 33 Provinsi dan 134 Kabupaten/Kota, (d) terbentuknya Forum Pembaruan Kebangsaan (FPK) di 34 Provinsi dan 341 Kabupaten/Kota yang diantaranya pada 9 Kabupaten di 9 Provinsi telah membentuk FPK sampai tingkat Kecamatan, (e) telah terjalinnya kemitraan dengan 2.504 organisasi kemasyarakatan dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang politik dan pemerintahan umum, (f) pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di 34 Provinsi dan 456 Kabupaten/Kota, dan (g) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 34 Provinsi dan 422 Kabupaten/Kota sebagai wadah bagi elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara kerukunan masyarakat sejak dini. Selanjutnya Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019, salah satu sasaran pembangunan nasional adalah terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih efektif dan diukur dengan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Nilai skor IDI sejak tahun 2015 sangat dinamis, dengan nilai Skor tahun 2015 sebesar 72,82, dan tahun 2016 sebesar 70,09. Untuk mendorong peningkatan nilai skor IDI, Kementerian Dalam Negeri



sesuai lingkup tugas dan fungsinya telah melaksanakan fasilitasi penguatan Kelompok Kerja (Pokja) IDI di daerah sejak tahun 2015, dengan upaya yang terus mendorong pembentukan dan pengembangan Pokja IDI untuk memperkuat demokrasi di daerah melalui Pendidikan politik di masyarakat, termasuk pelibatan kaum perempuan, kelompok difabel dan kaum marginal lainnya, Nilai Skor IDI tahun 2017 mulai mengalami peningkatan menjadi sebesar 72,11 dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 72,39. Rincian perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (ID) dari tahun 2017-2018 disajikan pada Gambar 1.1.

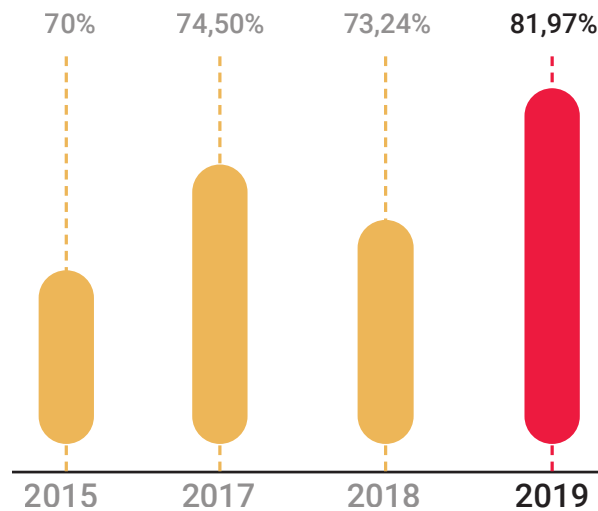


Gambar 1.1 Skor Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2017-2018

Dalam rangka mendorong akses dan kesempatan politik kaum perempuan, penyandang difabel dan kelompok rentan/marginal, Kementerian Dalam Negeri telah melakukan langkah-langkah antara lain: (a) Penguatan implementasi Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif tentang pemenuhan minimal 30% perempuan dalam keterwakilan di parlemen dan kepengurusan Partai Politik, serta keanggotaan KPU dan Bawaslu; (b) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang; (c) dan Fasilitasi kelembagaan pemberdayaan calon legislatif perempuan dan forum pendidikan politik dalam rangka peningkatan kapasitas calon legislatif perempuan yang diselenggarakan guna memberi pembekalan bagi calon legislatif perempuan. Dalam rangka mengawal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2015, 2017, dan 2018, serta Pemilihan Umum (Pemilu) DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Pemerintah Daerah bersama TNI dan Polri telah memberikan dukungan kepada KPU dalam mengawal dan pengamanan mulai dari proses rekapitulasi suara

di tingkat Kecamatan sampai dengan rekapitulasi di tingkat pusat, dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa daerah agar dapat berjalan lancar dan tertib.

Dengan semakin baiknya kondisi demokrasi di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada serentak dari Tahun 2015 s.d Tahun 2018 secara umum cenderung meningkat, yaitu Tahun 2015 sebesar 70%, meningkat menjadi sebesar 74,50% pada tahun 2017, dan sedikit menurun pada Tahun 2018 menjadi sebesar 73,4%. Sementara itu, untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat partisipasi masyarakat sangat tinggi, yaitu sebesar 81,97% (Gambar 1.2).



Gambar 1.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak (2015, 2017, dan 2018) dan Pemilu 2019

Dalam rangka memperkuat kemandirian Partai Politik (Parpol), melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik telah ditingkatkan proporsi alokasi Bantuan Keuangan Parpol mulai tahun 2018 sebesar Rp.1.000 per suara sah dari tahun sebelumnya sebesar Rp.108 per suara sah. Total Bantuan Keuangan Partai Politik melalui APBN yang diberikan dalam kurun waktu tahun 2015 s.d. 2019 kepada Parpol di tingkat pusat sejumlah Rp.286.732.801.268,. Rincian perhitungan Alokasi Bantuan Keuangan Partai Politik Hasil Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019 disajikan pada Tabel 1.1 dan Tabel 1.2.

Tabel 1.1 Perhitungan Alokasi Bantuan Keuangan Parpol Hasil Pemilu Tahun 2014

| BANTUAN KEUANGAN PARPOL | | | | |
|--|----------------|-----------------------------------|--|--|
| TINGKAT PUSAT HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU 2014 | | | | |
| NO. | PARTAI POLITIK | PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILU 2014 | BESARNYA BANTUAN (Rp. 108,-) SEBELUM PP 1/2018 | BESARNYA BANTUAN (Rp. 1.000,-) SEBELUM PP 1/2018 |
| 1 | PDI PERJUANGAN | 23.673.018 | 2.556.685.944,00 | 23.673.018.000,00 |
| 2 | GOLKAR | 18.424.715 | 1.989.869.220,00 | 18.424.715.000,00 |
| 3 | GERINDRA | 14.750.043 | 1.593.004.644,00 | 14.750.043.000,00 |
| 4 | DEMOKRAT | 12.724.509 | 1.374.246.972,00 | 12.724.509.000,00 |
| 5 | PKB | 11.292.151 | 1.219.552.308,00 | 11.292.151.000,00 |
| 6 | PAN | 9.459.415 | 1.021.616.820,00 | 9.459.415.000,00 |
| 7 | PKS | 8.455.614 | 913.206.312,00 | 8.455.614.000,00 |
| 8 | NASDEM | 8.412.949 | 908.598.492,00 | 8.412.949.000,00 |
| 9 | PPP | 8.152.957 | 880.519.356,00 | 8.152.957.000,00 |
| 10 | HANURA | 6.575.391 | 710.142.228,00 | 6.575.391.000,00 |
| JUMLAH | | 121.920.762 | 13.167.422.296,00 | 121.920.762.000,00 |

Tabel 1.2 Perhitungan Alokasi Bantuan Keuangan Parpol Hasil Pemilu Tahun 2019

| BANTUAN KEUANGAN PARPOL | | | | |
|---|----------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| TINGKAT PUSAT HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PEMILU 2019 | | | | |
| NO. | PARTAI POLITIK | JUMLAH KURSI DPR RI | PEROLEHAN SURARA HASIL PEMILU 2019 | BESARNYA BANTUAN (Rp. 1.000,-) |
| 1 | PDI PERJUANGAN | 128 | 27.053.961 | 27.053.961.000,00 |
| 2 | GOLKAR | 85 | 17.229.789 | 17.229.789.000,00 |
| 3 | GERINDRA | 78 | 17.594.839 | 17.594.839.000,00 |
| 4 | NASDEM | 59 | 12.661.792 | 12.661.792.000,00 |
| 5 | PKB | 58 | 13.570.097 | 13.570.097.000,00 |
| 6 | DEMOKRAT | 54 | 10.876.057 | 10.876.057.000,00 |
| 7 | PKS | 50 | 11.493.663 | 11.493.663.000,00 |
| 8 | PAN | 44 | 9.572.623 | 9.572.623.000,00 |
| 9 | PPP | 19 | 6.323.147 | 6.323.147.000,00 |
| JUMLAH | | 575 | 126.375.963 | 126.375.968.000,00 |

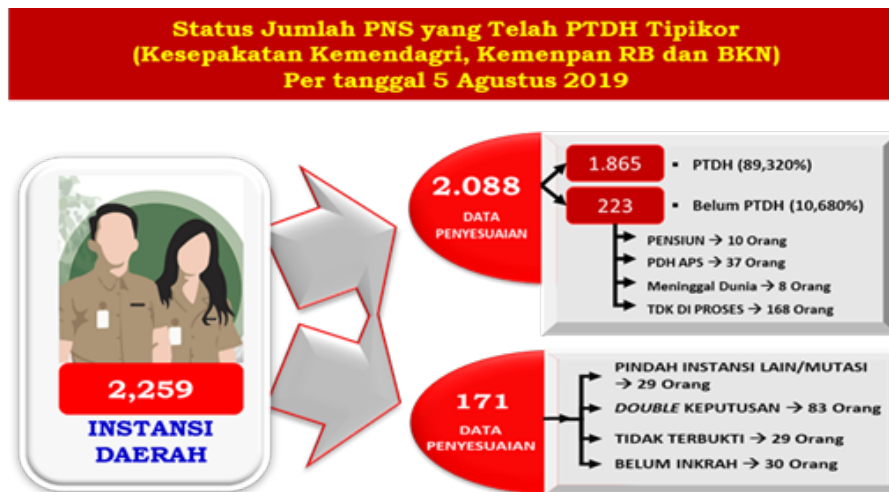
Selanjutnya dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, pada pertengahan tahun 2019 telah dilakukan pengalihan kedudukan Sekretariat DKPP yang sebelumnya berada di Badan Pengawasan Pemilu menjadi di Kementerian Dalam Negeri. Dengan kedudukan Sekretariat DKPP di Kementerian Dalam Negeri pada akhir tahun 2019, telah difasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DKPP antara lain menerima pengaduan dan menyelenggarakan persidangan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, serta menetapkan putusan perkara dalam periode September s.d Desember 2019 sebanyak 140 putusan perkara.





2. Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dalam rangka penguatan pelaksanaan otonomi daerah, beberapa hasil yang telah dicapai, sebagai berikut: (a) telah dilaksanakan beberapa agenda terkait penataan regulasi dan kelembagaan dengan diterbitkannya Undang-Undang yang memberikan payung hukum terlaksananya Pilkada serentak pada tahun 2015, 2017 dan 2018, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang), (b) telah dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditindaklanjuti melalui skema peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan evaluasi daerah otonomi baru secara rutin dan evaluasi daerah otonomi baru secara rutin dan berkelanjutan setiap tahunnya. Dari 18 Daerah Otonomi Baru (DOB) hasil pemekaran 2012-2014 telah dilakukan evaluasi perkembangan daerah terhadap 3 DOB pada tahun 2019, yaitu Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kabupaten Muna Barat dengan mendapatkan kategori "baik", (c) pemberian nomor register terhadap 391 Ranperda Provinsi, (d) telah dilakukan pembatalan terhadap 3.032 Perda/Perkada yang diidentifikasi bermasalah (bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum, serta menghambat investasi dan pelayanan publik), dan 279 Peraturan/Keputusan Menteri Dalam Negeri, (e) telah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 2.259 PNS Instansi Daerah yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telah memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (Gambar 1.3).



Gambar 1.3 Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) PNS di Daerah

Selain itu, juga telah terfasilitasinya penetapan Peraturan Daerah pada daerah otonomi khusus (Papua, Papua Barat, dan Aceh) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY); Pelantikan 51 anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua dan 42 anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat; telah terlaksananya kerja sama peningkatan kualitas sumber daya Orang Asli Papua (OAP) melalui Program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) bagi 2.668 siswa dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) bagi 2.355 siswa; telah dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah dengan diterbitkannya Perda pembentukan kelembagaan dan kepegawaian daerah di 34 provinsi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri turunannya; telah diselenggarakan pembekalan kepemimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota terpilih hasil Pilkada tahun 2015 s.d 2019; telah dilakukan pembekalan dan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD se-Indonesia baik yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri maupun bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi. Dalam upaya meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi DPRD, Kementerian Dalam Negeri dari Tahun 2015 s.d Tahun 2019 telah melaksanakan kegiatan Orientasi pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Jumlah total alumni yang telah mengikuti orientasi tersebut adalah sebanyak 182.313 alumni. dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.3 di bawah ini.

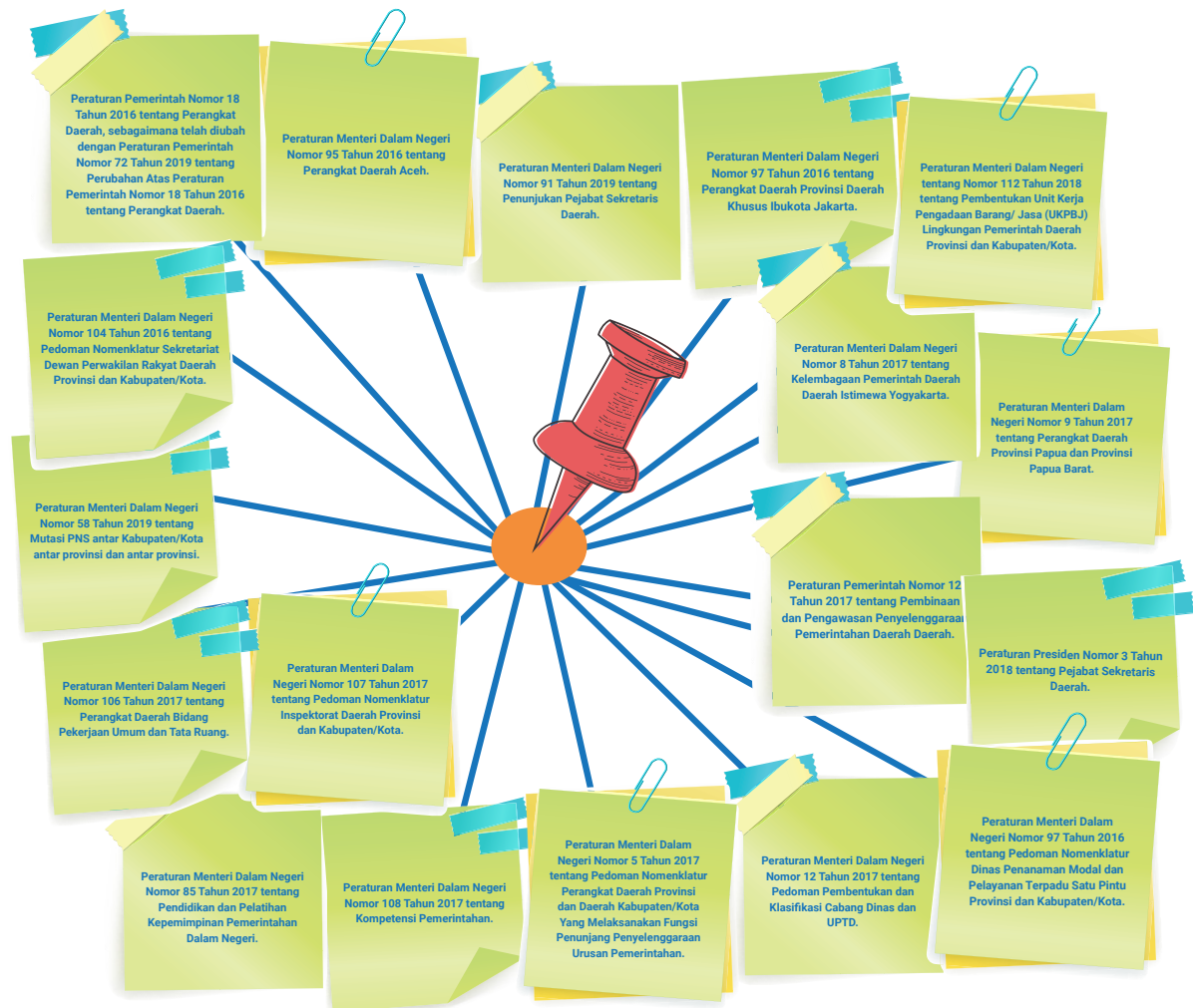
Tabel 1.3 Orientasi/Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Orientasi Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 33.258 | 35.642 | 38.768 | 38.142 | 36.503 |
| Alumni | Alumni | Alumni | Alumni | Alumni |

Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, telah dilakukan supervisi regulasi terkait netralitas ASN di Daerah dalam rangka Pemilu 2019 yaitu terdapat 83 ASN Daerah yang melakukan Pelanggaran Terlibat Tim Kampanye dan/ Tim Sukses dan terdapat 17 Pengaduan Netralitas ASN di 13 Provinsi.

Selain itu, dalam rangka penataan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diterbitkan:



Dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah memberikan implikasi adanya penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 548 Daerah (34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota), Dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah memberikan implikasi adanya penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di 548 Daerah (34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota), dan efisiensi jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) di OPD terkait yang semula terdapat 44.397 jabatan menjadi 38.684 jabatan, dan telah ditingkatkan kecepatan pelayanan mutasi bagi ASN daerah sampai dengan tahun 2019 tercatat total 1.741 usulan mutasi yang menggunakan aplikasi e-mutasi. Selanjutnya, menindaklanjuti komitmen nasional untuk menciptakan iklim transparansi, bersih, dan profesional dalam penyelenggaraan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di daerah, dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan UKPBJ di lingkungan Provinsi dan Kabupaten/Kota, telah terbentuk UKPBJ mandiri di 34 provinsi dan 433 kabupaten/kota.

Dalam rangka penguatan kelembagaan Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) di daerah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Penguatan APIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, antara lain terkait penambahan fungsi APIP dalam pencegahan korupsi dan pengawasan reformasi birokrasi, pola pelaporan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terkait indikasi kerugian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP), pelaksanaan pemeriksaan berindikasi kerugian tanpa harus menunggu persetujuan kepala daerah, serta pemberhentian dan pengangkatan inspektur harus izin Menteri Dalam Negeri dan/atau GWPP. Di samping aspek kelembagaan, penguatan APIP juga dilakukan pada aspek penambahan jumlah SDM melalui inpassing Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) sebanyak 439 orang, dan aspek kecukupan anggaran melalui kebijakan pengalokasian anggaran pengawasan minimal 0,30% s.d. 0,90% untuk Provinsi dan 0,50% s.d. 1% untuk Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.



Selanjutnya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, telah disusun Indeks Inovasi Daerah berbasis *web* sebagai alat ukur untuk menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam berinovasi, yaitu kemampuan melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, terkait tata kelola pemerintahan daerah, pelayanan publik, dan inovasi daerah lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Indeks inovasi daerah tersebut adalah sebagai dasar dalam penyusunan peta (rencana aksi) pembinaan inovasi daerah, pemberian penghargaan daerah inovatif (*Innovative Government Award/IGA*) Tahun 2019. Sejak awal digunakan pada bulan September 2018 sampai dengan akhir Tahun 2018, telah terhimpun 3.718 inovasi (dengan kategori inovasi tata kelola sebanyak 698, inovasi pelayanan publik sebanyak 2.142, dan inovasi lainnya sebanyak 878) yang diinput oleh 286 daerah (713 inovasi oleh 30 provinsi, 2.022 inovasi oleh 195 Kabupaten, dan 983 inovasi oleh 61 Kota). Dari daerah dimaksud, terdapat 3 kabupaten daerah perbatasan dan 26 kabupaten daerah tertinggal yang *meng-input* data inovasi daerah.

Pada Tahun 2019 (per Agustus) diperoleh 1.841 inovasi yang diinput oleh 256 daerah (284 inovasi oleh 24 provinsi, 1.112 inovasi oleh 150 Kabupaten, dan 445 inovasi oleh 51 Kota). Selain itu telah disusun Peta (Rencana Aksi) Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2018 dan 2019, sebagai acuan penyusunan strategi pembinaan dalam rangka telah juga dicapai pengembangan replikasi model hasil inovasi daerah melalui aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), mencakup 13 layanan pemerintahan termasuk layanan perizinan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah daerah. Sejak awal peluncurannya pada Mei 2018, terdapat 50 Daerah (8 Provinsi, 31 Kabupaten 11 Kota) melalui kepala daerah masing-masing yang menyatakan komitmen untuk difasilitasi dalam penerapan layanan Puja Indah, khusus untuk bidang layanan perizinan (layanan *transbumihumas*, sosial, pariwisata, pekerjaan umum, perhubungan, dan administrasi pemerintahan), sejak tahun 2017 telah diterapkan pada 8 kabupaten tertinggal (Musi Rawas, Lebak, Lambung Barat, Jeneponto, Bangkalan, Seluma, Lombok Barat, dan Ketapang) sebagai daerah *pilot project* penerapan inovasi. penerapan inovasi daerah oleh seluruh pemerintahan daerah, dengan melibatkan Kementerian/LPKN terkait guna sinergi kebijakan dan program pembinaan inovasi daerah sehingga pemberian penghargaan inovasi daerah akan diselenggarakan secara nasional lintas kementerian/LPKN (Kementerian Dalam Negeri, Kemenpan RB, Kemenristekdikti, Bappenas, LAN, BPPT, dan LIPI).

Telah juga dicapai pengembangan replikasi model hasil inovasi daerah melalui aplikasi Pusat Jejaring Inovasi Daerah (Puja Indah), mencakup 13 layanan pemerintahan termasuk layanan perizinan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemerintah daerah. Sejak awal peluncurannya pada Mei 2018, terdapat 50 Daerah (8 Provinsi, 31 Kabupaten 11 Kota) melalui kepala daerah masing-masing yang menyatakan komitmen untuk difasilitasi dalam penerapan layanan Puja Indah, khusus untuk bidang layanan perizinan (layanan *transbumihumas*, sosial, pariwisata, pekerjaan umum, perhubungan, dan administrasi pemerintahan), sejak tahun 2017 telah diterapkan pada 8 kabupaten tertinggal (Musi Rawas, Lebak, Lambung Barat, Jeneponto, Bangkalan, Seluma, Lombok Barat, dan Ketapang) sebagai daerah *pilot project* penerapan inovasi.

Selanjutnya telah dicapai pemberian penghargaan kepada daerah inovatif (Innovative Government Award/IGA), sebagai dasar usulan pemberian insentif sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah; Tersedianya aplikasi *Tutorial Exhibition Display of Innovation (TUXEDOVATION)* berbasis web yang bermanfaat sebagai media informasi dan sarana pembelajaran bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan inovasi. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, dalam lima tahun terakhir telah dicapai antara lain: (a) pemberlakuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual oleh seluruh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan (b) peningkatan kualitas opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari 175 daerah pada Tahun 2014, meningkat menjadi 454 daerah pada Tahun 2018 (meningkat 159%). dengan rincian sebagaimana disajikan pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Opini WTP atas LKPD Tahun 2014 – 2018

| Daerah | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | |
|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | Capaian | % | Capaian | % | Capaian | % | Capaian | % | Capaian | % |
| Provinsi | 26 | 76,47 | 29 | 85,29 | 31 | 91,18 | 33 | 97,06 | 32 | 94,12 |
| Kab/Kota | 149 | 29,33 | 232 | 45,67 | 285 | 56,10 | 381 | 75,00 | 422 | 83,07 |
| Total | 175 | 32,29 | 261 | 48,15 | 316 | 58,30 | 414 | 76,38 | 454 | 83,76 |

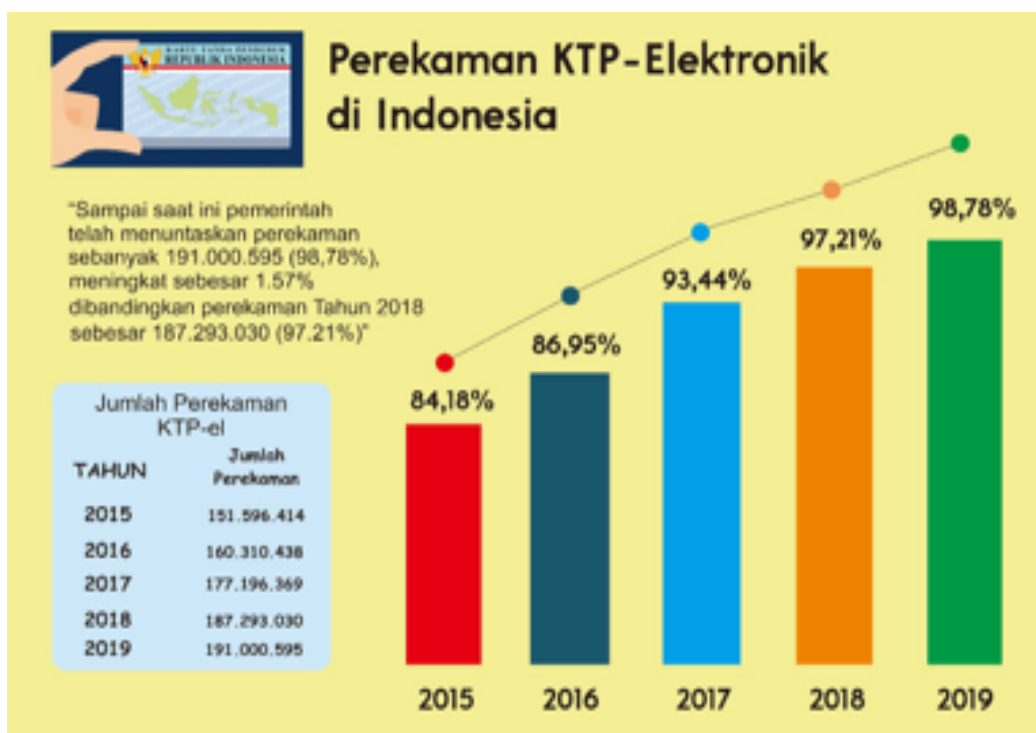
Demikian halnya dengan penetapan Peraturan Daerah (Perda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu yang meningkat dari 464 daerah tahun 2015 menjadi 482 daerah pada tahun 2019, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari 291 daerah tahun 2014 menjadi 409 daerah tahun 2018. Meningkatnya kemandirian keuangan pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan meningkatnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Indonesia sebesar 24,1 % tahun 2015 menjadi 24,8 % pada tahun 2019; serta mendorong implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan daerah mulai tahun 2017 hingga tahun 2019 telah diterapkan di 34 Provinsi, 319 Kabupaten dan 83 Kota.





3. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan

Dalam rangka meningkatkan kualitas *database* kependudukan nasional sebagai dasar penertiban dokumen kependudukan, sampai dengan akhir tahun 2019 telah tercapai perekaman bagi penduduk wajib KTP sebanyak 191.027.881 jiwa dari 193.365.749 jiwa wajib KTP (98,79%). Rincian data perekaman bagi penduduk wajib KTP disajikan pada Gambar 1.4.



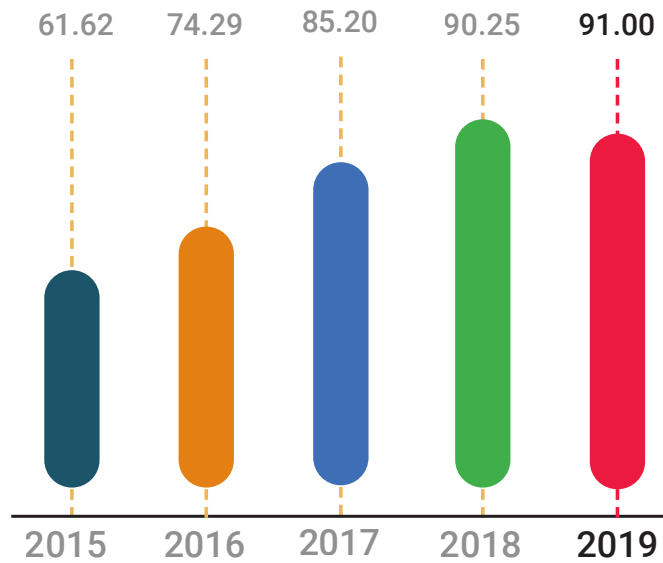
Gambar 1.4 Perekaman Bagi Penduduk Wajib KTP



Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di bidang administrasi kependudukan telah diterapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) pada dokumen kependudukan non KTP-el dan Kartu Identitas Anak (KIA). Hal ini memberikan kemudahan dalam penandatanganan dokumen kependudukan oleh pejabat berwenang dan disisi lain memungkinkan pencetakan dokumen kependudukan tidak hanya di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan tetapi dapat dilakukan dimana saja.

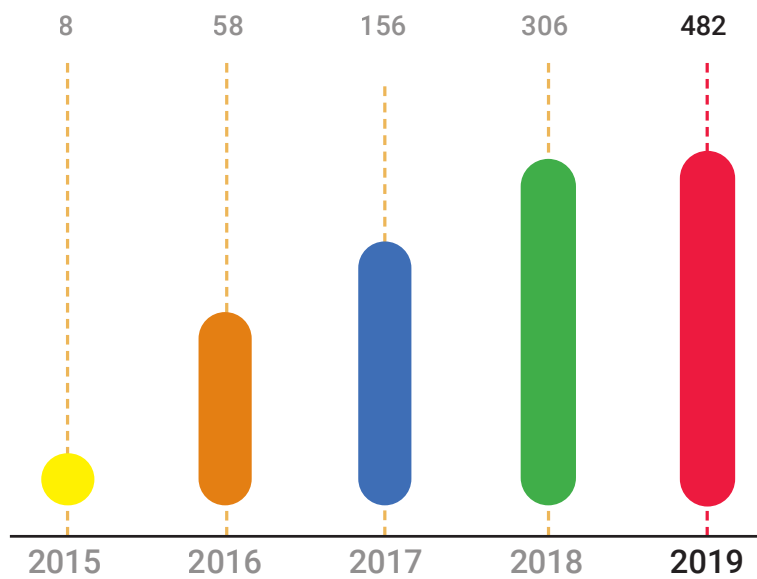
Tanda Tangan secara Elektronik pada dokumen kependudukan mendorong pengembangan pelayanan digital lainnya seperti: Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), dan pencetakan dokumen di rumah penduduk. Sampai dengan akhir Tahun 2019 penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Kependudukan telah dilaksanakan di 509 Kabupaten/Kota Dokumen yang sudah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik antara lain: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah, Kartu Keluarga, Surat Keterangan.

Selanjutnya, berkenaan dengan pemenuhan cakupan kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun s.d. akhir tahun 2019 telah diterbitkan sebanyak 74.288.008 akta kelahiran dari 81.632.355 anak (91%). Rincian kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 Tahun dapat dilihat pada Gambar 1.5



Gambar 1.5 Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Bagi Anak Usia 0-18 Tahun

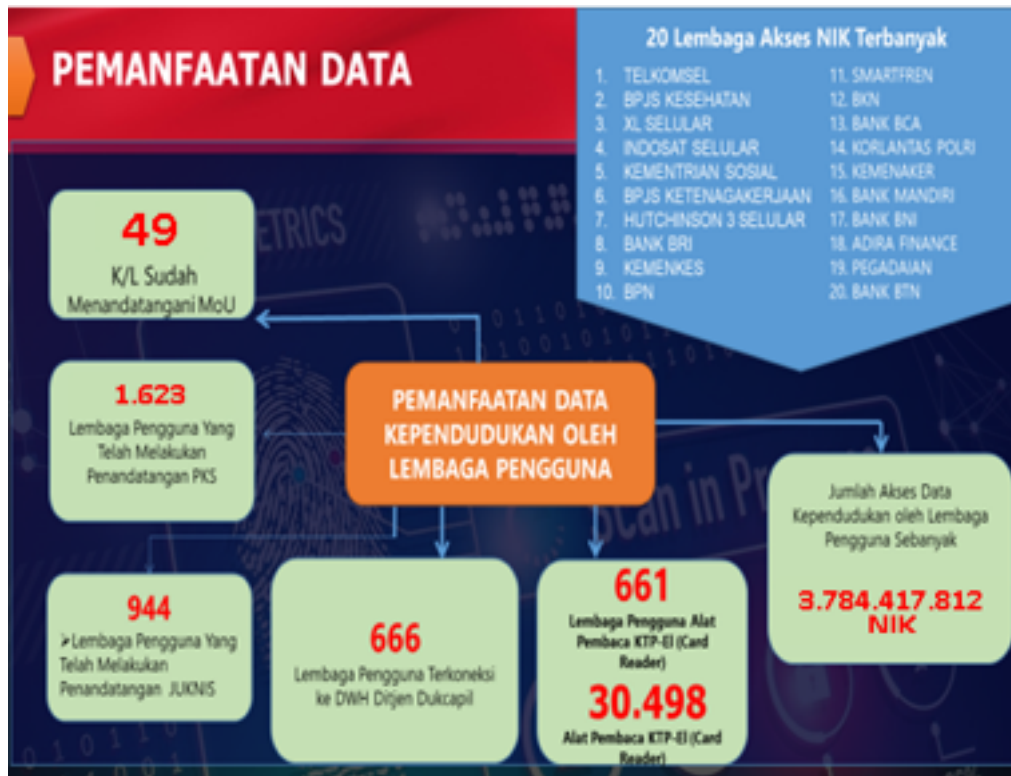
Untuk penerapan Kartu Identitas Anak (KIA), sebagai kartu identitas resmi yang diberikan kepada penduduk yang berdomisili di suatu Kabupaten/Kota dan belum berusia 17 tahun atau belum menikah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerapan Kartu Identitas Anak, dari semula pada tahun 2015 diterapkan baru di 8 Kabupaten/Kota terus mengalami peningkatan, dan sampai dengan akhir tahun 2019 telah diterapkan di 482 Kabupaten/Kota dari 514 Kabupaten/Kota (93,77%), sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.6.



Gambar 1.6 Penerapan KIA di Kabupaten/Kota

Dalam hal penerapan inovasi layanan penduduk, telah dicapai beberapa hal, antara lain: layanan cepat (maksimal 1 jam), layanan jemput bola (melalui layanan mobil keliling menggunakan mobil, motor, *speedboat*, perahu, sampan, atau kendaraan lain yang memiliki desain khusus memberikan pelayanan administrasi kependudukan). Selanjutnya, dalam rangka pendayagunaan *database* kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional, *database* kependudukan Kementerian Dalam Negeri telah digunakan sebagai Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2015, 2017, dan 2018 serta Pemilu serentak tahun 2019. Selain itu, telah ditandatangani 49 *Memorandum of Understanding (MoU)*,

dan telah dilaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian/Lembaga maupun Lembaga Pengguna sebanyak 1.623 PKS untuk mengakses data kependudukan yang dimanfaatkan bagi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum serta pencegahan kriminal (Gambar 1.7).



Gambar 1.7 Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Kementerian/Lembaga

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri juga telah mengembangkan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) yang merupakan perangkat yang dapat digunakan masyarakat luas untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri. Dengan penerapan ADM ini masyarakat tidak harus datang ke Dinas Dukcapil untuk mengambil hasil pengurusan dokumen, akan tetapi dapat langsung mencetak dokumen kependudukan pada tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan dan tempat-tempat keramaian lainnya.

Dengan pelayanan *online*/daring penduduk dapat mengurus dokumen kependudukan dari rumah tanpa perlu datang ke Kantor Dukcapil atau pusat pelayanan administrasi kependudukan. Pengurusan dokumen kependudukan dapat dilakukan lebih cepat dan tidak dibatasi waktu atau jam pelayanan di kantor. Pengurusan dokumen kependudukan lebih efisien karena tidak dibutuhkan transportasi untuk datang ke pusat-pusat pelayanan.

Upaya peningkatan layanan kepada masyarakat juga dilakukan inovasi berupa pelayanan terintegrasi. Dengan pelayanan terintegrasi ini masyarakat memungkinkan mendapatkan lebih dari satu dokumen dalam satu kali pengurusan. Seperti dalam mengurus akta kematian dapat mendapatkan 3 (tiga) dokumen masing-masing: Akta Kematian; Perubahan status perkawinan pada KTP-el; dan Perubahan KK (3 in1).

4. Bidang Pembinaan Kewilayahan dan Pembangunan Daerah



Sebagai upaya untuk meningkatkan pembinaan administrasi kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri telah memfokuskan kegiatan pada percepatan penegasan batas daerah dan pembakuan rupa bumi. Dari total seluruh segmen batas antar daerah sebanyak 979, telah diselesaikan penegasan sebanyak 627 segmen batas antara daerah (129 segmen batas antar provinsi dan 498 segmen batas antar kabupaten/kota) termaksud diantaranya 80 segmen batas antar daerah diselesaikan pada tahun 2019 sehingga masih tersisa 352 segmen batas daerah yang harus diselesaikan penegasan batasnya. Selanjutnya, dilakukan verifikasi 350 Nama Pulau di 8 Provinsi, 404 Nama Rupa Bumi Alami (sungai, Gunung, dan Bukit) di 3 Provinsi; dan 575 Nama Rupa Bumi Warisan Budaya di 11 Provinsi.

Selain itu, telah difasilitasi penguatan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) dengan capaian sebagai berikut: (a) telah diterbitkan regulasi untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja (Pol-PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar), antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, (b) peningkatan profesionalisme aparat penyelenggara trantibumlinmas melalui kegiatan kediklatan dan bimbingan teknis kepada sebanyak 21.423 orang (14.159 orang aparat Pol-PP,

2.640 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), 1.190 anggota perlindungan masyarakat (Linmas), dan 3.434 aparat Damkar), (c) pemenuhan 78 unit sarana prasarana penanggulangan bencana (Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Gudang Peralatan/Logistik, dan Gedung Pusat Pengendalian Operasional/Pusdalops). Rincian jumlah peningkatan profesional aparat penyelenggara Trantibum-Linmas dan Pemadam Kebakaran melalui kegiatan Kediklatan dan Bimbingan Teknis dari Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 1.5 dan Tabel 1.6 di bawah ini.

Tabel 1.5 Peningkatan Profesionalisme Aparat Penyelenggara Trantibum-Linmas Melalui Kegiatan Kediklatan dan Bimbingan Teknis Tahun 2015-2019

| Aparatur | Kegiatan | Jumlah | | | | | Jumlah |
|---|---|--------|-------|-------|-------|------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Satpol PP | Peningkatan kapasitas bagi Satpol PP pola 150 JP | 150 | - | - | - | - | 150 |
| | Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bagi Satpol PP | 2.419 | 568 | - | - | - | 2.987 |
| | Uji kompetensi bagi aparat Satpol PP | - | 3.495 | 2.247 | 4.272 | - | 10.014 |
| | Peningkatan kemampuan deteksi dini bagi anggota Satpol PP dalam upaya deradikalisasi | - | - | 50 | - | - | 50 |
| | Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dalam rangka sosialisasi kode etik dan penerapan gerakan Indonesia ramah | - | - | 176 | - | - | 176 |
| | Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP melalui implementasi Perpres tentang Jatfung Pol PP | - | - | 70 | - | - | 70 |
| | Peningkatan pemahaman HAM bagi Aparat Satpol PP | - | - | 270 | - | 50 | 320 |
| | Peningkatan kapasitas aparat Satpol PP dalam mengawal pilkada | - | - | - | 75 | - | 75 |
| | Peningkatan kapasitas Pengelola Jabatan fungsional Polisi Pamong Praja di Provinsi | - | - | - | 75 | - | 75 |
| | Peningkatan pemahaman Hak Asasi Manusia bagi Aparat Satpol PP | - | - | - | 150 | - | 150 |
| | Peningkatan kapasitas bagi penilai angka kredit | - | - | - | - | 68 | 68 |
| | Penilaian Jatfung Satpol PP di Tingkat Pusat | - | - | - | - | 24 | 24 |
| Jumlah Aparatur Satpol PP yang ditingkatkan kapasitasnya | | | | | | | 14.159 |
| Aparatur | Kegiatan | Jumlah | | | | | Jumlah |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| PPNS | Peningkatan Kapasitas melalui diklat PPNS | 539 | 356 | 291 | 351 | 120 | 1.657 |
| | Peningkatan kapasitas pemberkasan hasil penyidikan penyidikan PPNS | 198 | - | - | - | - | 198 |
| | Peningkatan kapasitas intelijen bagi pejabat PPNS | 193 | - | - | - | 70 | 263 |
| | Peningkatan kapasitas operasional tugas PPNS bagi pejabat PPNS | - | 66 | - | - | - | 68 |
| | Peningkatan kapasitas dan strategi penegakan perda bagi aparat Satpol PP/PPNS sesuai nilai-nilai revolusi mental | - | - | 54 | 75 | - | 129 |
| | Peningkatan kapasitas bagi pejabat PPNS dalam rangka meningkatkan kemampuan penegakan Perda secara pro yustisi sesuai nilai-nilai revolusi mental | - | - | 100 | 75 | - | 175 |
| | Peningkatan kapasitas intelijen bagi pejabat PPNS | - | - | 52 | - | - | 52 |
| | Peningkatan kapasitas bagi pejabat PPNS dlm rangka peningkatan kemampuan Pemeriksaan tersangka, saksi, ahli dan barang bukti | - | - | - | 100 | - | 100 |
| | Jumlah Aparatur PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya | | | | | | |

| Aparatur | Kegiatan | Jumlah | | | | | Jumlah |
|--------------------------|---|--------|------|------|------|---------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Satlinmas | Peningkatan kapasitas SDM Anggota Satlinmas dalam membantu Penanggulangan Bencana | 200 | - | - | - | - | 200 |
| | Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi | - | 100 | - | - | - | 100 |
| | Peningkatan kapasitas Anggota Satlinmas dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan membantu penyelenggaraan Pilkada serentak | - | - | 300 | - | - | 300 |
| | Peningkatan kapasitas dalam meningkatkan kemampuan membantu penanggulangan bencana di daerah sesuai nilai revolusi mental | - | - | 216 | - | - | 216 |
| | Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam membantu penanggulangan bencana | - | - | - | 150 | - | 150 |
| | Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas dalam membantu penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019 | - | - | - | 224 | - | 224 |
| | Jumlah Aparatur Satlinmas yang ditingkatkan kapasitasnya | | | | | | 1.190 |
| Total Keseluruhan | | | | | | 17.989 | |

Tabel 1.6 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran Melalui Kegiatan Kediklatan dan Bimbingan Teknis Tahun 2015-2019

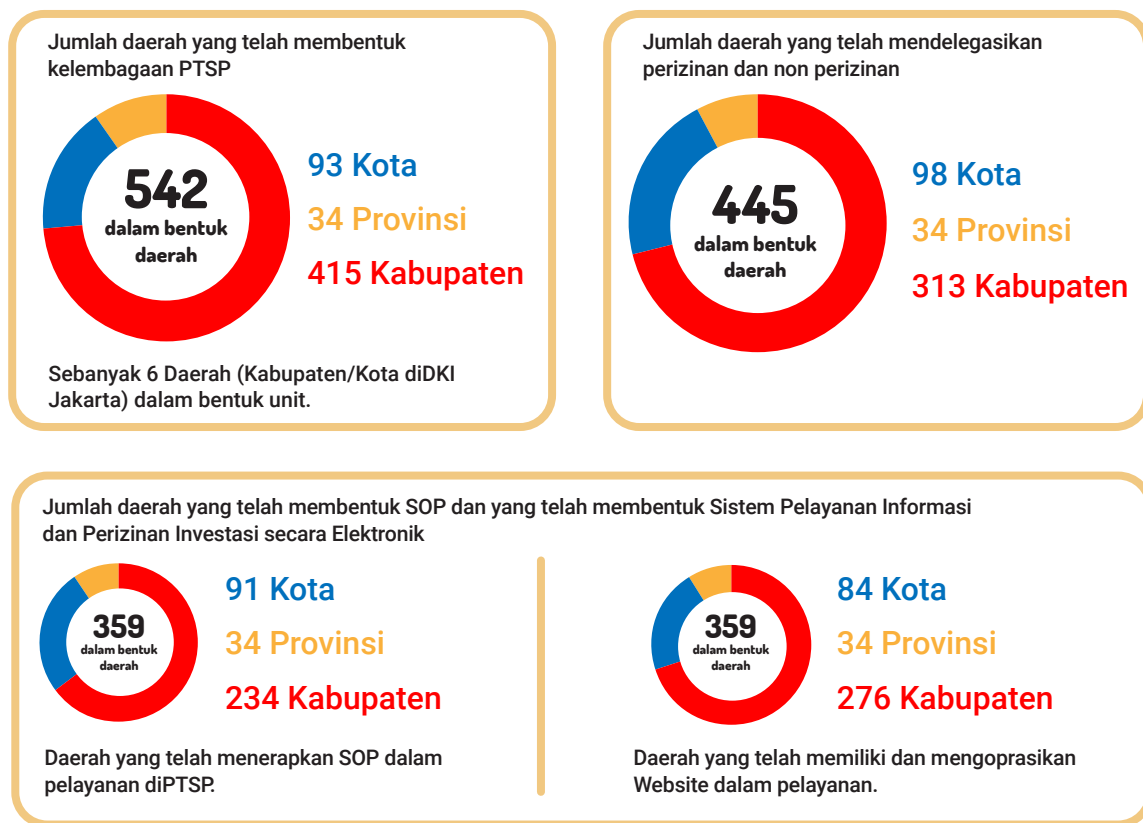
| Kegiatan | Jumlah | | | | | Jumlah |
|---|--------|------|------|------|------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 1 | - | 120 | 240 | - | - | 360 |
| Peningkatan kapasitas aparatur Pemadam 2 | 90 | 120 | - | - | - | 210 |
| Peningkatan kapasitas aparatur Inspektur | - | - | 60 | 100 | 50 | 160 |
| Peningkatan kapasitas aparatur Penyelamatan terhadap kejadian/ insiden lainnya | - | - | - | 80 | - | 80 |
| Peningkatan kapasitas aparatur melalui Dekonsentrasi Penguatan kapasitas Pengurangan resiko bencana dan bahaya kebakaran | 1.064 | 120 | - | - | - | 120 |
| Penyelenggaraan Skill Competition Petugas Pemadam Kebakaran dalam kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran | 300 | 300 | 300 | 250 | 150 | 1.300 |
| Peningkatan kapasitas bagi aparatur provinsi dalam pembentukan aparatur pemadam kebakaran Kab/Kota yang kompeten sesuai standar | - | - | - | 90 | - | 90 |

Dalam rangka dukungan pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, telah difasilitasi penyelenggaraan kesepakatan perundingan batas dan kerjasama wilayah negara antara lain: (a) Kesepakatan persidangan ke-15 KK/JKK Sekber Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek-Malindo), (b) Kesepakatan persidangan ke-37 KK/JKK Sosek-Malindo dan (c) Kesepakatan persidangan ke-43 *Joint Indonesia Malaysia (JIM)*. Selain itu juga telah dilaksanakan kerjasama *Joint Border Committee (JBC) RI-PNG*, kerjasama *Joint Border Committee (JBC) RI-RDTL*, serta terbangunnya 6 unit sarpras pemerintahan yaitu kantor desa dan balai pertemuan di 3 kabupaten perbatasan negara (Karimun, Sintang, dan Belu) tahun 2019, dan memfasilitasi pembangunan 109 unit sarana prasarana pemerintahan di daerah perbatasan antar Negara dan pulau-pulau kecil terluar.



Selanjutnya, dalam upaya memperkuat dan meningkatkan peran gubernur sebagai wakil pemerintah, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut mulai tahun 2020 dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam rangka peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi/Kabupaten/Kota, telah dibangun sistem aplikasi SIAP KERJA (e-Monev PTSP daerah) yang terintegrasi dengan sistem aplikasi siCANTIK Kemenkominfo. Dengan demikian, sampai saat ini terdapat 170 daerah kategori PTSP Prima, 27 daerah kategori PTSP Madya, 8 kategori PTSP Pratama, dan 301 daerah kategori PTSP Terapan. Selanjutnya sebagai pedoman penyelenggaraan PTSP Prima di daerah, telah disusun turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah. Untuk peningkatan pelayanan administrasi di tingkat kecamatan telah difasilitasi penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di 371 Kabupaten/Kota (Gambar 1.8 dan Gambar 1.9).



Gambar 1.8 Penerapan PTSP dan PATEN di daerah yang membentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

368 Daerah Menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)



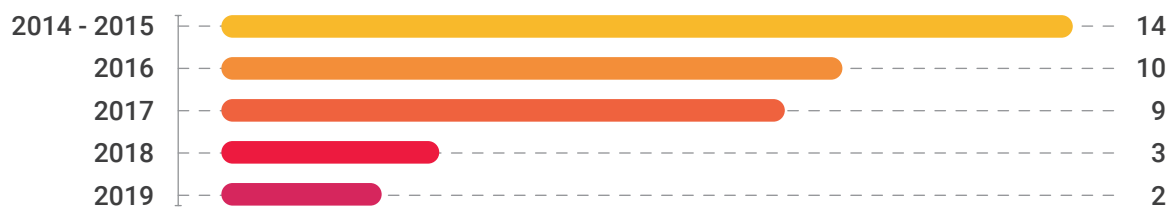
Gambar 1.9 Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Selanjutnya dalam rangka mendorong keserasian pembangunan antar daerah, beberapa hal yang telah dicapai antara lain: (a) terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah melalui forum Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) sejak tahun 2015, (b) diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, (c) telah terintegrasinya perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di 29 provinsi, 196 kabupaten, dan 47 kota, dan (d) terwujudnya integrasi sistem informasi pembangunan daerah dengan sistem informasi Krisna 3.0 Bappenas, BPS, Gistaru dan Jagakpk.id.

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan 1 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), telah dilakukan penyederhanaan 33 perizinan menjadi 11 izin dan percepatan waktu perizinan dari 981 hari kerja menjadi 44 hari kerja. Dalam hal fasilitasi penanganan lahan kritis selama kurun waktu 2014-2018, telah dilaksanakan penanaman tanaman baru dan pemeliharaan tanaman pokok dengan capaian luasan sekitar 2.639,6 ha di 49 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi dengan pemberdayaan kelompok tani sebanyak 340 kelompok dan 8.418 anggota, termasuk fasilitasi pengelolaan budi daya tanaman sela di lahan tersebut sebagai penunjang pendapatan bagi anggota kelompok tani. Untuk mendorong pelaksanaan program pembangunan pusat dan daerah yang terintegrasi, komprehensif dan kolaboratif, capaian yang telah dihasilkan Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut: (a) menginisiasi kerjasama pelaksanaan Program Kampung Sejahtera dengan melibatkan 14 Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) setempat serta beberapa perusahaan swasta di Desa Kohod, Tangerang, Banten, (b) bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk mendorong penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, (c) membentuk Tim Pengendali Inflasi di Daerah (TPID) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 9 Provinsi dan 54 Kabupaten/Kota serta Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis di 2 Provinsi dan 22 Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota, (d) melaksanakan percepatan integrasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan dokumen perencanaan daerah pada 9 Provinsi *pilot project* yang selanjutnya akan ditindak lanjuti integrasi *e-planning* dengan *e-budgeting* untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, (e) memfasilitasi penetapan dan pengundangan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di 23 Provinsi, (f) memfasilitasi penguatan kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota dalam implementasi 8 Aksi *Konvergensi Prevalensi Stunting* ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai upaya pencegahan dan penurunan *prevalensi stunting* terintegrasi, (g) menetapkan Pedoman Aksi *Konvergensi Prevalensi Stunting* bersama Kementerian/Lembaga teknis dan pedoman penilaian kinerja 8 Aksi *Konvergensi* dimaksud yang di *publish* di *Website*, (h) terbentuknya Tim Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di 17 provinsi dan 47 kabupaten, dan 11 kota, (i) Integrasi indikator SPM Dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah di 34 Provinsi, (j) Fasilitasi percepatan penerapan SPM bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman, sosial, kesehatan, trantibumlinmas dan Pendidikan di 34 provinsi, (k) Tersedianya aplikasi Sistem pelaporan SPM yang terintegrasi, (l) Monitoring dan evaluasi penerapan SPM secara terpadu, (m) serta fasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) pada 396 Kabupaten pelaksana Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas).

5. Bidang Pemerintahan Desa

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan capaian antara lain: (a) diterbitkan 38 regulasi berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Kerjasama Desa, serta Evaluasi Perkembangan Desa, (b) terimplementasinya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara *online* di 69.875 desa di 434 Kabupaten/Kota serta 6.597 desa diantaranya telah menggunakan Aplikasi Siskeudes secara *online*, (c) terfasilitasinya penerapan Sistem Pengelolaan Aset Desa di 10.316 desa (14%) dari total jumlah desa, dan (d) terintegrasinya data informasi 54.658 desa/kelurahan atau 65,50% melalui data *website* Profil Desa dan Kelurahan (Aplikasi Prodeskel) yang terpublikasi secara *online*. Rincian capaian perkembangan jumlah regulasi pengaturan Tatakelola Pemerintahan Desa dari Tahun 2015-2019 disajikan pada Gambar 1.10.



Gambar 1.10 Perkembangan Jumlah Regulasi Pengaturan Tata Kelola Pemerintahan Desa 2015-2019



Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa telah dicapai hasil-hasil sebagai berikut: (a) Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) bagi Pelatih Tingkat Nasional (ToMT) Aparatur Pusat dan Provinsi sebagai Master Trainer sebanyak 597 orang, (b) Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) bagi Pelatih Tingkat Kabupaten (ToT) Aparatur Kabupaten/Kota sebagai pelatih sebanyak 3.699 orang, (c) Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) bagi Pelatih Tingkat Nasional (ToMT) Aparatur Pusat dan Provinsi sebagai Master Trainer sebanyak 409 orang, (d) Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) bagi Pelatih Tingkat Kabupaten (ToT) Aparatur Kabupaten/Kota sebagai pelatih sebanyak 801 orang, (e) Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dengan jumlah aparatur yang telah dilatih sebanyak 4.122 Aparatur Kecamatan, (f) Pelatihan (e) Pelatihan Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) dengan jumlah aparatur yang telah dilatih sebanyak 4.122 Aparatur Kecamatan, (f) Pelatihan aparatur desa, sebanyak 147.325 Aparatur pada tahun 2015, yang terdiri dari 48.144 Kepala Desa, 44.233 Sekretaris Desa, 43.214 Bendahara Desa, 2.942 Aparat Desa Lain dan 54 Pj. Kepala Desa serta 8.738 Aparatur Kecamatan.

Pada tahun 2016 sebanyak 1.627 aparatur telah dilatih melalui kegiatan pelatihan PKAD, (g) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pusat Dan Daerah Tahun 2018 melalui Rapat Koordinasi Nasional sebanyak 7.000 orang yang terdiri dari: 3.000 orang dari Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Para Camat dan Kepala Desa terpilih, 2.000 orang dari BPD terpilih, dan 2.000 orang dari Pendamping Desa yang berkolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya pada tahun 2019 sebanyak 3.500 orang yang terdiri dari: 3.300 orang dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, Para Camat dan Kepala Desa terpilih dan 300 orang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih. Rincian capaian pengembangan kapasitas aparatur Desa Tahun 2015-2019. disajikan pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7 Capaian Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Tahun 2015 - 2019

| JENIS PELATIHAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | CAPAIAN | CAPAIAN | CAPAIAN | CAPAIAN | CAPAIAN |
| ToMT PAD | 265 org | 195 org | - | 137 org | - |
| ToT PAD | 1.733 org | 1.966 org | - | - | - |
| Pelatihan bagi PAD | 147.325 org | 1.627 org | - | - | - |
| ToMT PTPD | - | - | 120 org | 148 org | 141 org |
| ToT PTPD | - | - | 399 org | 402 org | - |
| Pelatihan bagi PTPD | - | - | 1.702 org | 1.101 org | 1.319 org |
| Pelatihan Metodologi Pelatihan | - | - | - | 170 org | 95 org |
| Pelatihan Uji Coba Modul BPD | - | - | - | - | 167 org |
| Pelatihan bagi Pengurus LKD/Kel | 1.740 org | 1.594 org | 327 org | 3.323 org | 2.701 org |
| Pelatihan bagi Aparat Desa/Kel | 1.080 org | 1.234 org | 1.482 org | 1.462 org | 207 org |

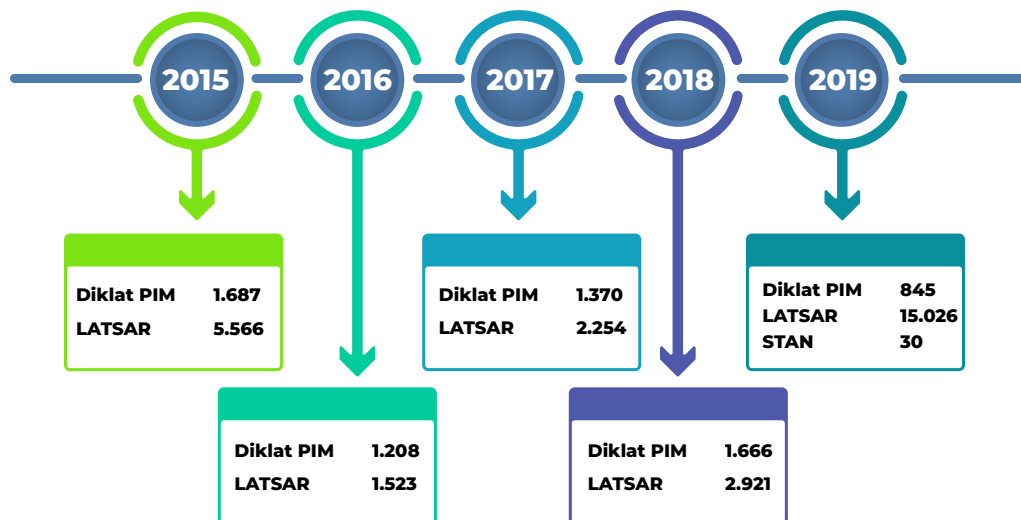


6. Bidang Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan

Dalam rangka meningkatkan pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, telah dicapai hasil antara lain: (a) tersusunnya 57 standar kompetensi bagi Pejabat Struktural lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dalam rangka mendorong pejabat memiliki kompetensi yang sepadan dengan standar kompetensi jabatannya, (b) telah difasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi 12.973 orang Pol-PP dan 304 Camat, (c) telah dibentuk Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Dalam Negeri (LSPDN) di BPSDM Kementerian Dalam Negeri, dan di 34 BPSDM Provinsi, (d) telah difasilitasi penyelenggaraan diklat manajemen pemerintahan, diklat manajemen pembangunan daerah, dan diklat manajemen kependudukan yang merupakan diklat teknis substantif Kementerian Dalam Negeri dengan jumlah alumni dalam lima tahun sebanyak 32.036 orang aparatur, (e) telah dilakukan diklat camat dengan jumlah alumni 782 camat, (g) Diklat Fungsional PPUPD dengan jumlah alumni 2920 orang aparatur, (h) Diklat Kepemimpinan (PIM), Pelatihan Dasar (LATSAR) dan Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri sebanyak 34.406 alumni, (i) penetapan BPSDM Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat pengembangan revolusi mental bagi ASN pemerintahan dalam negeri, (j) terselenggaranya Diklat Kompetensi Aparatur Pelopor Revolusi Mental (APRM), Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM), Praja Pelopor Revolusi Mental (PPRM) sebanyak 1.373 Alumni pada tahun 2019, sehingga secara keseluruhan telah dilakukan Diklat Kompetensi APRM, KPRM dan PPRM sebanyak 16.605 Alumni. Rincian capaian pelaksanaan uji kompetensi Aparatur Pol-PP dan Camat disajikan pada Gambar 1.11, sedangkan Rincian capaian pelaksanaan Diklat Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar disajikan pada Gambar 1.12.



Gambar 1.11 Capaian Pelaksanaan Uji Kompetensi Aparatur Pol-PP dan Camat



Gambar 1.12 Capaian Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan dan Pelatihan Dasar

Selanjutnya, sebagai upaya untuk akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung reformasi birokrasi, telah dicapai hasil antara lain: Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri telah berbasis akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; mempertahankan penilaian atas hasil pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri selama kurun waktu 5 Tahun berturut-turut sejak tahun 2015 s.d. 2019 dengan mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan capaian Opini WTP; Peringkat 1 (satu) penyerapan anggaran Pinjaman Luar Negeri (PLN) tertinggi dari 17 Kementerian/Lembaga yang mempunyai alokasi PLN tahun 2018; dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Dalam Negeri, dengan hasil penilaian 70,65% kategori nilai BB.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu, beberapa hasil yang telah dicapai adalah: (a) telah diterapkan 27 layanan administrasi dan 1 layanan konsultasi secara online dengan menggunakan aplikasi SiOLA (Sistem Informasi Online Layanan Administrasi), (b) tersediannya sarana pengaduan Kementerian Dalam Negeri berbasis elektronik melalui website: sapa.kemendagri.go.id, (c) penyelesaian sengketa hukum berupa penanganan penyelesaian sengketa hukum terhadap 781 perkara (baik dengan status tergugat maupun termohon), dengan rincian: Pengadilan Negeri sebanyak 207 Perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara sebanyak 189 Perkara, Mahkamah Agung sebanyak 55 Perkara, dan Mahkamah Konstitusi sebanyak 330 Perkara. Dari total 781 perkara tersebut, telah mendapatkan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht*) serta final dan mengikat sebanyak 286 dan sisanya sebanyak 495 masih dalam proses.

Untuk harmonisasi perundang-undangan pusat/daerah telah dicapai hasil sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 berupa penyelesaian 599 Produk Hukum (Prosundagri dan non Prosundagri) dengan rincian: pada tahun 2015 sebanyak 85 Produk Hukum, pada tahun 2016 sebanyak 113 Produk Hukum, pada tahun 2017 sebanyak 144 Produk Hukum, pada tahun 2018 sebanyak 136 Produk Hukum, dan pada tahun 2019 sebanyak 121 Produk Hukum. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, telah dicapai hasil antara lain: (a) peningkatan kapabilitas APIP pada level 3 dari skor level 1-5 sesuai kriteria penilaian nasional; peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada level 3, (b) pembangunan zona integritas percontohan di 12 Unit Kerja Eselon II pada 12 Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri; pembentukan unit gratifikasi yang berkedudukan di Inspektorat Jenderal, (c) terbangunnya aplikasi whistleblowing system; dan terlaksananya pelaporan LHKPN dan LHKASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; serta perbaikan pola seleksi calon praja IPDN.



Sebagai dampak dari seluruh kinerja Kementerian Dalam Negeri dari Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diuraikan di atas, Kementerian Dalam Negeri telah memperoleh penghargaan atas prestasi kinerja tersebut, yaitu:

1 PENGHARGAAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN CAPAIAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP)



Kementerian Dalam Negeri selama 5 Tahun berturut-turut sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 mendapat penghargaan atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan dengan Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2 PENGHARGAAN ANUGRAH PARAHITA EKAPRAYA (APE)

Dalam konteks penguatan birokrasi pemerintahan, Kementerian Dalam Negeri turut berperan sebagai *driver* dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) No.017/MPP-PA/D.I/09/2016.

Pemberian Anugerah Pharahita Ekapraya juga menunjukkan bahwa strategi pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak dapat diimplementasikan di masyarakat. Atas komitmen dan prestasi Kementerian Dalam Negeri mendapatkan 5 kali penghargaan Anugerah Pharahita Ekapraya kategori Tingkat Utama, yaitu tahun 2011, 2013, 2014, 2016, dan 2018.



3 PENGHARGAAN K/L BERKINERJA TERBAIK DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN TAHUN 2018



Peringkat 3 (tiga) K/L berkinerja terbaik pengelolaan anggaran tahun 2018 dalam kategori pagu sedang (Rp.2,5 Trilyun s.d. Rp.10 Trilyun);



4 PENGHARGAAN TOP 45 INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

Penghargaan top 45 inovasi pelayanan publik tahun 2019 yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla atas inovasi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SUPERTAJAM), yang memberikan solusi agar masyarakat mendapat kemudahan mengurus akta kelahiran.



5 PENGHARGAAN TOP 30 INSTANSI PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN TERBAIK



Pada kompetisi SP4N-lapor! tahun 2019 yang diikuti oleh 312 instansi K/L.

6 KEMENDAGRI RAIH PENGHARGAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



Dalam rangka meningkatnya keterbukaan informasi publik, Kementerian Dalam Negeri memperoleh penghargaan dari KIP dalam kategori badan publik Kementerian Kualifikasi Informatif.



7 PENGHARGAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Penghargaan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2019 mendapat nilai "Sangat Baik" (A-):4,06.



8 DITJEN DUKCAPIL KEMENDAGRI JUARAI LOMBA MAP GALLERY INTERNATIONAL



Peringkat pertama lomba Map Gallery International (Data Kependudukan) yang diperoleh dari Environmental Systems Research Institute (ESRI) Geographic International information (GIS) tahun 2019.

9 SERTIFIKAT ISO 9001:2015:

Atas Sistem Manajemen Mutu pada Layanan Administrasi dan Konsultasi *Online*.





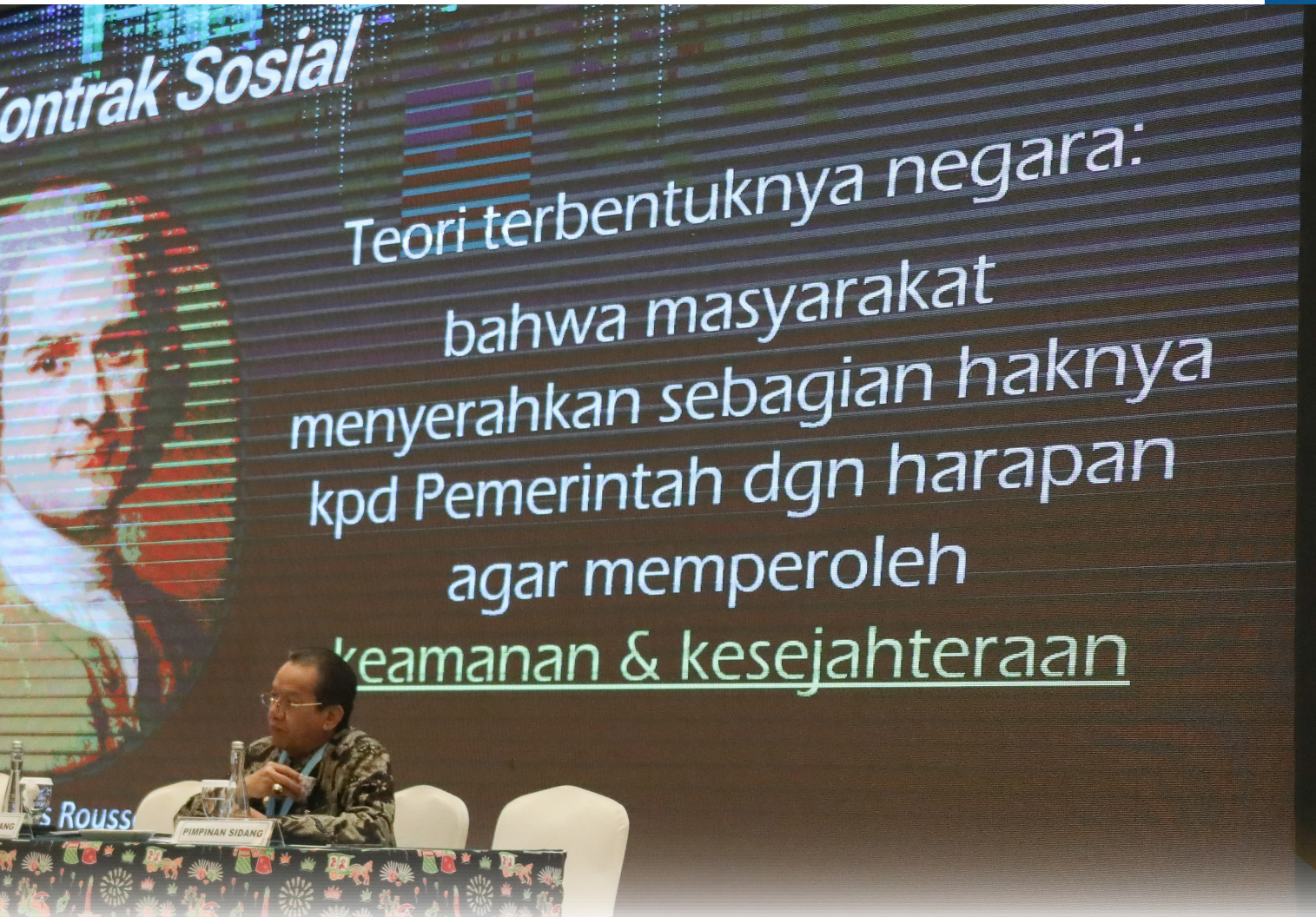
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Kementerian Dalam Negeri tentunya bukan tidak ada permasalahan. Namun permasalahan tersebut akan dapat dijadikan sebagai suatu tantangan yang akan dapat menjadi peluang untuk peningkatan kinerja yang lebih baik Kementerian Dalam Negeri lima tahun ke depan, sehingga dapat mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden lima tahun kedepan.

1.2.1 POTENSI/TANTANGAN

Kementerian Dalam Negeri sejalan dengan kedudukannya sebagai Kementerian yang tersurat dan tersirat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam jangka lima tahun ke depan mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi salah satu unsur pendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam negeri baik di internal maupun dilingkungan eksternal Kementerian Dalam Negeri, antara lain:

1. Sistem politik Indonesia mengalami proses demokratisasi dan makin mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia yang akan memberikan ruang semakin luas bagi perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, yang diantaranya ditandai dengan peningkatan nilai Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2018 dalam kategori sedang, keberadaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang mengalami pertumbuhan cukup tinggi terutama pada tahun 2018 dan 2019, dan adanya kenaikan bantuan keuangan partai politik.



2. Pembangunan infrastruktur yang selama lima tahun (2015-2019) cukup masif telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang diikuti dengan berkurangnya angka kemiskinan dan pemenuhan lapangan kerja untuk masyarakat, serta meningkatkannya pemerintah daerah yang kreatif dan inovatif sejalan dengan digitalisasi *government system* diharapkan dapat menjadi modal dasar dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. Dengan berlangsungnya kebijakan moratorium atas pemekaran daerah menjadikan upaya penataan daerah menjadi lebih efektif, pelaksanaan demokrasi dan politik lokal yang sehat melalui peningkatan sistem pelaksanaan pilkada serta penguatan pelaksanaan desentralisasi asimetris telah memberikan ruang untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang desentralistik.
4. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, telah diinisiasi berbagai kegiatan dan forum sinkronisasi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, untuk mewujudkan keselarasan perencanaan dan pembangunan pusat dengan daerah yang didukung dengan pendanaannya secara akuntabel, daerah terus didorong untuk menyediakan data dan informasi pembangunan daerah melalui pengintegrasian perencanaan (*e-planning*) dan penganggaran (*e-budgeting*).
5. Peningkatan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah terutama dengan adanya *political will* pendanaan pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP melalui APBN sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, berpotensi untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan kewilayahan yang baik di daerah.

6. Adanya solusi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dengan fasilitasi Kementerian Dalam Negeri, telah menjadi modal utama dalam mengoptimalkan peran dan wewenang Kementerian Dalam Negeri dalam bersinergi dengan Kementerian/Lembaga dan memposisikan Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi strategis.
7. Penguatan peran, tugas dan wewenang Kementerian Dalam Negeri dalam mengawal pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang merupakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, dan dalam pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimum yang mengharuskan daerah mengimplementasikan penganggaran seluruh SPM termasuk *transit*-linmas dalam APBD.
8. Alokasi Dana Desa melalui APBN yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, tentunya akan dapat optimal pemanfaatannya apabila didukung dengan efektivitas kelembagaan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa serta aparatur yang berkompeten dalam mengelola aset-aset desanya.
9. Telah terbangunnya *database* kependudukan yang akurat dan terpercaya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, dan meningkatnya cakupan pemenuhan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), dan Akta Catatan Sipil yang merupakan salah satu persyaratan pelayanan publik. Selain itu, layanan dokumen kependudukan hingga saat ini telah menunjukkan progress yang membanggakan, diantaranya cakupan akta kelahiran Nasional sudah mencapai 90,53% dan perekaman KTP elektronik sudah mencapai 98,78%.
10. Kementerian Dalam Negeri terus mengupayakan peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat terbangun proses tata kelola yang akuntabel, efektif dan efisien. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas manajemen ASN, efektivitas tata laksana, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri melalui penguatan peran Inspektorat Jenderal sebagai institusi APIP dalam rangka pembinaan dan pengawasan akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri.
11. Dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing daerah, Kementerian Dalam Negeri mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penerbitan regulasi/kebijakan, fasilitasi dan pembinaan, evaluasi dan penilaian, pemberian penghargaan, serta penguatan SDM terkait penyelenggaraan inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.
12. Kebutuhan pengembangan kompetensi bagi aparatur pemerintahan dalam negeri memang menjadi hal yang penting untuk dilakukan, karena aparatur pemerintahan dalam negeri perlu disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada. Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) telah ditetapkan visi pembangunan 2005-2025, yaitu "Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur". Pentahapan pembangunan tersebut terbagi menjadi 4 tahap yang tertuang dalam RPJMN 1 (2005-2009), RPJMN 2 (2010-2014), RPJMN 3 (2015-2019) dan RPJMN 4 (2020-2025). Saat ini, sudah berada pada tahap RPJMN 4 dengan sasaran memantapkan pembangunan secara merata dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK.

13. Tuntutan kebutuhan kader pimpinan birokrasi pemerintahan di daerah menjadi peluang yang cukup besar dari penyelenggaraan sistem pendidikan kepomongprajaan di IPDN, yang menitikberatkan pada integrasi nilai-nilai revolusi mental dalam sistem tri tunggal terpadu pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan, peningkatan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan IPDN, serta reformasi kelembagaan dan peningkatan jejaring eksternal yang lebih luas.
14. Tuntutan cepatnya dinamika perkembangan dalam dunia teknologi informasi dan terjadinya sebuah pandemi global *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) di akhir tahun 2019 membuat diperlukannya sebuah penyesuaian dalam pemanfaatan dan implementasi kebijakan teknologi informasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dapat menjadi sebuah peluang untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang berbasis teknologi informasi melalui pembangunan dan pengembangan basis data, sistem informasi, dan infrastruktur TIK yang berorientasi kepada integrasi (baik lingkup internal Kementerian Dalam Negeri, antar Kementerian/Lembaga, dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah), kemudahan berkomunikasi, dan percepatan proses birokrasi sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat secara langsung dirasakan dalam segala aspek tata kelola pemerintahan serta kehidupan masyarakat pada umumnya.
15. Adanya pembangunan *system* merit di lingkungan Kementerian Dalam Negeri merupakan hal yang penting dalam rangka mempersiapkan aparatur Kementerian Dalam Negeri yang profesional dengan memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, kompetensi yang dibutuhkan melalui manajemen talenta, dan berkinerja baik dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif.
16. Rencana pemindahan Ibukota Negara yang akan berimplikasi pada pengembangan kawasan ekonomi baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada daerah-daerah penunjang di sekitar daerah ibukota negara baru.
17. Keberadaan DKPP berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum merupakan satu-satunya lembaga negara yang menangani penegakan kode etik penyelenggara pemilu dan telah diterima serta mendapatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka mendapatkan keadilan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu untuk mewujudkan pelaksanaan Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.



1.2.2 ISU STRATEGIS

Memperhatikan capaian kinerja Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, dan potensi/ peluang Kementerian Dalam Negeri 5 (lima) tahun ke depan, diidentifikasi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Stabilitas politik dalam negeri.

- a. Berdasarkan evaluasi IDI tahun 2018 (untuk tahun 2019 tidak dilakukan masih dalam proses penilaian), terdapat peningkatan nilai skor IDI provinsi-provinsi dalam kelompok provinsi dengan nilai skor IDI "kategori sedang". Disamping itu, dari tiga aspek IDI (kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi) yang dilakukan pengukuran, hanya aspek lembaga demokrasi



- yang mengalami peningkatan, sehingga perlu dilakukan upaya lebih dalam meningkatkan nilai ketiga aspek tersebut untuk mencapai peningkatan nilai IDI secara keseluruhan. Belum optimalnya pembinaan organisasi kemasyarakatan, terutama untuk penguatan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan, revolusi mental, kewaspadaan nasional, penanganan konflik dan pendidikan politik dalam negeri. Mahalnya biaya politik untuk mendanai kegiatan Partai Politik dan Pemilu/Pilkada, menuntut adanya kenaikan kembali bantuan keuangan Partai Politik, selain itu masih kurangnya juga upaya peningkatan kapasitas Partai Politik dalam berbagai bentuk kegiatan yang lebih menjamin kemandirian Partai Politik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi, nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum.
- b. Dalam upaya peningkatan kualitas demokrasi, nilai demokrasi yang diidentikkan dengan nilai kebebasan menentukan pilihan, pada kenyataannya hanya berkembang dalam ritual dan seremonial di sebagian besar kalangan untuk hadir memberikan suara pada saat pemilihan umum.
- c. Minimnya pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila, ancaman radikalisme dan komunisme, maupun penolakan terhadap Pancasila terhadap ideologi negara perlu ditindaklanjuti dengan upaya yang serius dan strategis melalui pembumih nilai-nilai Pancasila.
- d. Melemahnya ketahanan ekonomi sosial dan budaya akibat pesatnya pertumbuhan perekonomian dan industri menimbulkan kesenjangan dalam masyarakat dan memicu terjadinya potensi konflik sosial, terjadi perubahan sosial dalam masyarakat yang mengesampingkan toleransi dan gotong royong sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dalam mengembangkan usaha mendukung ekonomi mereka dan persoalan pembangunan rumah ibadah yang memicu bentrokan antar pihak di daerah serta budaya asli Indonesia semakin luntur disebabkan maraknya budaya asing yang masuk ke Indonesia.

- e. Globalisasi saat ini membawa banyak dampak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu perlu kewaspadaan nasional tentang pengaruh globalisasi baik pengaruh internal maupun eksternal. Dimana saat ini mulai masuknya para peneliti asing yang melakukan penelitian di dalam negeri.
- f. Urgensi Peningkatan kewaspadaan nasional dan daerah dianggap perlu terhadap permasalahan yang sensitif dan prinsip yang dapat mengganggu stabilitas nasional di daerah, di antaranya yang bersifat ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dapat dilakukan langkah-langkah preventif melalui cegah dini dan deteksi dini, belum lagi potensi timbulnya konflik sosial di tengah masyarakat
- g. Penyelenggaraan Trantibumlinmas
 - 1) Belum optimalnya manajemen mitigasi dan tanggap bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi kedalam dokumen perencanaan dan anggaran.
 - 2) Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah.
 - 3) Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah.
 - 4) Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkara oleh Satpol PP.
 - 5) Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas.



- 6) Penerapan SPM sub urusan bencana, sub urusan pemadam kebakaran dan sub urusan trantibumlinmas masih berada pada titik awal dan perlu pengawalan dalam penyelenggaraannya terutama untuk manajemen bencana yang tepat fungsi dan terintegrasi baik antar instansi pusat dan antar instansi di daerah yang menyelenggarakan fungsi bencana, standardisasi dan kompetensi SDM pengelola urusan trantibumlinmas, standardisasi sarana dan prasarana trantibumlinmas, serta tuntutan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas terutama untuk pencegahan kebakaran melalui pelibatan masyarakat dan relawan kebakaran, mengefektifkan penegakan Perda dan Perkada dalam peningkatan ketertiban masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah.

2. SDM aparatur pemerintahan dalam negeri

- a. Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan fungsional baik binaan Kementerian Dalam Negeri (misalnya PPUPD, Pemadam Kebakaran dan Polisi Pamong Praja) maupun K/L (misalnya, perencana, Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM termasuk jabatan fungsional (misalnya, perencana, pustakawan, arsiparis, pranata komputer, dan lain-lain) pada pemerintahan dalam negeri yang sesuai dengan standar kompetensi diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi (misalnya, peneliti, perekayasa, analis kebijakan, legal drafter, pengadaan barang dan jasa, dan lain-lain).
- b. Belum sinkronnya penyelenggaraan kediklatan bagi aparatur pemerintahan dalam negeri dengan pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh unit organisasi baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupu di pemerintahan daerah.
- c. Perkembangan dan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi sebagai instrumen utama dinamika sosial yang sangat cepat menuntut BPSDM Kemendagri dan IPDN untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi secara maksimal yang diarahkan untuk mewujudkan BPSDM Kemendagri sebagai learning organization di bidang standarisasi, sertifikasi, dan pengembangan SDM Aparatur, sedangkan IPDN sebagai smart campus, diharapkan dapat merubah pola pendidikan di IPDN secara modern sejalan dengan dinamika masyarakat sehingga mampu bersaing antar perguruan tinggi di tingkat regional dan global.
- d. Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral sebagai salah satu prasyarat untuk dapat mewujudkan birokrasi yang berkinerja tinggi. Untuk itu diperlukan penguatan manajemen ASN yang profesional berbasis sistem merit. Hal ini disebabkan masih lemahnya manajemen ASN di instansi pemerintah khususnya pada pembinaan karier dan manajemen kinerja.





3. Tata kelola pemerintahan daerah dan desa

a. Penataan daerah dan desentralisasi asimetris

- 1) Eskalasi tuntutan pembentukan daerah otonom baru.
- 2) Penguatan desentralisasi asimetris, dimana perlu adanya antisipasi dengan akan berakhirnya dana otsus papua pada tahun 2021.
- 3) Adanya resistensi terhadap upaya penyederhanaan kelembagaan pada perangkat daerah (besaran perangkat, daerah yang mengembangkan budaya organisasi, perangkat daerah yang mengembangkan inovasi daerah, serta ketepatan perumpunan).
- 4) Masih adanya daerah induk yang belum menyelesaikan kewajiban terkait aset, hibah/bantuan keuangan, dan penegasan batas.
- 5) Perbedaan persepsi dalam penerapan prinsip desentralisasi asimetris antara pemerintah dengan pemerintah daerah sebagai daerah penerima otonomi khusus dan istimewa, diantaranya isu Partai Politik lokal di Papua, penggunaan bendera di Aceh serta penyelesaian pengelolaan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Pembentukan produk hukum daerah

Masih banyaknya peraturan daerah yang belum sinergi dengan kebijakan nasional.

c. Penyelarasan pembangunan pusat dan daerah

- 1) Belum optimalnya penerapan SPM di daerah serta pengintegrasian indikator SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- 2) Belum meluasnya cakupan daerah yang menerapkan/mengintegrasikan Sistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD) *e-planning* yang terintegrasi dengan penganggaran (*e-budgeting*).
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan urusan pemerintahan.
- 4) Masih rendahnya inisiatif inovasi daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

- 5) Walaupun Gini Rasio menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun ke tahun, namun masih tetap perlu diwaspadai adanya ketimpangan antar kawasan kota dan pedesaan, dimana di kawasan perkotaan pada tahun 2018 tercatat ketimpangan sebesar 16,47% (kategori sedang) dan pedesaan sebesar 20,15% (kategori rendah). Disamping itu, belum optimalnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyediaan infrastruktur yang dikhawatirkan dapat meningkatkan ketimpangan sosial dan potensi konflik. Selanjutnya, adanya kemajuan teknologi informasi tidak didukung dengan penguatan pengawasan dan proteksi pemanfaatannya, sehingga kemajuan teknologi informasi banyak disalahgunakan untuk menyebarkan isu yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta menurunkan kualitas pelayanan publik.
- 6) Belum terintegrasinya perencanaan (*e-planning*) dan penganggaran (*e-budgeting*) di seluruh daerah (masih 42% daerah belum menyusun perencanaan berbasis elektronik) dengan Pusat, sehingga menjadi kendala yang cukup krusial dalam upaya mewujudkan keselarasan perencanaan dan pembangunan pusat dengan daerah yang didukung dengan pendanaannya secara akuntabel. Selain itu, pelaksanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya sinergi dengan perencanaan pembangunan pusat, sehingga terjadi ketidakharmonisan kebijakan antara pusat dan daerah.
- 7) Belum optimalnya sinergitas kebijakan dan program antara Kementerian/ Lembaga dengan Kementerian Dalam Negeri menyebabkan masih adanya tumpang tindih pelaksanaan kebijakan dan program antar Kementerian/Lembaga sehingga berdampak pada kebingungan di daerah dalam mempedomani suatu kebijakan tertentu. Selain itu, kurang optimalnya konsep kerjasama pembinaan dan pengawasan oleh Kementerian/Lembaga baik internal maupun eksternal pemerintah dalam rangka kolaborasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pembinaan dan pengawasan.





d. Penguatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

- 1) Belum maksimalnya penguatan fungsi/kinerja gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dalam hal ini pemberian anggaran dekonstrasi dan tugas pembantuan dari Kementerian/Lembaga kepada pemerintah daerah yang belum efektif dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah dan peningkatan sinergitas hubungan pusat daerah, dukungan keuangan APBN dalam pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah sehingga masih ada tugas dan kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan pemerintah provinsi menggunakan dana APBD.
- 2) Belum optimalnya proses pengadministrasian wilayah administrasi pemerintahan dan kawasan di daerah.
- 3) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perkotaan sesuai standar pelayanan perkotaan (SPP).
- 4) Belum terselesaikannya permasalahan segmen batas wilayah negara.
- 5) Belum optimalnya kinerja PTSP prov/Kabupaten/Kota dalam mendukung kemudahan berusaha di daerah.
- 6) Belum optimalnya peran Kecamatan sebagai perangkat daerah yang bersifat kewilayahan termasuk dalam pembinaan Desa dan Kelurahan serta pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di Kecamatan, yang antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya pendelegasian kewenangan kepada Camat dan kurangnya pengalokasian dana kecamatan dalam mendukung peran Camat di daerah serta belum terbangunnya sistem informasi pelayanan publik di kecamatan yang terintegrasi di seluruh Indonesia.
- 7) Belum maksimalnya peran kerjasama daerah sebagai instrumen penyelesaian disparitas wilayah, pengembangan ekonomi kawasan, pengelolaan lingkungan, manajemen konflik antar daerah dan ego kedaerahan.
- 8) Belum optimalnya kebijakan perencanaan nasional yang berbasis money follow program sehingga belum maksimal dalam mengakomodir pelaksanaan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dari sisi penganggaran. APBN yang tersedia masih sangat terbatas

untuk mendanai tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Kementerian/Lembaga belum sepenuhnya mendelegasikan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan urusannya di Kabupaten/Kota kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Perlu membangun pemahaman yang sama bahwa Kementerian/Lembaga dapat menugaskan Gubernur untuk mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tugas Kementerian/Lembaga. Konflik kepentingan terjadi pada saat Gubernur sebagai kepala daerah otonom memiliki kepentingan yang berbeda dengan Kementerian/Lembaga (pemerintah pusat). Belum maksimalnya peran sekretariat Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat dalam membantu Gubernur menjalankan tugas dan wewenangnya. dimana fungsi tersebut dijalankan oleh perangkat daerah yang memiliki tugas bersesuaian dengan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan juga belum dilengkapi dengan pejabat fungsional PPUPD yang secara khusus membantu tugas-tugas tersebut.

e. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- 1) Masih rendahnya efektifitas kelembagaan yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 2) Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam mengelola pemerintahan desa.
- 3) Masih rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pemerintah desa kepada masyarakat.
- 4) Masih kurangnya akses masyarakat terhadap berbagai informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 5) Masih lemahnya koordinasi antar Kementerian/Lembaga dipusat serta pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembinaan desa.
- 6) Belum optimalnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset desa.
- 7) Masih rendahnya jumlah desa dengan klasifikasi Desa Swasembada.





f. Pengelolaan Keuangan Daerah

- 1) Belum maksimalnya digitalisasi pengelolaan keuangan daerah baik aspek pendapatan maupun aspek belanja.
- 2) Masih kurangnya SDM pengelola keuangan daerah yang tersertifikasi.
- 3) Masih adanya daerah yang penetapan APBD-nya belum tepat waktu.
- 4) Belum maksimalnya Pembangunan Infrastruktur Daerah melalui *Creative Finansing*, baik pinjaman daerah maupun obligasi daerah
- 5) Belum optimalnya pendapatan daerah memberikan kontribusi pada APBD.

g. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan daerah

Masih adanya keterbatasan jumlah APIP di pusat maupun di daerah dalam mengawal akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintahan dalam negeri.



h. Inovasi daerah

- 1) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dan berbagai elemen pemerintahan daerah dalam melakukan terobosan-terobosan guna perbaikan layanan pemerintahan dan percepatan pembangunan daerah, karena belum meratanya komitmen para pemangku kepentingan daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya inovasi guna mendorong perbaikan sistem tata kelola, pelayanan publik, dan bentuk-bentuk inovasi lainnya dalam menjalankan berbagai urusan pemerintahan daerah. Selain itu, pengaruh budaya kerja dan rutinitas menjadi salah satu kendala pemerintah daerah untuk berinovasi.



- 2) Masih minimnya pendidikan dan pelatihan teknis bagi Jabatan Fungsional Peneliti (JFP), seperti pelatihan metodologi, analisis data, penulisan karya tulis ilmiah, short course, konferensi nasional dan internasional, program magang di lembaga pengkajian/riset, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya peningkatan kapasitas JFP, baik di Kementerian Dalam Negeri maupun Pemerintah Daerah, sebagai unsur think tank dalam mendorong lahirnya berbagai inovasi.
- 3) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai guna penguatan inovasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menyebutkan bahwa “penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan meningkatkan, membangun, merawat dan/atau mengoperasikan laboratorium penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan”.

i. Pilkada Serentak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Indonesia melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak dalam 4 tahapan sebelum dilaksanakan Pilkada Serentak Nasional tahun 2024, yaitu Pilkada serentak tahun 2015, 2017, 2018, dan gelaran Pilkada Serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 ditengah kondisi pandemi *Covid-19*, sehingga dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Mengingat tahun 2021 hingga 2023 tidak dilaksanakan Pilkada Serentak, maka pengisian jabatan Kepala Daerah yang habis masa jabatannya pada tahun tersebut akan ditunjuk Penjabat Kepala Daerah. Hal ini dapat menjadi

DANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM KSI DINI MENDUKUNG SUKSES PILKADA S TAHUN 20



momen untuk mengevaluasi implementasi kebijakan Pilkada Serentak selama ini, agar pada tahun 2024 terselenggara Pilkada Serentak Nasional yang demokratis, lebih berkualitas, dan dapat menjaga stabilitas politik dalam negeri. Hal ini mengingat Pilkada Serentak akan dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu Nasional Tahun 2024.

j. Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat

Desentralisasi asimetris yang dikenal dengan sebutan otonomi khusus dan daerah istimewa merupakan pola relasi unik antara pemerintah pusat dan daerah, karena sebab-sebab khusus. Sebuah daerah istimewa/khusus menerima wewenang, lembaga, dan keuangan yang berbeda dengan daerah lain, salah satunya adalah otonomi khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat.



Tujuan dari adanya kebijakan khusus (otonomi khusus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat adalah untuk: (a) mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan provinsi lainnya di Indonesia, (b) meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, dan (c) memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua dalam kerangka NKRI. Sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Tahun 2021 merupakan tahun terakhir pemberian dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, dan untuk keberlanjutan Kebijakan Dana Otonomi Khusus tersebut (2% dari DAU Nasional sesuai Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001), pada tahun 2020 dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dengan memperbaiki skema, tata kelola, menu penggunaan dana otonomi khusus, serta penguatan asistensi dan pengawasan dari pemerintah pusat. Tantangan kedepan adalah bagaimana Kementerian Dalam Negeri dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola keuangan dana otonomi khusus, sehingga pemanfaatan dana otonomi khusus dapat tepat guna dan tepat sasaran untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua pada umumnya.

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19



k. Pandemi Covid-19.

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) yang cenderung meningkat telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang banyak, serta telah berimplikasi pada aspek sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kondisi ini tidak dapat diprediksi oleh siapapun kapan akan berakhir. Presiden RI pada pertemuan dengan Gubernur seluruh Indonesia di Istana Bogor tanggal 15 Juli 2020, telah menyatakan bahwa situasi dalam pandemi *Covid-19* merupakan situasi yang betul-betul luar biasa sulitnya, karena harus mengendalikan dua hal, yaitu ekonomi dan kesehatan. Kita tidak bisa lagi bekerja dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) normal, kita harus bekerja dengan SOP yang ada terobosannya. Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD 2020) menyatakan bahwa diperkirakan perekonomian dunia saat pandemi mengalami pertumbuhan negatif, seperti Perancis minus 17,2%, Inggris minus 15,4%, Jerman minus 11,2%, dan Amerika Serikat minus 9,7%. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah Daerah harus dapat mengantisipasinya, dan dapat mencari solusi yang efektif agar pandemi ini dapat ditangani dengan baik.

l. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas

dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional, dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik. Pemerintah melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara formal mengawal penerapan SPBE secara terpadu baik di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan keterhubungan SPBE antara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun demikian, Belum adanya pedoman yang mengatur tentang tata kelola pengelolaan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang mengakibatkan belum tersedianya data secara baik dan belum terintegrasinya sistem informasi yang ada di Kementerian Dalam Negeri, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Kementerian Dalam Negeri masih bersifat parsial dan belum terkoordinasi dengan baik, masih adanya kesenjangan antar standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki ASN sehingga berdampak pada optimalisasi kinerja ASN. Menyikapi adanya pandemi global *Covid-19* di akhir tahun 2019, kesiapan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri juga menjadi kebutuhan prioritas untuk melakukan terobosan dan inovasi dalam tata kelola pencapaian sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri secara keseluruhan. Di satu sisi, Indonesia dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia, mengalami lompatan besar dalam bidang Administrasi Kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan yang selama ini berupa 24 dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Kartu Identitas Anak, saat ini telah bertransformasi menjadi Big Data Kependudukan, yang di dalamnya memuat 267.289.750 jiwa penduduk Indonesia sudah tersusun lengkap datanya dengan Nomor Induk Kependudukan (by NIK), dengan nama (by name), dengan alamat (by address) dalam Big Data Kependudukan.



Bagi penduduk yang sudah berumur 17 tahun lebih dan sudah membuat KTP elektronik maka data kependudukannya dipastikan sudah tunggal karena sudah terverifikasi melalui NIK, sidik jari dan iris mata, sehingga mendorong terwujudnya berbagai pelayanan digital yang memudahkan proses verifikasi dan validasi data by name, by address. Akhirnya, dengan telah terbangunnya Big Data Kependudukan, Indonesia menuju era integrasi data berbasis data kependudukan. Sejalan dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013, data kependudukan digunakan untuk semua keperluan dalam pembangunan, antara lain untuk pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, demokratisasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Berbagai Lembaga seperti perbankan, asuransi, pasar modal, BPJS, Kemenkeu-NPWP, Polri-SIM, BPN-Sertifikat Tanah, Pemerintah Daerah, Rumah Sakit, Perguruan Tinggi, KPK, PPKATK sudah menggunakan hak akses verifikasi data kependudukan.

m. Pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan salah satu pengarusutamaan yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, adalah sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Secara konsep, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan). Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas) tujuan, yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan sebanyak 118 target tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dengan demikian merupakan suatu tantangan bagi Kementerian Dalam Negeri untuk dapat mendorong pemerintah daerah agar dapat mengimplementasikan terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan, dengan menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan.



n. Pengarusutamaan gender

Pengarusutamaan gender juga merupakan salah satu pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Implementasi pengarusutamaan gender yang dituangkan dalam kerangka anggaran responsif gender pada APBN tentunya perlu diikuti juga dengan dukungan dalam APBD yang saat ini masih belum optimal.

o. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan

- 1) Pencapaian target nasional penerbitan akta kelahiran bagi anak belum merata persentasenya di setiap daerah.
- 2) Tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara termasuk di luar negeri.
- 3) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan.
- 4) Sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa *out of product*, *out of service*, dan *out of sale*.



p. Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

- 1) Penerapan reformasi birokrasi yang masih bersifat pemenuhan prosedural.
- 2) Belum sepenuhnya sistem merit diimplementasikan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Kelembagaan dan proses bisnis yang sederhana, responsif, adaptif dan membuka ruang peran serta publik dalam pemerintahan. Perkembangan pembangunan kelembagaan salah satunya ditandai dengan capaian indeks kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kelembagaan, antara lain melalui perbaikan proses bisnis, implementasi SPBE dan manajemen kearsipan.
- 4) Pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan dengan penerapan standar pelayanan publik yang menyeluruh. Penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya ditinjau melalui penerapan standar pelayanan di instansi pemerintah. Capaian tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan percepatan penerapan standar pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di diperlukan pengembangan inovasi pelayanan publik dan percepatan penyelesaian pengaduan pelayanan.





- 5) Akuntabilitas kinerja dan pengawasan yang handal dan efektif serta birokrasi yang beintegritas. Akuntabilitas kinerja instansi ditinjau dari opini BPK atas laporan keuangan instansi dan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan instansi pemerintah yang transparan, bersih dan akuntabel.
- 6) Mewujudkan regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif dengan melakukan penataan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal substantif pada level regulasi yang masih tidak sesuai dengan tata perundang-undangan.



q. Rencana pemindahan Ibukota Negara

Berkenaan dengan kepindahan Ibukota Negara, perlunya fasilitasi dukungan penyelesaian regulasi, penetapan batas-batas daerah untuk memberikan kepastian kebijakan pemetaan rencana pembangunan yang akan diimplementasikan tidak saja pada daerah Ibukota Negara baru, namun juga pada daerah-daerah disekitarnya sebagai daerah penunjang. Selain itu, menjadi prioritas bagi Kementerian Dalam Negeri juga untuk membangun kesiapan datacenter SIAK dan KTP-el secara terkoordinatif dan terintegrasi berlokasi di Ibu kota Negara baru. Hal ini untuk menjamin keamanan dan keberlangsungan datacenter kependudukan dimaksud di Ibukota Negara baru, di mana saat ini datacenter SIAK dan KTP-el masih terpisah-pisah lokasinya.









BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN



Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**, yang akan ditempuh dengan 9 Misi meliputi:

1. **Peningkatan kualitas manusia Indonesia.**
2. **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.**
3. **Pembangunan yang merata dan berkeadilan.**
4. **Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.**
5. **Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.**
6. **Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.**
7. **Perlindungan bagi segenap bangsa dan maemberiakan rasa aman pada seluruh warga.**
8. **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.**
9. **Sinergi pemaerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.**



Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020-2024 ditetapkan 5 arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- 1. Pembangunan SDM**
- 2. Pembangunan Infrastruktur**
- 3. Penyederhanaan Regulasi**
- 4. Penyederhanaan Birokrasi**
- 5. Transformasi Ekonomi**

2.1 VISI

Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:

*"Kementerian Dalam Negeri yang **Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI)** dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".*

Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Adaptif

Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam Negeri dalam menjalankan fungsi utamanya melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif, mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat.

Profesional

Profesional, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

Proaktif

Proaktif atau dapat didefinisikan sebagai tindakan yang lebih aktif, dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu bertindak lebih daripada sekedar mengambil inisiatif guna mewujudkan pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kementerian Dalam Negeri karena kedudukannya sebagai salah satu Kementerian kunci dan tidak dapat dihapuskan harus bersikap aktif melaksanakan tugas dan fungsinya secara tepat sasaran dan tepat langkah, tidak saja dalam situasi normal maupun dalam situasi kontijensi dalam membantu tugas-tugas Presiden di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.



Inovatif

Inovatif dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri memiliki kemampuan untuk melakukan suatu pembaharuan terhadap berbagai sumber daya yang ada, sehingga sumber daya tersebut mempunyai manfaat yang lebih tinggi untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi. Inovasi yang dikembangkan juga diarahkan dalam kedudukan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah. Dengan inovatif juga mengharuskan Kementerian Dalam Negeri dapat lebih berkontribusi secara optimal dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2.2 MISI

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyalarsan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

2.3 TUJUAN STRATEGIS

1. Terwujudnya sistem politik yang demokratis berlandaskan nilai-nilai pancasila (T1).
2. Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2).
3. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (T3).





2.4. SASARAN STRATEGIS

Untuk mendukung pencapaian tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri, sebagai berikut:

1 Untuk mewujudkan tujuan pada T1 ditetapkan Sasaran Strategis:



- a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Indeks Demokrasi Indonesia.
 - 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu.
 - 3) Indeks Kinerja Ormas
- b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi.
 - 2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM).
 - 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi.
 - 4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya.
- c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kewaspadaan Nasional.
- d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik".
 - 2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

2

Untuk mewujudkan tujuan pada T2, ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:



- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
 - 2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
 - 3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
 - 4) Indeks Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja Alumni.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
 - 4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
 - 5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik".
 - 6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
 - 8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama".
 - 9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
 - 10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.



- d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
 - 1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 - 2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).
- e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan.

3

Untuk mewujudkan tujuan pada T3, ditetapkan Sasaran Strategis:



- a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10), dengan tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini sebagai Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri.





- b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- 1) Indeks Pengawasan Internal.
 - 2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus.





- c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12), dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Persentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.





BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

3.1.1. AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah di rancang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, periode pembangunan 2020-2024 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Rencana Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dimaksud, mengangkat tema pembangunan:

Visi Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah:

“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Dengan muatan Tema tersebut, yang sekaligus merupakan penjabaran dari visi dan misi, serta 5 arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, telah disusun 7 Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas (PN-1).
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN-2).
3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN-3).
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan (PN-4).
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN-5).
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim (PN-6).
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik (PN-7).



Selanjutnya sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Dalam Negeri memiliki peran untuk mendukung pencapaian ke-7 Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 tersebut di atas, baik sebagai penanggungjawab maupun instansi pendukung beberapa fokus prioritas di setiap Agenda Prioritas dimaksud.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan Visi dan 5 arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, serta 7 Agenda Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024, disusun arah kebijakan dan strategi untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Unit Organisasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan pertama (T1) difokuskan pada pembinaan politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan demokrasi.
2. Peningkatan kapasitas partai politik
3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu.
4. Fasilitasi peningkatan kinerja organisasi kemasyarakatan.
5. Penghayatan, pengamalan, pembumian nilai-nilai ideologi pancasila.
6. Pemantapan iklim kondusif serta persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Fasilitasi penanganan konflik sosial.
8. Pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah.
9. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang Trantibumlinmas.





Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan kedua (T2) difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri melalui:

- a. Pembangunan SDM Pendidikan Kepamongprajaan.
- b. Penyusunan standar kompetensi pemerintahan dalam negeri.
- c. Sertifikasi kompetensi pemerintahan dalam negeri.
- d. Pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri.
- e. Pembangunan *Big Data* SDM ASN.
- f. Peningkatan kapasitas jabatan fungsional auditor Kementerian Dalam Negeri dan PPUPD secara nasional.
- g. Peningkatan kapasitas SDM administrasi kependudukan.

2. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, melalui:

- a. Pengembangan sistem informasi e-Perda yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- b. Penerapan sistem aplikasi monitoring Perda.
- c. Analisis kebutuhan pembentukan Perda.
- d. Reviu Ranperda dan Ranperkada.
- e. Pemanfaatan hasil-hasil kelitbang sebagai naskah akademik atau rujukan dalam perumusan kebijakan dan regulasi (*research based policy*).



3. Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, melalui:

- a. Implementasi kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah dalam peningkatan daya saing dan penyelesaian permasalahan publik.
- b. Pengembangan kawasan khusus dan program kegiatan strategis nasional.
- c. Pengembangan profil daerah.
- d. Sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Daerah, termasuk diantaranya penerapan Perencanaan dan Penganggaran *Responsive Gender* (PPRG) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- e. Pengembangan sistem pengendalian inflasi daerah.
- f. Pengembangan seni kerajinan nasional.
- g. Peningkatan pendapatan asli desa, dan pertumbuhan ekonomi desa serta pengembangan potensi desa untuk peningkatan pendapatan desa.
- h. Peningkatan kerjasama antar desa dan lembaga non pemerintah dalam rangka peningkatan ekonomi desa.
- i. Peningkatan pendapatan asli daerah, investasi daerah, pemanfaatan dana daerah dan aset daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja, mencapai target ekonomi makro nasional maupun indikator ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, optimalisasi *mandatory spending* infrastruktur pro investasi.
- j. Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.
- k. Percepatan pemulihan ekonomi daerah dan dukungan jaring pengaman sosial sebagai dampak dari penyebaran pandemi *Covid-19*.

4. Peningkatan implementasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui:

- a. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Kementerian Dalam Negeri.
- b. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung pemerintahan desa.
- c. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana Pendidikan Kepamongprajaan (IPDN).
- d. Peningkatan infrastruktur/sarana dan prasarana pengembangan SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
- e. Dukungan penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan di kawasan perbatasan negara.
- f. Pengembangan infrastruktur Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna terwujudnya sinergi pembangunan pusat dan daerah yang berbasis konektivitas dan terpenuhinya pelayanan dasar serta pemerataan antar wilayah.
- g. Pembangunan infrastruktur penguatan inovasi daerah.
- h. Dukungan pembangunan infrastruktur daerah dan sarana prasarana kantor pemerintahan daerah serta pengembangan konektivitas antar wilayah.

5. Pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, melalui:

- a. Penyusunan regulasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.
- b. Peningkatan pengawasan internal Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- c. Penguatan peran camat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- d. Peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP.
- e. Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel.
- f. Sinkronisasi pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Urusan Pemerintahan Daerah, serta harmonisasi Pembangunan Pusat dan Daerah.
- g. Penguatan kinerja Inspektorat Daerah.
- h. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Daerah.

6. Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah, melalui:

- a. Fasilitasi penerapan pelayanan publik berbasis digital.
- b. Implementasi *One Stop Services* (OSS) pada PTSP di Daerah.
- c. Dukungan pembukaan lapangan kerja seluas-luasnya dengan peningkatan kualitas tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, serta pengembangan sektor informal.
- d. Fasilitasi penyederhanaan perizinan dan kemudahan berusaha/investasi serta izin lokasi.
- e. Peningkatan capaian penerapan SPM.
- f. Penguatan inovasi daerah.





7. Penataan wilayah dan pembangunan daerah, melalui:

- a. Percepatan penyelesaian batas daerah dan batas desa, termasuk batas daerah calon Ibukota Negara baru.
- b. Penerapan standar pelayanan perkotaan.
- c. Peningkatan kapasitas kawasan khusus bagi kepentingan strategis nasional.
- d. Penguatan kapasitas pemerintahan daerah dalam penanganan *stunting*.
- e. Fasilitasi percepatan penetapan Rencana Tata Ruang Daerah termasuk Ibukota Negara baru.
- f. Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan kelautan perikanan.
- g. Penataan kewenangan desa dengan perbup/perwalkot dan dengan peraturan desa.
- h. Fasilitasi penerapan tata kelola pemerintahan desa berbasis ITE (*Smart Village*).
- i. Fasilitasi Penerapan *Smart City*.

8. Pemanfaatan Database Kependudukan untuk peningkatan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan, serta pembangunan *datacenter* SIAK dan KTP-el di Ibukota Negara Baru.

Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan ketiga (T3) difokuskan pada:

- 1. Peningkatan kualitas penerapan reformasi birokrasi Kementerian Dalam Negeri.
- 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri.
- 3. Pembangunan sistem informasi pengawasan.
- 4. Peningkatan nilai integritas Kementerian Dalam Negeri.
- 5. Peningkatan kualitas hasil kelitbangan dan inovasi yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri.



3.3. KEBIJAKAN *QUICK WINS* KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi yang berkembang saat ini, serta tuntutan untuk keberhasilan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, termasuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada tahun 2020 dan 2021, dan upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat akibat pandemi *Covid-19*, perlu disusun kebijakan program dan kegiatan *quick wins* Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2021, sebagai berikut:

a. Dukungan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020, meliputi:

- 1) Penyelesaian dan penyerahan DP4 untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 kepada KPU.
- 2) Penyelesaian NPHD Pilkada Serentak Tahun 2020
- 3) Monitoring pelaksanaan Pilkada Serentak melalui Desk Pilkada
- 4) Penyelesaian administrasi pengesahan pemberhentian dan pengangkatan KDH dan WKDH terpilih hasil Pilkada Serentak Tahun 2020
- 5) Pembekalan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH hasil Pilkada Serentak tahun 2020.
- 6) Koordinasi dan konsolidasi dengan 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak.

b. Fasilitasi penyusunan RPJMD pada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020.

c. Dukungan penanganan pandemi *Covid-19* di daerah, meliputi:

- 1) Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis penanganan pandemi *Covid-19* di daerah.
- 2) Pemetaan kebutuhan dan potensi daerah untuk penanganan *Covid-19*.
- 3) Fasilitasi penyesuaian (realokasi dan *refocusing*) APBD untuk percepatan penanganan *Covid-19* di daerah.
- 4) Sosialisasi kebijakan dan pedoman teknis percepatan penanganan *Covid-19* di daerah.

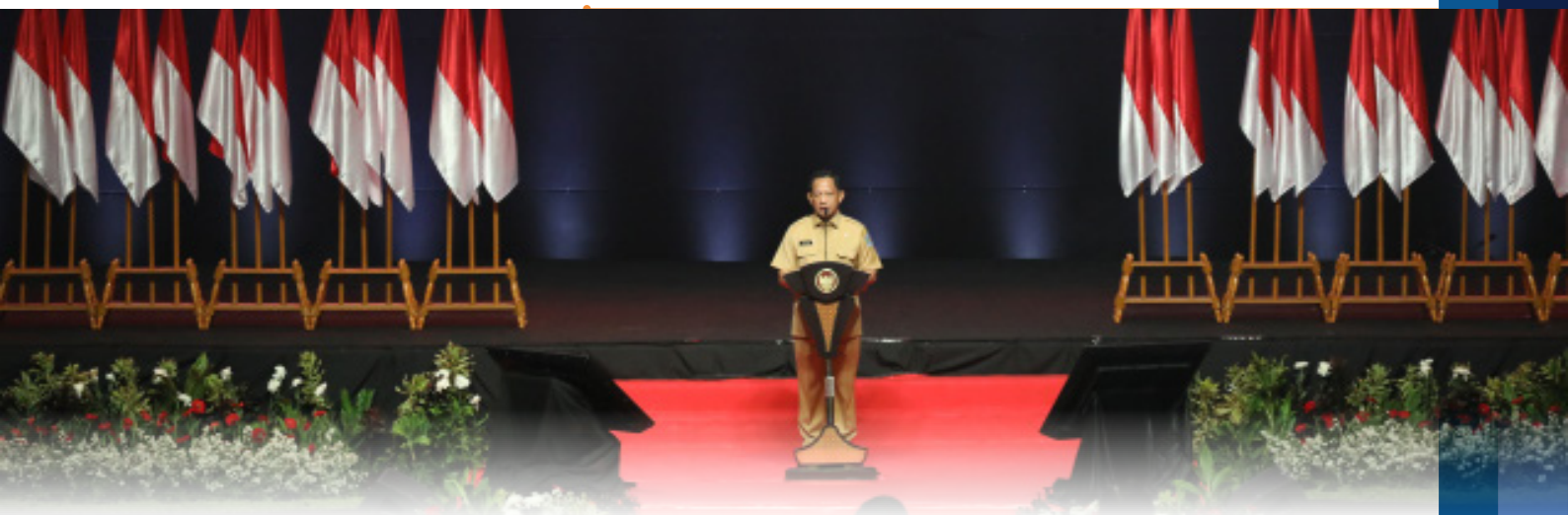
d. Penerapan PTSP Prima berbasis elektronik.

e. Fasilitasi penyederhanaan eselonering perangkat daerah.

f. Percepatan integrasi pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik.

g. Internalisasi Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri melalui Fasilitasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Unit Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.





3.4. KERANGKA REGULASI

Dalam perencanaan pembangunan nasional, peran Kerangka Regulasi menjadi sangat penting dimana regulasi merupakan bentuk formal dari suatu kebijakan yang mempunyai kekuatan hukum dalam mengatur perilaku masyarakat (untuk dipatuhi, dilaksanakan, dan ditegakkan) dalam menjalankan roda pemerintahan guna memastikan jalannya pemerintahan yang tetap berorientasi pada penyelenggara negara untuk mencapai tujuan bernegara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional bahwa regulasi merupakan salah satu *delivery mechanism* dalam melaksanakan perencanaan pembangunan. Proses penyusunan hingga penetapan regulasi akan menimbulkan dampak biaya. Kualitas regulasi yang buruk akan berdampak pada biaya yang lebih besar dan tentunya masyarakat yang akan menanggung beban tersebut. Oleh karenanya penyusunan regulasi merupakan tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat non regulasi (kebijakan lain) tidak memungkinkan untuk diimplementasikan, dan perlu dipastikan adanya sinergi bahwa setiap kebijakan yang menjadi prioritas pembangunan harus didukung dengan regulasi yang sejalan dengan perencanaan.

Oleh karenanya, inti dari pelaksanaan Kerangka Regulasi adalah untuk memastikan terjadinya sinergi antara kebijakan dan regulasi yang sejalan dengan kebutuhan implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengaturan lainnya sebagai landasan yuridis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan baik yang menjadi prioritas nasional dan/atau prioritas kementerian/lembaga yang bersangkutan.

Sejalan dengan kebijakan Kerangka Regulasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, upaya untuk mensinergikan kebijakan Kementerian Dalam Negeri dengan regulasi yang akan disusun terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya mulai dari hulu hingga hilir, tentunya sejalan pula dengan kebijakan pemerintah dalam mencapai target pembangunan nasional dengan menerapkan *Omnibus Law* atau penataan regulasi yang dapat berupa pencabutan, revisi atau penggabungan beberapa regulasi atau pasal baik pada level (UU, PP, Perpres, Permen, Perda Provinsi/Kabupaten, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota). Dengan ditetapkannya *Omnibus Law*, akan ada keselarasan serta kesinambungan terhadap peraturan atau perundang-undangan yang ada di atasnya, sehingga tidak terkesan saling tumpang tindih atau konflik yang akibatnya menghambat kemudahan berusaha dan investasi di daerah.

Rencana penyusunan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Kerangka Regulasi Kementerian Dalam Negeri tahun 2020-2024, diuraikan sebagaimana Lampiran 1 Renstra ini.



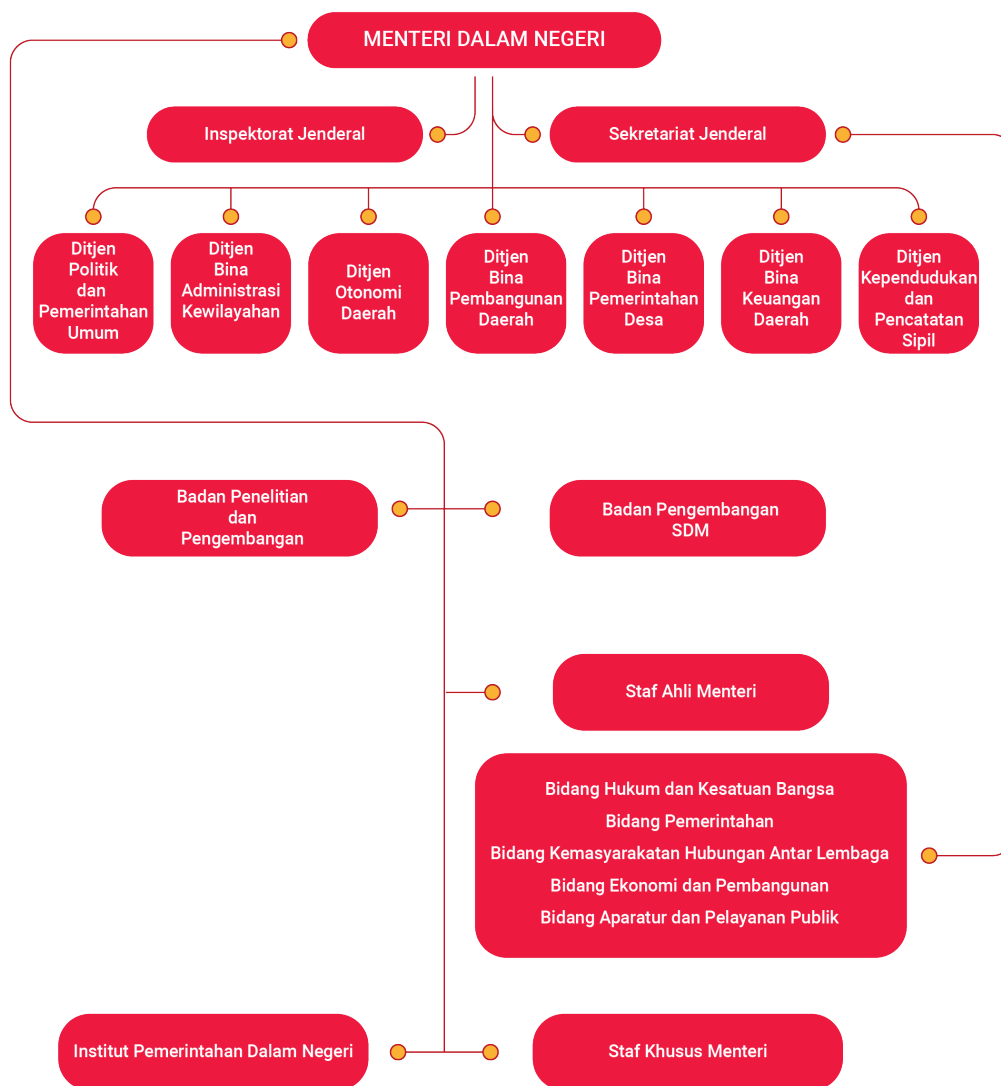
3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 8 ayat 3, ditegaskan bahwa dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selanjutnya, sebagai pelaksanaan dari UUD 1945, Pasal 17 ayat (3), dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5, bahwa sebagai kementerian yang nomenklaturnya jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kedudukan Menteri Dalam Negeri adalah pembantu Presiden yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yaitu urusan pemerintahan dalam negeri.

Hal lebih terperinci terkait tugas Kementerian Dalam Negeri sebagaimana di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, adalah menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
- f. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
- h. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
- i. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
- j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Susunan Organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri serta organisasi Kementerian Dalam Negeri terdiri atas 11 (sebelas) unit Eselon I yang merupakan unsur pembantu, unsur pengawas, unsur pelaksana dan unsur penunjang, serta 5 (lima) staf ahli, meliputi:



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, pokok-pokok cakupan tugas Unit Organisasi Eselon I Kementerian Dalam Negeri di atas meliputi:

- a. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- b. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum; bidang pembinaan administrasi kewilayahan; bidang penyelenggaraan otonomi daerah; bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah; bidang pembinaan pemerintahan desa; bidang pembinaan keuangan daerah; serta bidang kependudukan dan pencatatan sipil;



- c. melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri; dan
- e. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri.

Sedangkan pokok-pokok cakupan fungsi Unit Organisasi Eselon I Kementerian Dalam Negeri, meliputi:

- a. koordinasi, penyusunan, pembinaan dan penyelenggaraan tugas, serta pemberian dukungan administrasi (mencakup rencana dan program, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtangaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat, peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan, harmonisasi, advokasi, konsultasi, pendapat hukum dan bantuan hukum, serta pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa, serta pengelolaan data, sistem informasi dan infrastruktur TIK) lingkup Kementerian Dalam Negeri, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dan pemerintahan umum, bidang pembinaan administrasi kewilayahan, bidang penyelenggaraan otonomi daerah, bidang urusan pemerintahan dan pembinaan pembangunan daerah, bidang pembinaan pemerintahan desa, bidang pembinaan keuangan daerah, serta bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penataan desa, penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, kelembagaan desa, dan kerja sama desa, bidang pembinaan keuangan daerah, bidang administrasi kependudukan;



- d. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern di lingkungan Kementerian Dalam Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Dalam Negeri;
- e. penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri, pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan fasilitasi inovasi daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah;
- f. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan sumber daya manusia bidang pemerintahan dalam negeri, penilaian kompetensi sumber daya manusia pemerintahan dalam negeri, pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang pemerintahan dalam negeri.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan tenaga kader pamong praja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik pada Pemerintah Pusat maupun Daerah, Pemerintah menyelenggarakan pendidikan kader pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Penyelenggaraan pendidikan tersebut dilakukan oleh lembaga pendidikan yang terus bertransformasi dimulai dari pembentukan Kursus Dinas C (KDC), Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), sampai dengan dibentuknya Institut Ilmu Pemerintahan (IIP), dan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN).

Keberadaan STPDN dengan program pendidikan vokasi (Diploma IV/D-IV) dan IIP yang menyelenggarakan Pendidikan akademik program sarjana strata satu (S1), menjadikan Kementerian Dalam Negeri memiliki 2 lembaga pendidikan tinggi kedinasan dengan sistem yang hampir sama. Oleh karenanya, mengacu pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa dalam satu departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama, maka keberadaan STPDN digabungkan kedalam IIP sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan dengan nomenklatur menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Untuk penyelenggaraan pendidikan kepomongprajaan oleh IPDN, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, diselenggarakan oleh Kampus IPDN Pusat yang terdiri dari IPDN Kampus Jatinangor dan IPDN Kampus Jakarta; serta Kampus IPDN daerah yang terdiri dari IPDN Kampus Sumatera Barat, IPDN Kampus Sulawesi Selatan, IPDN Kampus Sulawesi Utara, IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat, IPDN Kampus Papua, dan IPDN Kampus Kalimantan Barat. Sejalan dengan kebijakan pengembangan IPDN Kampus Daerah dan dinamika kebutuhan aparatur pemerintahan daerah dari lulusan IPDN, dalam lima tahun ke depan akan dibentuk IPDN Kampus Aceh.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mempunyai tugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Dengan kedudukan DKPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang mengamanatkan bahwa fasilitasi dukungan pelaksanaan tugas DKPP dilakukan oleh Sekretariat DKPP yang kedudukannya bertanggungjawab kepada Ketua DKPP, sedangkan secara struktural dan pengelolaan anggarannya di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang dan Peraturan Presiden tersebut dan untuk mengatur ruang lingkup tugas dan fungsi Sekretariat DKPP, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, susunan organisasi Kementerian Dalam Negeri sebagai Kerangka Kelembagaan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 diusulkan tidak mengalami perubahan sebagaimana susunan organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya berkenaan dengan keterkaitan pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 dengan kebutuhan kelembagaan lima tahun ke depan, diuraikan dalam tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1 Keterkaitan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Dengan Kebutuhan Kelembagaan Tahun 2020-2024

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Kelembagaan Penanggungjawab | Kebutuhan Kelembagaan |
|----|--|---|-----------------------|
| 1. | Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa (T1) | | |
| | a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia (SS1) | Ditjen Polpum | Tetap |
| | b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah (SS2) | | Tetap |
| | c. Meningkatnya kewaspadaan nasional (SS3) | | Tetap |
| | d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas (SS4) | Ditjen Bina Adwil | Tetap |
| 2. | Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi (T2) | | |
| | a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri (SS5) | BPSDM, Itjen, IPDN | Tetap |
| | b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah (SS6) | Ditjen Otda | Tetap |
| | c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif (SS7) | Ditjen Otda, Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Pemdes, Ditjen Bina Keuda, Badan Litbang, Itjen. | Tetap |
| | d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan (SS8) | Ditjen Dukcapil | Tetap |
| | e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan (SS9) | Ditjen Bina Adwil | Tetap |
| 3. | Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | | |
| | a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS10) | Setjen | Tetap |
| | b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas (SS11) | Itjen | Tetap |
| | c. Meningkatnya Kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (SS12) | Badan Litbang | Tetap |



BAB IV

TARGET KINERJA DAN

KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis kementerian dalam negeri tahun 2020-2024, ditetapkan indikator dan target kinerja sebagai pengukur keberhasilan capaian kinerja utama kementerian dalam negeri dalam lima tahun ke depan. Indikator dan target kinerja tersebut merupakan indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri sebagai penjabaran 5 Arah Program Prioritas Pembangunan Indonesia Maju Tahun 2019-2024 yang memiliki keterkaitan dengan indikator dan target penugasan Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 kepada kementerian dalam negeri, termasuk indikator dan target Program Prioritas Kementerian Dalam Negeri yang menjadi pengukur keberhasilan capaian kinerja utama pada beberapa Unit Kerja Eselon I.

Indikator kinerja dan target capaian kinerja utama Kementerian Dalam Negeri tersebut di atas pada masing-masing sasaran strategis, sebagaimana dalam Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja dan Indikasi Target Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator | Baseline | Indikasi Target | | Unit Pelaksana |
|-----------|---|--|-----------------|--|-------------------|
| | | | 2020 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa. | | | | |
| | a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. | | | | |
| | 1) Indeks Demokrasi Indonesia. | 72,39 (IDI 2018) | 77,36 | 78.66 | Ditjen Polpum |
| | 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu. | 75% (Pilkada 2018), 81% (Pemilu 2019) | 77,5% (Pilkada) | 79,5% (target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024) | Ditjen Polpum |
| | 3) Indeks Kinerja Ormas. | N/A | -* | Nilai 70 | Ditjen Polpum |
| | b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah. | | | | |
| | 1) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi. | Nilai 2,38 | Nilai 2,38 | Nilai 2,40 | Ditjen Polpum |
| | 2) Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM). | 67,01 (2018) | 67,1 | 67,5 | Ditjen Polpum |
| | 3) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi. | Nilai 2,860 | Nilai 2,865 | Nilai 2,885 | Ditjen Polpum |
| | 4) Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya. | Nilai 2,305 | Nilai 2,310 | Nilai 2,330 | Ditjen Polpum |
| | c. Meningkatnya kewaspadaan nasional. | | | | |
| | Indeks Kewaspadaan Nasional | N/A | -* | 64 | Ditjen Polpum |
| | d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas. | | | | |
| | 1) Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik". | N/A | -* | 150 daerah | Ditjen Bina Adwil |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/ Indikator | Baseline | Indikasi Target | | Unit Pelaksana |
|-----------|---|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 2) Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas. | N/A | .* | Nilai 60 | Ditjen Bina Adwil |
| 2. | Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi. | | | | |
| | a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri. | | | | |
| | 1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun. | N/A | 15% | 80% | BPSDM |
| | 2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri. | N/A | Level 3 (75%) | Level 3 (100%) | Itjen |
| | 3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara Nasional. | N/A | Level 3 (75%) | Level 3 (100%) | Itjen |
| | 4) Indeks Kepuasan <i>Stakeholder</i> terhadap Kinerja Alumni. | N/A | Nilai 3,00 | Nilai 3,60 | IPDN |
| | b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah. | | | | |
| | 1) Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah. | N/A | .* | Nilai 85 (Sangat Tinggi) | Ditjen Otda |
| | c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif. | | | | |
| | 1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. | N/A | .* | Nilai 85 (Sangat Tinggi) | Ditjen Otda |
| | 2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. | Nilai 2,8 (Cukup) | Nilai 2,85 (Cukup) | Nilai 3,2 (Sangat Tinggi) | Ditjen Otda |
| | 3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM. | N/A | 30% | 100% | Ditjen Bina Bangda |
| | 4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. | N/A | .* | Nilai 80 (Sangat Sinkron) | Ditjen Bina Bangda |
| | 5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai "Baik". | 10% | 10% | 75% | Ditjen Bina Pemdes |
| | 6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. | Nilai 35,90 | Nilai 36 | Nilai 37 | Ditjen Bina Keuda |
| | 7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi. | N/A | .* | 36% | Badan Litbang |
| | 8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama". | N/A | 55 Daerah | 165 Daerah | Badan Litbang |
| | 9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah. | N/A | Nilai 80 | Nilai 100 | Itjen |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator | Baseline | Indikasi Target | | Unit Pelaksana |
|---|--|---|---|--|-------------------|
| | | | 2020 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah. | N/A | .* | Nilai 90 (A) | Itjen |
| d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan. | | | | | |
| | 1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. | 90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan | 90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan | 100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan | Ditjen Dukcapil |
| | 2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (Kumulatif) | 1.623 Lembaga Pengguna | 1.923 Lembaga Pengguna | 3.123 Lembaga Pengguna | Ditjen Dukcapil |
| e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan. | | | | | |
| | Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan. | N/A | .* | Nilai 60 | Ditjen Bina Adwil |
| 3. | Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. | | | | |
| | a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. | | | | |
| | Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri. | Nilai 75,43 | Nilai 85,01 | Nilai 93,01 | Setjen |
| | b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas | | | | |
| | 1) Indeks Pengawasan Internal. | N/A | Nilai 80 | Nilai 100 | Itjen |
| | 2) Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus. | N/A | Nilai 80 | Nilai 85 | Itjen |
| | c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | | | | |
| | 1) Persentase hasil kelitbang yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri. | N/A | 40% | 65% | Badan Litbang |

* Dalam proses penyusunan instrumen dokumen indeks

Dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran strategis diatas, ditetapkan 4 Program Kementerian Dalam Negeri hasil restrukturisasi dalam Kerangka Redesain Sistem Penganggaran K/L, yaitu:

1. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum.
2. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa.
3. Program Tata Kelola Kependudukan.
4. Program Dukungan Manajemen.



4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam upaya mengoptimalkan dan mensinergikan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri diperlukan adanya Kerangka Pendanaan yang mencakup sumber dana dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, total rencana anggaran Program Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp.39.708.000.000.000,- dengan distribusi per Program dan Per Unit Organisasi Eselon I sebagai berikut:

Rencana Anggaran Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 per Program

(dalam juta rupiah)

| NO. | PROGRAM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | JUMLAH |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum | 184.460 | 793.230 | 824.730 | 840.230 | 859.230 | 3.501.881 |
| 2 | Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 696.652 | 2.077.506 | 2.663.272 | 3.567.887 | 5.706.906 | 14.712.224 |
| 3 | Tata Kelola Kependudukan | 1.436.005 | 1.400.294 | 1.376.854 | 1.384.258 | 1.835.070 | 7.432.481 |
| 4 | Dukungan Manajemen | 2.091.855 | 2.311.360 | 2.558.900 | 3.008.926 | 4.090.372 | 14.061.414 |
| TOTAL | | 4.408.972 | 6.582.391 | 7.423.757 | 8.801.302 | 12.491.579 | 39.708.000 |

Rencana Anggaran
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 per Unit Kerja Eselon I

(dalam juta rupiah)

| NO. | UNIT KERJA ESELON I/PROGRAM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | JUMLAH |
|-----------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum | 245.774 | 860.981 | 899.706 | 923.153 | 950.895 | 3.880.508 |
| | a. Program Pembinaan Politik dan Pemerintahan Umum | 184.460 | 793.230 | 824.730 | 840.230 | 859.230 | 3.501.881 |
| | b. Program Dukungan Manajemen | 61.314 | 67.750 | 74.975 | 82.923 | 91.665 | 378.628 |
| 2. | Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | 251.189 | 631.781 | 786.159 | 857.318 | 930.916 | 3.457.363 |
| | a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 186.348 | 554.914 | 700.813 | 762.485 | 825.455 | 3.030.014 |
| | b. Program Dukungan Manajemen | 64.841 | 76.867 | 85.346 | 94.833 | 105.461 | 427.349 |
| 3. | Direktorat Jenderal Otonomi Daerah | 90.017 | 133.667 | 165.717 | 197.267 | 254.817 | 841.485 |
| | a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 33.250 | 72.667 | 101.717 | 131.267 | 186.817 | 525.718 |
| | b. Program Dukungan Manajemen | 56.767 | 61.000 | 64.000 | 66.000 | 68.000 | 315.767 |
| 4. | Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah | 234.160 | 317.164 | 792.911 | 1.982.277 | 4.955.691 | 8.282.203 |
| | a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 152.726 | 211.578 | 528.944 | 1.322.361 | 3.305.903 | 5.521.512 |
| | b. Program Dukungan Manajemen | 81.434 | 105.586 | 263.966 | 659.915 | 1.649.788 | 2.760.691 |
| 5. | Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa | 260.526 | 1.061.757 | 1.118.188 | 1.141.640 | 1.151.487 | 4.733.599 |
| | a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 146.203 | 944.467 | 996.793 | 1.015.996 | 1.021.446 | 4.124.906 |
| | b. Program Dukungan Manajemen | 114.323 | 117.290 | 121.395 | 125.644 | 130.041 | 608.693 |
| 6. | Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah | 80.691 | 96.350 | 107.406 | 118.831 | 131.034 | 534.311 |
| | a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 30.800 | 37.755 | 42.656 | 47.607 | 52.687 | 211.505 |
| | b. Program Dukungan Manajemen | 49.891 | 58.595 | 64.750 | 71.224 | 78.347 | 322.806 |

(dalam juta rupiah)

| NO. | UNIT KERJA ESELON I/PROGRAM | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | JUMLAH |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | Badan Penelitian dan Pengembangan | 56.862 | 75.146 | 82.869 | 90.739 | 99.328 | 404.944 |
| | a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 12.920 | 23.339 | 25.881 | 28.052 | 30.373 | 120.566 |
| | b. Program Dukungan Manajemen | 43.942 | 51.807 | 56.988 | 62.686 | 68.955 | 284.378 |
| 8. | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 210.146 | 353.671 | 388.852 | 349.003 | 374.609 | 1.676.282 |
| | a. Program Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa | 134.405 | 232.786 | 266.468 | 260.119 | 284.225 | 1.178.004 |
| | b. Program Dukungan Manajemen | 75.741 | 120.884 | 122.384 | 88.884 | 90.384 | 498.278 |
| 9. | Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1.578.105 | 1.550.279 | 1.534.444 | 1.549.063 | 2.003.840 | 8.215.731 |
| | a. Program Tata Kelola Kependudukan | 1.436.005 | 1.400.294 | 1.376.854 | 1.384.258 | 1.835.070 | 7.432.481 |
| | b. Program Dukungan Manajemen | 142.100 | 149.985 | 157.590 | 164.805 | 168.770 | 783.250 |
| 10. | Sekretariat Jenderal | 648.329 | 671.157 | 701.428 | 719.583 | 741.877 | 3.482.374 |
| | Program Dukungan Manajemen | 648.329 | 671.157 | 701.428 | 719.583 | 741.877 | 3.482.374 |
| 11. | Inspektorat Jenderal | 76.737 | 84.374 | 97.276 | 100.254 | 103.323 | 461.964 |
| | Program Dukungan Manajemen | 76.737 | 84.374 | 97.276 | 100.254 | 103.323 | 461.964 |
| 12. | Institut Pemerintahan Dalam Negeri | 676.436 | 746.064 | 748.802 | 772.174 | 793.761 | 3.737.237 |
| | Program Dukungan Manajemen | 676.436 | 746.064 | 748.802 | 772.174 | 793.761 | 3.737.237 |
| TOTAL | | 4.408.972 | 6.582.391 | 7.423.757 | 8.801.302 | 12.491.579 | 39.708.000 |

Keterangan:

Pagu tersebut di atas mencakup Pagu Belanja Operasional dan Pagu Belanja Non Operasional, yang bersumber dari RM, PNB, dan PHLN.



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian Dalam Negeri untuk 5 tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan, disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Nasional, serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, termaksud memperhatikan kondisi lingkungan strategis, dan situasi yang berkembang akibat pandemi *Covid-19* yang melanda sebagian besar negara di dunia, termasuk wilayah di Indonesia.

Dalam rangka pelaksanaan Renstra Kementerian Dalam Negeri dimaksud perlu diperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Implementasi pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 diarahkan dan dikendalikan oleh Menteri Dalam Negeri, serta dilaksanakan oleh seluruh Jajaran Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing.
2. Renstra Kementerian Dalam Negeri menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Dalam Negeri (Renja dan RKA K/L) setiap tahunnya sesuai periode Renstra, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
3. Pengendalian dan Evaluasi Renstra Kementerian Dalam Negeri 2020-2024 dilakukan dengan tertib dan obyektif serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Menteri Dalam Negeri yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri.

Dengan terselenggaranya semua program dan ketercapaian tujuan dan sasaran serta terwujudnya kinerja sebagaimana tertulis dalam lampiran renstra, dalam lima tahun ke depan akan terbangun penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dengan perencanaan pembangunan yang baik dan tata kelola anggaran yang akuntabel, sehingga dapat mewujudkan pelayanan publik yang cepat dan akurat serta mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN





LAMPIRAN I MATRIKS KERANGKA REGULASI

Lampiran I

Matriks Kerangka Regulasi Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|--|---|---|-----------------------|--|---------------------|
| Prolegnas/Prosun PP/Prosun Perpres/Prosuundangri | | | | | |
| A. Undang-Undang | | | | | |
| 1. | Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik | Penguatan kelembagaan partai politik, tugas dan fungsi partai politik serta bantuan keuangan partai politik. Melalui penyempurnaan pengaturan berbagai substansi Undang-Undang tentang Partai Politik diharapkan akan mampu meminimalisir berbagai masalah-masalah terkait dengan partai politik serta terwujudnya partai politik yang kuat secara lembaga dan representatif dan legitimate sejak awal pembentukannya serta mampu meningkatkan kinerja dan kualitas partai politik itu sendiri. | Ditjen Polpum | - Kemenkopolhukam - Kemenkeu - Kemenkumham - Setneg - BPK RI | 2024 |
| 2. | Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | 1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan | Ditjen Keuda Bina | - Kemenkeu - Kemenko Perencanaan - Setneg | 2024 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|--------------------------------|---|---|-----------------------|--|---------------------|
| | | <p>sekaligus memperkuat otonomi daerah.</p> <p>3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.</p> | | | |
| 3. | Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua | Penyesuaian beberapa muatan materi kondisi kekinian dan peraturan perundang-undangan lainnya dan adanya aspirasi masyarakat Papua | Ditjen Otda | <ul style="list-style-type: none"> - Kemendagri - Kemenkeu - Setneg | 2021 |
| 4. | Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia | Perubahan/pergantian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 agar sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang sejahtera, nyaman, tertib, maju, modern, berkelanjutan yang setara dengan ibukota negara maju lainnya di dunia | Ditjen Otda | <ul style="list-style-type: none"> - Bappenas - Kemendagri - Kemenkumham - KemenPUPR - Setneg | 2024 |
| 5. | Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Penyesuaian substansi terkait dengan dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dan pembagian kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah | Ditjen Otda | <ul style="list-style-type: none"> - Bappenas - Kemendagri - Kemenkumham - KemenPUPR - Setneg | 2024 |
| B. Peraturan Pemerintah | | | | | |
| 1. | Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik | Menindaklanjuti perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik | Ditjen Polpum | <ul style="list-style-type: none"> - Kemendagri - Kemenkeu - Kemenkumham - Setneg - BPK RI | 2022 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|-----------------------------|---|---------------------|
| 2. | Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah | Menindaklanjuti Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Ditjen Bina Keuangan Daerah | - Kemenkeu - Kemenko Perekonomian - Setneg | 2022 |
| 3. | Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan PDRD | Menindaklanjuti Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Ditjen Bina Keuangan Daerah | - Kemenkeu - Kemenko Perekonomian - Setneg | 2022 |
| 4. | Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | Menyelaraskan pengaturan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 | Ditjen Bina Keuda | - Kemenkeu - Setneg | 2020 |
| 5. | Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua | Memperkuat dan mengefektifkan peran MRP dalam mengawal Kebijakan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat | Ditjen Ottda | - Kemenkopolkham - Kemenkeu - Setneg | 2020 |
| 6. | Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah | Melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah | Ditjen Polpum | - Kemenkopolkham - Kemenkeu - Setneg - TNI - POLRI - Kejaksaan Agung | 2021 |
| 7. | Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah | Menangani keadaan darurat termasuk penanganan pandemi <i>Corona Virus Disease (Covid-19)</i> dan pemulihan ekonomi pasca dampak Covid-19 serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi | Ditjen Bina Keuda | - Kemenkopolkham - Kemenkeu - Setneg - Kemenkumham | 2021 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----------------------|---|---|--|---|---------------------|
| 8. | Perkotaan | Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Ditjen Bina Adwil | - Kemenko PMK - Bappenas - KemenATR/BPN - Kemen PUPR | 2021 |
| 9. | Hak Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Ditjen Keuda | - Kemenkeu - Kemenkumham - Setneg - Setkab | 2021 |
| 10. | Kewenangan Daerah Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang berciri Kepulauan | Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Ditjen Bina Bangda | - KKP - Setneg | 2021 |
| 11. | Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan | Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Ditjen Bina Adwil | - Bappenas - Kemenkeu - Setneg | 2020 |
| 12. | Tata Cara Pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Hak Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah | Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah | Ditjen Keuda | - Kemenkeu - Kemenkopolkam - Kemenkumham - Setneg | 2021 |
| C. Peraturan Presiden | | | | | |
| 1. | Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah | Untuk mengatur besaran dan pemberian tunjangan | Inspektorat Jenderal | - Kemenkeu - Kemenpan RB - Setneg - Setkab | 2022 |
| 2. | Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1. Peran Kemendagri sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Korbinwas Pemda) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 373 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 serta | - Biro Organisasi dan Tatalaksana Inspektorat Jenderal | - Seluruh Kementrian/Lembaga yang menangani urusan Pemerintahan Daerah - Setneg - Kemenkumham | 2022 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|-----------------------|---|---------------------|
| | | <p>dalam Pasal 11 Ayat (1), Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 24 PP No. 12 Tahun 2017 tentang Binwas Pemda.</p> <p>2. Saat ini di Era Otonomi Daerah, K/L terjun langsung ke Pemda dan Pemda terbang langsung ke K/L tanpa adanya koordinasi dengan Kemendagri.</p> <p>3. Kewenangan Kemendagri banyak diambil alih oleh K/L lain karena dari UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2017 belum dilakukan pembatasan kewenangan Kemendagri dalam 10 Aspek Binwas Umum, yaitu terkait dengan pembagian Urusan Pemerintahan, kelembagaan Daerah, kepegawaian pada Perangkat Daerah, keuangan Daerah, pembangunan Daerah, pelayanan publik di Daerah, kerja sama Daerah, kebijakan Daerah, kepala Daerah dan DPRD, serta bentuk pembinaan dan pengawasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Hal ini perlu di atur agar Korbinwas Pemda oleh Kemendagri memiliki batasan yang jelas dan terukur.</p> | | <ul style="list-style-type: none"> - Setkab - Kementerian Keuangan - Kemenkopolhukam | |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|---|--|--|---|--|---------------------|
| D. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun | | | | | |
| 1. | RPMDN tentang Pedoman Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah | Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan sebagai pedoman pemerintah daerah untuk menyusun peta proses bisnis | Biro Organisasi dan Tataaksana Sekretariat Jenderal | <ul style="list-style-type: none"> - Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Bina Bangda - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 2. | RPMDN tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kemendagri | Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan penyelenggaraan Kerja Sama Dalam Negeri Lingkup Kemendagri | Pusat Fasilitasi Kerja Sama Sekretariat Jenderal | <ul style="list-style-type: none"> - Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 3. | RPMDN tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkup Kementerian Dalam Negeri | Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan sebagai pedoman keprotokolan di Lingkup Kementerian Dalam Negeri | Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Jenderal | <ul style="list-style-type: none"> - Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 4. | RPMDN tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 5 (lima) Tahun | Amanat Pasal 12 ayat (4) PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Sekretariat Inspektorat Jenderal | <ul style="list-style-type: none"> - Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Bina Bangda - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 5. | RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan SDM | Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan SDM Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkup Kemendagri dan Pemda karena sudah | Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSDM | <ul style="list-style-type: none"> - Biro Kepegawaian - Setjen - Biro Hukum - Setjen - Kemenkumham | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|---|---|--|--|---------------------|
| | Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kemendagri dan Pemda | tidak sesuai dengan kondisi dan dalam rangka memperbaiki SDM Aparatur Berbasis Kompetensi | | | |
| 6. | RPMDN tentang Mekanisme Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan | Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan | Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Polpum | - Ditjen Otda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Bina Bangsa - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 7. | RPMDN tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2021 | Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Direktorat Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuda | - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Polpum - Ditjen Bina Bangsa - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham | 2020 |
| 8. | RPMDN tentang Pedoman Perjalanan Dinas Daerah | Tindak lanjut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Direktorat Perencanaan Anggaran Ditjen Bina Keuda | - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Polpum - Ditjen Bina Bangsa - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham | 2020 |
| 9. | RPMDN tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah | Tindak lanjut perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan | Direktorat Pertanggung jawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah | - Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|--|---|---------------------|
| 10. | RPMDN tentang Anggaran KAS dan SPD | Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Ditjen Bina Keuda Direktorat Pertanggung jawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda | - Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham | 2020 |
| 11. | RPMDN tentang Elektronifikasi Pelaksanaan Transaksi NonTunai | - SE Mendagri No.910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi non tunai pada Pemerintah Provinsi - SE Mendagri No.910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi non tunai pada Kabupaten/Kota | Direktorat Pertanggung jawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda | - Setjen - Kemenkeu - Kemenkumham | 2020 |
| 12. | RPMDN tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian | - Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara | Direktorat Pertanggung jawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda | - Setjen - BPJS Kesehatan - Kemenkumham | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|--|---|--|---|---------------------|
| 13. | RPMDN tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya | <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya | Direktorat Pertanggung jawab dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda | <ul style="list-style-type: none"> - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 14. | RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Ranperda PDRD | Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Ranperda PDRD serta sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Direktorat Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuda | <ul style="list-style-type: none"> - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 15. | RPMDN tentang Sistem Informasi Manajemen Polisi Pamong Praja | Amanat Pasal 32 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja | Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Adwil | <ul style="list-style-type: none"> - Setjen - Kemenkumham | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|--|--|---------------------|
| 16. | RPMDN tentang Logo, Bendera PATAKA dan Tata Upacara Satpol PP | Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memenuhi kebutuhan Norma Standar Prosedur Kriteria Satuan Polisi Pamong Praja | Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Ditjen Bina Adwil | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 17. | RPMDN tentang Penyusunan Instrumen Kelengkapan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Kebakaran dan Penyelamatan | Untuk memenuhi kebutuhan atas ditetapkannya PermenPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan fungsional Pemadam Kebakaran | Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 18. | RPMDN tentang Pedoman Kompetensi Peringkat Daerah Penyelenggara Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan | Untuk memenuhi kebutuhan Norma Standar Prosedur Kriteria Penyelenggaraan Pemadam Kebakaran | Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 19. | RPMDN tentang Standar Operasional Prosedur Investigasi Kejadian Kebakaran | Untuk memenuhi kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Investigasi Kejadian Kebakaran | Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 20. | RPMDN tentang Pedoman Pembinaan Organisasi Profesi Pelaksanaan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan | Untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai pedoman Pembinaan Organisasi Profesi Pelaksanaan Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan | Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil | - Setjen - Kemenkumham - Ditjen Otda | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|---|--|---|---------------------------|---------------------|
| 21. | RPMDN tentang Formasi Jabatan Fungsional urusan kebakaran | Untuk memenuhi kebutuhan atas ditetapkannya PermenPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2019 tentang Jabatan fungsional Pemadam Kebakaran | Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Ditjen Bina Adwil | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 22. | RPMDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan | Dalam rangka mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di daerah, diperlukan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan dan desa di seluruh Indonesia | Direktorat Toponimi dan Batas antar Daerah Ditjen Bina Adwil | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 23. | RPMDN tentang Pengembangan Kapasitas Bidang Pemerintahan Desa | Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pengembangan Kapasitas Bidang Pemerintahan Desa | Direktorat Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Ditjen Bina Pemes | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 24. | RPMDN tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa | Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | Direktorat Fasilitas Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Ditjen Bina Pemes | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|---|---|--|---------------------------|---------------------|
| 25. | RPMDN tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi | Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi | Pusat Data dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 26. | RPMDN tentang Tata Kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Tata Kelola Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 27. | RPMDN tentang Penghargaan ASN Kementerian Dalam Negeri | Dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam pemberian apresiasi terhadap ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 28. | RPMDN tentang Pola Karier di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan PNS yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistim prestasi kerja dan sistim karier | Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 29. | RPMDN tentang Manajemen Talenta Kementerian Dalam Negeri | Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengelolaan manajemen talenta ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 30. | RPMDN tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | Amanat Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain | Biro Keuangan dan Aset Sekretariat Jenderal | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|---|--|--|---------------------------|---------------------|
| 31. | RPMDN tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah | Dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagai Pedoman Pengelolaan Pengaduan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah | Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 32. | RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kehumasan | Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Kehumasan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan | Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 33. | RPMDN tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus dan Keistimewaan | Dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus dan Keistimewaan | Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD Ditjen Otonomi Daerah | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 34. | RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan | Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan | Direktorat Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Polpum | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 35. | RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca KTP-el | Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca KTP-el karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan | Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Ditjen Dukcapil | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|--|---|---|---------------------------|---------------------|
| 36. | RPMDN tentang Penduduk Pelintas Batas | Amanat Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | Direktorat Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 37. | RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non-Permanen | Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non-Permanen karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan | Direktorat Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 38. | RPMDN tentang Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas | Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas | Direktorat Pendaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 39. | RPMDN tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan | Amanat Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | Direktorat Bina Aparatur Ditjen Dukcapil | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|--|---|---|---|---------------------|
| 40. | RPMDN tentang Perencanaan Pembangunan di Desa | Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa | Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Desa Ditjen Bina Pemdes | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 41. | RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan | Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan | Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemdes | - Kementerian Keuangan - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 42. | RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa | Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan | Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa Ditjen Bina Pemdes | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 43. | RPMDN tentang Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Ditjen Bina Pemdes | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 44. | RPMDN tentang Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah | Tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Direktorat Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda | - Setjen - Kemenkumham - Kementerian Keuangan | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|--|---|---|--|---------------------|
| 45. | RPMDN tentang Barang Milik Daerah | Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah | Direktorat Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda | - Setjen - Kemenkumham - Kementerian Keuangan | 2020 |
| 46. | RPMDN tentang Insentif atas Kepala Daerah sebagai Wakil Pemegang Saham | Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah | Direktorat BMD, BUMD, dan BLUD Ditjen Bina Keuda | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 47. | RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dan Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah | Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan | Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan | - Setjen - Kemenkumham | 2020 |
| 48. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 49. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| 50. | RPMDN tentang Batas Daerah Kota Padang dengan Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 51. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 52. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 53. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 54. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggamus dengan Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 55. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Way Kanan dengan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| 56. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 57. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 58. | Batas Daerah antara Kota Dumai dengan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 59. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 60. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 61. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|---|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| 62. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Muara Enim dengan Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 63. | RPMDN tentang Batas Daerah Kota Prabumulih dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 64. | RPMDN tentang Batas Daerah antara Kabupaten Ogan Ilir dengan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 65. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Timur dengan Kabupaten Aceh Tengah di Aceh | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 66. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan Kabupaten Aceh Jaya di Aceh | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 67. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| 68. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 69. | RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Wajo Dengan Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 70. | RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bone Dengan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 71. | RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 72. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 73. | RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| 74. | RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Pasangkayu Dengan Kabupaten Mamuju tengah Provinsi Sulawesi Barat | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 75. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Dengan Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 76. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 77. | RPMDN tentang Batas Daerah Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Dengan Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 78. | RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Jombang Dengan Kabupaten Kediri Provinsi Jawa timur | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 79. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Jember Dengan Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa timur | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|---|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| 80. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Ponorogo Dengan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 81. | RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kota Banjarbaru Dengan Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 82. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Sanggau Dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 83. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Sintang Dengan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 84. | RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Dengan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan tengah | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 85. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| 86. | RPMDN tentang Batas Daerah Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 87. | RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Supiori Provinsi Papua | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 88. | RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 89. | RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Sumba Barat dengan Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 90. | RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |
| 91. | RPMDN tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Keerom dengan Kota Jayapura Provinsi Papua | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2020 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|---|--|--|---|---------------------|
| 2021 | | | | | |
| 92. | RPMDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan | Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya | 1. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2. Ditjen Pemerintahan Desa 3. Ditjen Otonomi Daerah | Kementerian Dalam Negeri | 2021 |
| 93. | RPMDN tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Kendaraan Bermotor | Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Ditjen Bina Keuangan Daerah | Kementerian Dalam Negeri | 2021 |
| 94. | RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | Bahwa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan Perintah Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | Ditjen Bina Keuangan Daerah | Ditjen Otda, Ditjen Bina Bangda, Ditjen Adwil | 2021 |
| 95. | RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 | Untuk Melaksanakan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang | Ditjen Bina Keuangan Daerah | Kementerian Dalam Negeri | 2021 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|-----|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| | | <p>Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> | | | |
| 96. | <p>RPMDN tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022</p> | <p>Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> | <p>Inspektoral Jenderal</p> | <p>Kementerian Negeri Dalam</p> | <p>2021</p> |
| 97. | <p>RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022</p> | <p>Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p> | <p>Ditjen Bina Pembangunan Daerah</p> | <p>Kementerian Negeri Dalam</p> | <p>2021</p> |
| 98. | <p>RPMDN tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021</p> | <p>Merupakan Permendagri Tahunan yang mengatur urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan</p> | <p>Biro Perencanaan</p> | <p>Kementerian Negeri Dalam</p> | <p>2021</p> |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| | | ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu melaksanakan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. | | | |
| 99. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 100. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 101. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 102. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 103. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| 104. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 105. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 106. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 107. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 108. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 109. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| 110. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 111. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 112. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 113. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 114. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 115. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|---|---|--------------------------------------|--|---------------------|
| 116. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 117. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 118. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 119. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2021 |
| 120. | RPMDN tentang Perubahan Permendagri No. 135 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah | 1. Terjadi perubahan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional diantaranya terkait dengan perubahan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), perubahan komposisi penilaian dan perubahan target capaian reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah. 2. Kemendagri sebagai Korbinwas Pemda perlu melakukan upaya strategis dalam rangka Percepatan | | - | |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|--|---------------------------------|---|---------------------|
| 121. | RPMDN tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah | <p>Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (PPRB Pemda), utamanya dikaitkan dengan Reformasi Birokrasi dibidang manajemen perubahan, kelembagaan, tatalaksana, peningkatan pelayanan publik, pengawasan, deregulasi peraturan daerah, akuntabilitas kinerja, serta kepegawaian pada perangkat daerah untuk menuju <i>merit system</i>.</p> <p>Simplifikasi terhadap Permendagri No. 4 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Kemendagri dan Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP di Lingkungan Pemda menjadi 1 (satu) Permendagri tentang SOP di Lingkungan Kemendagri dan Pemda.</p> | Biro Organisasi dan Tatalaksana | <ul style="list-style-type: none"> - Seluruh Unit Kerja di Lingkungan Kemendagri - Kemenkumham | 2021 |
| 122. | RPMDN tentang Perubahan atas Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah | <p>Merubah Permendagri No. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemda terkait pembagian kewenangan antara Kemendagri dan ANRI terkait Tata Naskah Dinas Pemda.</p> <p>Penyusunan Budaya Kerja Pemerintah Daerah merupakan mandat dari Program Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.</p> | Biro Organisasi dan Tatalaksana | <ul style="list-style-type: none"> - Itjen - Setjen - Ditjen Otda - ANRI - Kemenkumham | 2021 |
| 123. | RPMDN tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja di Pemerintah Daerah | <p>Penyusunan Budaya Kerja Pemerintah Daerah merupakan mandat dari Program Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024 sebagaimana di atur dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.</p> | Biro Organisasi dan Tatalaksana | <ul style="list-style-type: none"> - Ditjen Otda - Itjen - Setjen - Kemenkumham | 2021 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|---|--|---------------------------------|--|---------------------|
| 124. | RPMDN tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisa Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah | Belum disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta PP No. 11 Tahun 2017 Jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa dalam menentukan jumlah dan jenis jabatan perlu disusun Analisa Jabatan sebagai dasar penataan SDM, besaran kelembagaan dan kebutuhan diklat aparatur. | Biro Organisasi dan Tatalaksana | <ul style="list-style-type: none"> - Setjen - Kemenpan RB - Ditjen Ottda - Kemenkumham | 2021 |
| 125. | RPMDN Perubahan atas PMDN Nomor 12 Tahun 2008 tentang Analisa Beban Kerja di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah | Belum disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta PP No. 11 Tahun 2017 Jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa dalam menentukan jumlah dan jenis jabatan perlu disusun Analisa Beban Kerja sebagai dasar penataan SDM, besaran kelembagaan dan kebutuhan diklat. | Biro Organisasi dan Tatalaksana | <ul style="list-style-type: none"> - Setjen - Kemenpan RB - Ditjen Ottda - Kemenkumham | 2021 |
| 126. | RPMDN tentang Indeks Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah | Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan revitalisasi Peran Kemendagri dalam Korbinwas Pemda sebagai amanat UU No. 23 Tahun 2014 dan PP No. 12 Tahun 2017 | Biro Organisasi dan Tatalaksana | <ul style="list-style-type: none"> - Itjen - Setjen - Ditjen Ottda - Kemenkumham | 2021 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|---|---|--|---------------------|
| 127. | RPMDN tentang Pelayanan Administrasi dan Konsultasi <i>Online</i> di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri | Dalam rangka percepatan pelayanan publik dan memacu inovasi pelayanan publik dalam rangka mendukung Program Reformasi Birokrasi Kemendagri 2020-2024. | Biro Organisasi dan Tatalaksana | - Setjen - Itjen - Kemenkumham | 2021 |
| 128. | RPMDN tentang Pendidikan dan Pelatihan Pemadam Kebakaran | Dalam rangka meningkatkan SDM yang berkualitas dan profesional di bidang Penanggulangan Pemadam Kebakaran | Pusat Pengembangan Kompetensi dan Fungsional dan Teknis BPSDM | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | 2021 |
| 129. | RPMDN tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah | Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan serta mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah | Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis BPSDM | - Ditjen Ottda - Ditjen Bina Keuda - Ditjen Polpum - Ditjen Bina Bangsa - Ditjen Bina Adwil - Itjen Kemendagri - Setjen - Kemenkumham | 2021 |
| 130. | RPMDN tentang Pembinaan Pelaksanaan Inovasi di Pemerintahan Daerah | - Mengatur substansi terkait replikasi inovasi daerah - merubah PMDN Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan | Pusat Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah | - | 2021 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|--|--|---------------------------|---------------------|
| | | Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah | Badan Penelitian dan Pengembangan | | |
| 131. | RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2014 tentang Upacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda IPDN karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan | Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2014 tentang Upacara Pelantikan Muda Praja dan Pamong Praja Muda IPDN karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan | Biro Administrasi Keprajaan dan Alumni IPDN | - Setjen - Kemenkumham | 2021 |
| 132. | RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta IPDN | Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta IPDN karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan | Biro Administrasi dan Kerjasama dan Hukum | - Setjen - Kemenkumham | 2021 |
| 133. | RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN | Merubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN karena sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan | Biro Administrasi dan Kerjasama dan Hukum | - Setjen - Kemenkumham | 2021 |
| 2022 | | | | | |
| 134. | RPMDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan | Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya | 1. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2. Ditjen Pemerintahan Desa 3. Ditjen Otonomi Daerah | Kementerian Dalam Negeri | 2022 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|---|---|-----------------------------|--|---------------------|
| 135. | RPMDN tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Kendaraan Bermotor | Merupakan Perundang-undangan yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Ditjen Keuangan Daerah | Kementerian Negeri Dalam | 2022 |
| 136. | RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | Bahwa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan Perintah Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | Ditjen Bina Keuangan Daerah | Ditjen Otda, Ditjen Bina Bangda, Ditjen Bina Adwil | 2022 |
| 137. | RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 | Untuk Melaksanakan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Ditjen Keuangan Daerah | Kementerian Negeri Dalam | 2022 |
| 138. | RPMDN tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 | Merupakan Perundang-undangan yang melaksanakan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan | Inspektorat Jenderal | Kementerian Negeri Dalam | 2022 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|---|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 139. | RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 | <p>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>Merupakan Perundang-undangan yang dilaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p> | Ditjen Bina Pembangunan Daerah | Kementerian Negeri Dalam | 2022 |
| 140. | RPMDN tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2022 | <p>Merupakan Perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu melaksanakan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.</p> | Biro Perencanaan | Kementerian Negeri Dalam | 2022 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| 141. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 142. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 143. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 144. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 145. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 146. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 147. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| | | Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | | - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | |
| 148. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 149. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 150. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 151. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 152. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 153. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| | | | | - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | |
| 154. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 155. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 156. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 157. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 158. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 159. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|--|---|--|---------------------|
| | | | | - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | |
| 160. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 161. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 162. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 163. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2022 |
| 164. | RPMDN tentang Rencana Induk Pengembangan IPDN | mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pengembangan Institut Pemerintahan Dalam Negeri karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika peraturan perundang-undangan | Biro Administrasi Perencanaan dan Akademik IPDN | - Setjen - Kemenkumham | 2022 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|---|--|---|--------------------------|---------------------|
| 2023 | | | | | |
| 165. | RPMDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan | Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya | 1. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 2. Ditjen Bina Pemerintahan Desa 3. Ditjen Otonomi Daerah | Kementerian Dalam Negeri | 2023 |
| 166. | RPMDN tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Kendaraan Bermotor | Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Ditjen Bina Keuangan Daerah | Kementerian Dalam Negeri | 2023 |
| 167. | RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | Bahwa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan Perintah Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | Ditjen Bina Keuangan Daerah | Kementerian Dalam Negeri | 2023 |
| 168. | RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 | Untuk Melaksanakan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang | Ditjen Bina Keuangan Daerah | Kementerian Dalam Negeri | 2023 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|---|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | | | |
| 169. | RPMDN tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 | Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Inspektoral Jenderal | Kementerian Negeri Dalam | 2023 |
| 170. | RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 | Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah | Ditjen Bina Pembangunan Daerah | Kementerian Negeri Dalam | 2023 |
| 171. | RPMDN tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 | Merupakan Permendagri Tahunan yang mengatur urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan | Biro Perencanaan | Kementerian Negeri Dalam | 2023 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| | | ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu melaksanakan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. | | | |
| 172. | RPMDN tentang Kebutuhan Formasi Praja IPDN | Dalam rangka memenuhi kebutuhan pengaturan terkait Kebutuhan Formasi Praja IPDN | IPDN | - Setjen - Kemenkumham | 2023 |
| 173. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 174. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 175. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 176. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 177. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| | | Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | | - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | |
| 178. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 179. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 180. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 181. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 182. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 183. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| | | | | - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | |
| 184. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 185. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 186. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 187. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 188. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 189. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|---|--|---|--|---------------------|
| 190. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Direktorat Toponimi Angkatan Darat - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 191. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 192. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2023 |
| 2024 | | | | | |
| 193. | RPMDN tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan | Merupakan Permendagri Tahunan yang perlu disesuaikan berdasarkan hasil pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, terdapat beberapa perubahan nama kabupaten, penataan kecamatan, kelurahan dan desa, perubahan nama kecamatan, perubahan redaksional nama kecamatan, kelurahan dan desa atau sebutan lainnya | 4. Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan 5. Ditjen Bina Pemerintahan Desa 6. Ditjen Otonomi Daerah | Kementerian Dalam Negeri | 2024 |
| 194. | RPMDN tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan Dasar Pengenaan | Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 | Ditjen Bina Keuangan Daerah | Kementerian Dalam Negeri | 2024 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|---|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------|
| | Pajak Kendaraan Bermotor dan Biaya Balik Kendaraan Bermotor | tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | | | |
| 195. | RPMDN tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | Bahwa Menteri berwenang untuk Mengintegrasikan dan Menyelaraskan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, Kebijakan dan Perintah Peraturan Perundang-undangan sehingga perlu melakukan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah | Ditjen Bina Keuangan Daerah | Kementerian Dalam Negeri | 2024 |
| 196. | RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 | Untuk Melaksanakan Kebijakan dan Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 308 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Ditjen Bina Keuangan Daerah | Kementerian Dalam Negeri | 2024 |
| 197. | RPMDN tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 | Merupakan Permendagri Tahunan yang melaksanakan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Inspektorat Jenderal | Kementerian Dalam Negeri | 2024 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|---|--|---------------------------------|--|---------------------|
| 198. | RPMDN tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 | Merupakan Perundang-undangan yang dilaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah | Ditjen Bina Pembangunan Daerah | Kementerian Negeri Dalam | 2024 |
| 199. | RPMDN tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024 | Merupakan Perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintahan lingkup Kementerian Dalam Negeri yang akan dilimpahkan kepada gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota perlu melaksanakan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. | Biro Perencanaan | Kementerian Negeri Dalam | 2024 |
| 200. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| 201. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 202. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 203. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 204. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 205. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 206. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| 207. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 208. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 209. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 210. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 211. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 212. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| 213. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 214. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 215. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 216. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 217. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 218. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | - Badan Informasi Geospasial - Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian | Unit Penanggung jawab | Unit Terkait/Institusi | Target Penyelesaian |
|------|--|--|--------------------------------------|--|---------------------|
| 219. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 220. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |
| 221. | RPMDN tentang Batas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pembentukan Daerah. | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | – Badan Informasi Geospasial – Direktorat Toponimi Angkatan Darat | 2024 |

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN





LAMPIRAN II TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

LAMPIRAN II
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGE T | | | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|--------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|------------|----|--|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 010 | KEMENTERIAN DALAM NEGERI | | | | | | | 4.408.972 | 6.582.391 | 7.423.757 | 8.801.302 | 12.491.579 | | | | |
| | | Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia | 77,36 | 77,72 | 78,06 | 78,37 | 78,66 | | | | | | | | | |
| | | 1 Indeks Demokrasi Indonesia | 77,5% (Pilkada) | - | - | - | 79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024) | | | | | | | | | |
| | | 2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilukada dan Pemilu | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 Indeks Kinerja Ormas | .* | Nilai 60 | Nilai 62 | Nilai 65 | Nilai 70 | | | | | | | | | |
| | | Sasaran Strategis 2 Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi | Nilai 2,38 | Nilai 2,385 | Nilai 2,39 | Nilai 2,395 | Nilai 2,40 | | | | | | | | | |
| | | 2 Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) | 67,1 | 67,2 | 67,3 | 67,4 | 67,5 | | | | | | | | | |
| | | 3 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi | Nilai 2,865 | Nilai 2,870 | Nilai 2,875 | Nilai 2,880 | Nilai 2,885 | | | | | | | | | |
| | | 4 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya | Nilai 2,310 | Nilai 2,315 | Nilai 2,320 | Nilai 2,325 | Nilai 2,330 | | | | | | | | | |
| | | Sasaran Strategis 3 Meningkatnya kewaspadaan nasional | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Indeks Kewaspadaan Nasional | .* | .* | 62 | 63 | 64 | | | | | | | | | |
| | | Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori "Baik" | .* | .* | 50 Daerah | 100 Daerah | 150 Daerah | | | | | | | | | |
| | | 2 Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas | .* | .* | Nilai 20 | Nilai 40 | Nilai 60 | | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|---|---|---|---|--|------|-----------------------------|------|------|------|----|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 7 Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | -* | 18% | 24% | 30% | 36% | | | | | | | | |
| | | 8 Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori "utama" | 55 Daerah | 82 Daerah | 110 Daerah | 137 Daerah | 165 Daerah | | | | | | | | |
| | | 9 Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah | Nilai 80 | Nilai 85 | Nilai 90 | Nilai 100 | Nilai 100 | | | | | | | | |
| | | 10 Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah | -* | Nilai 75 (B) | Nilai 80 (B) | Nilai 85 (B) | Nilai 90 (A) | | | | | | | | |
| | | Sasaran Strategis 8 Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil | 90% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan | 92% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan | 94% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan | 97% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan | 100% cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi yang melaporkan | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani Kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif) | 1.923 Lembaga Pengguna | 2.223 Lembaga Pengguna | 2.523 Lembaga Pengguna | 2.873 Lembaga Pengguna | 3.123 Lembaga Pengguna | | | | | | | | |
| | | Sasaran Strategis 9 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan | -* | -* | Nilai 20 | Nilai 40 | Nilai 60 | | | | | | | | |
| | | Sasaran Strategis 10 Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri | Nilai 85,01 | Nilai 87,01 | Nilai 89,01 | Nilai 91,01 | Nilai 93,01 | | | | | | | | |
| | | Sasaran Strategis 11 Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|--------|----------------------|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|------|-----------------------------|------|------|------|---|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 1 Indeks Pengawasan Internal | Nilai 80 | Nilai 85 | Nilai 90 | Nilai 100 | Nilai 100 | | | | | | | |
| | | 2 Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus | Nilai 80 | Nilai 81 | Nilai 82 | Nilai 83 | Nilai 85 | | | | | | | |
| | | Sasaran Strategis 12 Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase hasil kelibangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kementerian Dalam Negeri | 40% | 45% | 55% | 60% | 65% | | | | | | | |
| 010.01 | | PROGRAM PEMBIAYAAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM | 184.460 | 793.230 | 824.730 | 840.230 | 859.230 | | | | | | | |
| | | Sasaran Program 1 Meningkatnya Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Lembaga Demokrasi | | | | | | | | | | | Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | |
| | | 1 Indeks Demokrasi Indonesia | 77,36 | 77,72 | 78,06 | 78,37 | 78,66 | | | | | | | |
| | | 2 Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu | 77,5% (Pilkada) | - | - | - | 79,5% (Target dalam Pemilu sesuai RPJMN 2020-2024) | | | | | | | |
| | | 3 Indeks Kinerja Ormas | -* | Nilai 60 | Nilai 62 | Nilai 65 | Nilai 70 | | | | | | Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | |
| | | Sasaran Program 2 Simpul Strategis Pembumih Puncasia Berjalan Optimal | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Indeks Ketahanan Nasional Gatra, Ideologi | Nilai 2,38 | Nilai 2,385 | Nilai 2,39 | Nilai 2,395 | Nilai 2,40 | | | | | | | |
| | | 2 Indeks Capaian Revolusi Mental (ICRM) | 67,1 | 67,2 | 67,3 | 67,4 | 67,5 | | | | | | | |
| | | 3 Indeks Ketahanan Nasional Gatra, Ekonomi | Nilai 2,865 | Nilai 2,870 | Nilai 2,875 | Nilai 2,880 | Nilai 2,885 | | | | | | | |
| | | 4 Indeks Ketahanan Nasional Gatra, Sosial Budaya | Nilai 2,310 | Nilai 2,315 | Nilai 2,320 | Nilai 2,325 | Nilai 2,330 | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|----|--------------------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | |
| | | Sasaran Program 3 Aparatur Pusat dan Daerah, Timbu Penanganan Konflik Sosial yang Mampu Melaksanakan secara Optimal Deteksi Dini dan Cegah Dini Serta Pengawasan Ormas Asing dan Lembaga Asing | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah secara efektif | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah aparatur pusat dan daerah yang mampu melaksanakan deteksi dini dan cegah dini | 600 Orang | 2.000 Orang | 2.200 Orang | 2.400 Orang | 3.000 Orang | | | | | | | | |
| 1231 | | Peminaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan | | | | | | 12.641 | 25.500 | 49.500 | 55.500 | 61.500 | | Direktorat Organisasi Kemasyarakatan | |
| | | Meningkatnya sinergi kemitraan Ormas dengan Pemerintah | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah kebijakan/peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang organisasi kemasyarakatan yang diterbitkan | 2 Regulasi | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah tim terpadu pengawasan ormas di daerah yang terbentuk | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah daerah yang melakukan pelayanan dan pengawasan ormas secara efektif | 51 Daerah | 151 Daerah | 251 Daerah | 351 Daerah | 451 Daerah | | | | | | | | |
| | | 4 Indeks Kinerja Ormas | -* | Nilai 60 | Nilai 62 | Nilai 65 | Nilai 70 | | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah pengurus Ormas yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik | 400 orang | 1.800 orang | 3.000 orang | 3.300 orang | 4.200 orang | | | | | | | | |
| | | 6 Jumlah komunikasi dan koordinasi nasional Ormas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|---|--|--------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------------------------------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1232 | Fasilitasi Politik Dalam Negeri | Meningkatnya kualitas sistem politik dalam negeri | 9 Parpol | 9 Parpol | 9 Parpol | 9 Parpol | 9 Parpol | 9 Parpol | 713.730 | 716.730 | 719.730 | 721.730 | Direktorat Politik Dalam Negeri | | |
| | | 1 Jumlah Partai Politik yang ditingkatkan kapasitasnya sebagai pilar demokrasi | 9 Daerah | 10 Daerah | 12 Daerah | 14 Daerah | 16 Daerah | 16 Daerah | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah komunikasi dan koordinasi sosial politik | 77,36 | 77,72 | 78,06 | 78,37 | 78,66 | 78,66 | | | | | | | |
| | | 3 Indeks Demokrasi Indonesia | 77,5% (Pilkada) | - | - | - | 79,5% (Pemilu) | | | | | | | | |
| | | 4 Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada dan Pemilu | 3.000 orang | 5.000 orang | 6.000 orang | 8.000 orang | 10.000 orang | 10.000 orang | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah masyarakat yang mendapat pendidikan politik | 100 Orang | 200 Orang | 500 Orang | 700 Orang | 800 Orang | 800 Orang | | | | | | | |
| | | 6 Jumlah pengurus Parpol yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan pendidikan politik | | | | | | | | | | | | | |
| 1233 | Fasilitasi ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya | Memperkuat ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | - | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 8.001 | 10.749 | 12.000 | 13.000 | 14.000 | Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya | |
| | | 1 Jumlah rumusan peraturan dan pedoman lainnya bidang ketahanan ekonomi sosial dan budaya | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah daerah dengan penguatan tata kelola ketahanan ekonomi | 3 Provinsi | 5 Provinsi | 7 Provinsi | 9 Provinsi | 10 Provinsi | 10 Provinsi | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah daerah yang melaksanakan P4GN dan PN | 15 Daerah | 20 Daerah | 25 Daerah | 30 Daerah | 35 Daerah | 35 Daerah | | | | | | | |
| | | 4 Penguatan Nilai Seni dan Budaya | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah daerah yang kerukunan umat beragamanya meningkat | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|--|---|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1235 | Bina Ideologi, Karakter dan wawasan kebangsaan | Meningkatnya implementasi nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa dalam bingkai NKRI | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 10.888 | 15.751 | 17.500 | 17.700 | 18.500 | Direktorat Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan | | |
| | | 1 Jumlah Kebijakan/Peraturan/pedoman bidang pembinaan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,08 | 4,09 | | | | | | | | |
| | | 2 Nilai variabel nasionalisme gatra ideologi indeks ketahanan nasional | 25 Daerah | 30 Daerah | 34 Daerah | - | - | | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah daerah yang membentuk gugus tugas GNRM | | | | | | 15.008 | 27.500 | 29.000 | 34.300 | 43.500 | Direktorat Kewaspadaan Nasional | | |
| 1234 | Fasilitasi Kewaspadaan Nasional | Meningkatnya kapasitas daerah dalam penyelenggaraan kewaspadaan nasional | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah kebijakan/regulasi/pedoman bidang kewaspadaan nasional dan konflik sosial | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah penanganan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial seluruh Indonesia | 34 Daerah | 34 Daerah | 34 Daerah | 34 Daerah | 34 Daerah | | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah aparaturnya pusat dan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini | 600 orang | 2.000 orang | 2.200 orang | 2.400 orang | 3.000 orang | | | | | | | | |
| | | 4 Persentase Timdu PKS Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 5 Jumlah rekomendasi izin penelitian Lembaga Asing dan orang asing yang diterbitkan secara tertib | 4 470 | 5 470 | 6 470 | 7 470 | 8 470 | 9 470 | 10 470 | 11 470 | 12 470 | 13 470 | 14 |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|--------|---|---|--------|--------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 010.02 | PROGRAM PEMBINAAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAERAH DAN DESA | | | | | | | 696.652 | 2.077.506 | 2.663.272 | 3.567.887 | 5.706.906 | | |
| | | Sasaran Program 1 Meningkatnya Tertib Administrasi Kewilayahan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi dan Terpadu, Kinerja Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, serta Pengelolaan Kawasan dan Perbatasan Negara | | | | | | | | | | | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | |
| | | 1 Jumlah Provinsi dengan Indeks Kinerja Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat kategori "Baik" | -* | -* | 10 Provinsi | 20 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 2 Persentase daerah yang segmen batasnya dan pembakuan rupa buminya terintegrasi dengan informasi geospasial | - | 51,95% | 58,81% | 61,48% | 66,34% | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah daerah dengan Indeks penyelenggaraan pelayanan perkotaan kategori "Baik" | -* | -* | 5 Kota | 10 Kota | 15 Kota | | | | | | | |
| | | 4 Persentase daerah dengan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu | - | 14% | 28% | 43% | 58% | | | | | | | |
| | | 5 Persentase jumlah kecamatan dengan indeks kinerja kategori "Baik" | -* | -* | 10% | 15% | 20% | | | | | | | |
| | | Sasaran Program 2 Terwujudnya Manajemen Bencana yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan Pelayanan Damkar Sesuai Standar | | | | | | | | | | | Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | |
| | | 1 Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas suburusan bencana | -* | -* | > 60 | > 65 | > 70 | | | | | | | |
| | | 2 Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas suburusan trantibum | -* | -* | > 60 | > 65 | > 70 | | | | | | | |
| | | 3 Indeks penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat | -* | -* | > 60 | > 65 | > 70 | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------|------|------|------|----|--------------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 4 Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas suburusan kebakaran | -* | -* | > 60 | > 65 | > 70 | | | | | | | | |
| | | Sasaran Program 3 Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Jujur, Bersih, dan Transparan | | | | | | | | | | | | Ditjen Otonomi Daerah | |
| | | 1 Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 8 Provinsi dan 172 Kabupaten/ Kota | 10 Provinsi dan 203 Kabupaten/ Kota | 12 Provinsi dan 234 Kabupaten/ Kota | 14 Provinsi dan 234 Kabupaten/ Kota | 16 Provinsi dan 234 Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah daerah yang memiliki Indeks Kinerja KDH dan DPRD Tinggi | -* | 50 Daerah | 75 Daerah | 100 Daerah | 125 Daerah | | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah daerah yang telah ditata kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerahnya sesuai peraturan perundang-undangan | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | | |
| | | 4 Persentase keberhasilan penerapan regulasi otsus/keistimewaan penataan daerah otonom baru dan DPOD | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | | | | | | | | |
| | | Sasaran program 4 Meningkatnya Produk Hukum Daerah Secara Efektif dan Efisien dalam Rangka Mencapai Tujuan Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | Ditjen Otonomi Daerah | |
| | | 1 Jumlah Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum | -* | 20 Provinsi | 25 Provinsi | 30 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | | |
| | | Sasaran Program 5 Meningkatnya Kualitas Pembangunan Daerah yang Merupakan Perwujudan dari Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Sebagai Bagian Integral dari Pembangunan Nasional | | | | | | | | | | | | Ditjen Bina Pembangunan Daerah | |
| | | 1 Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah | -* | Nilai 50 | Nilai 60 | Nilai 80 | Nilai 100 | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------|------|------|------|--------------------------------------|------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 270 Daerah | 350 Daerah | 450 Daerah | 500 Daerah | 548 Daerah | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 2 Jumlah daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional | 18 Provinsi | 22 Provinsi | 28 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan berdasarkan hasil evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah | 5% | 20% | 35% | 60% | 100% | | | | | | | |
| | | 4 Persentase SDM pemerintah daerah bidang manajemen pembangunan daerah sesuai rasio | 30% | 50% | 70% | 80% | 100% | | | | | | | |
| | | 5 Persentase capaian penerapan SPM di daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | Sasaran Program 6 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien | | | | | | | | | | | Ditjen Bina Pemerintahan Desa | |
| | | 1 Jumlah aparatur/pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi dalam tatakelola pemdes | 5997 Orang 7.496 Pengurus LKD | 5997 Orang 7.496 Pengurus LKD | 5997 Orang 7.496 Pengurus LKD | 5997 Orang 7.496 Pengurus LKD | 5997 Orang 7.496 Pengurus LKD | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata kelembagaan desanya sesuai standar | 100 Kabupaten/Kota 1000 Desa | 150 Kabupaten/Kota 2500 Desa | 200 Kabupaten/Kota 5000 Desa | 250 Kabupaten/Kota 7500 Desa | 300 Kabupaten/Kota 10000 Desa | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah Kabupaten/Kota yang desanya telah ditata sistem pelayanan administrasi kelembagaan desa sesuai standar | 100 Kabupaten/Kota 1000 Desa | 150 Kabupaten/Kota 2500 Desa | 200 Kabupaten/Kota 5000 Desa | 250 Kabupaten/Kota 7500 Desa | 300 Kabupaten/Kota 10000 Desa | | | | | | | |
| | | Sasaran Program 7 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel | | | | | | | | | | | | Ditjen Bina Keuangan Daerah |
| | | 1 Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah | Nilai:36 | Nilai 36,25 | Nilai 36,50 | Nilai 36,75 | Nilai 37 | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------------------------|------|------|------|----|---|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Badan Penelitian dan Pengembangan | |
| | | Sasaran Program 8 Meningkatnya Kemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Rujukan Utama dalam Penataan Kebijakan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri | 40% | 45% | 55% | 60% | 65% | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase hasil kelibangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sasaran Program 9 Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah | | | | | | | | | | | | | Badan Penelitian dan Pengembangan |
| | | 1 Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi | - | 18% | 24% | 30% | 36% | | | | | | | | |
| | | Sasaran Program 10 Meningkatnya Kualitas Standard dan Kompetensi Pengembangan Pemerintahan dalam Negeri | | | | | | | | | | | | Badan Pengembangan SDM | |
| | | 1 Jumlah standard pengembangan kompetensi pemerintahan dalam negeri yang berkualitas | 9 NSPK | 50 NSPK | 55 NSPK | 65 NSPK | 78 NSPK | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah peningkatan kompetensi SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dan berdaya saing | 275 Angkatan | 372 Angkatan | 491 Angkatan | 606 Angkatan | 702 Angkatan | | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah Pejabat Strategis Pemerintahan Dalam Negeri yang Tersertifikasi | 1.000 Orang | 6.125 Orang | 10.205 Orang | 12.260 Orang | 14.320 Orang | | | | | | | | |
| | | 4 Persentase Pembangunan Database (basis data) SDM ASN | 2% | 50% | 70% | 85% | 100% | | | | | | | | |
| | | 5 Persentase peningkatan sarana dan prasarana BPSDM | 39% | 60% | 77% | 90% | 100% | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|-----------|---|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 1237 | 2 Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta kerjasama daerah | 3 Meningkatnya kinerja GWPP, dekonstruksi dan tugas pembantuan, penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dan terpadu | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Direktorat Dekonstruksi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama |
| | | 1 Sekretariat Bersama pembinaan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat | 1 Sekretariat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2 Jumlah Provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan | - | 33 Provinsi | 33 Provinsi | 33 Provinsi | 33 Provinsi | 33 Provinsi | 33 Provinsi | 33 Provinsi | 33 Provinsi | 33 Provinsi | 33 Provinsi | |
| | | 3 Jumlah Tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan kinerja baik | 8 Tugas dan Wewenang | 16 Tugas dan Wewenang | 22 Tugas dan Wewenang | 22 Tugas dan Wewenang | 22 Tugas dan Wewenang | 22 Tugas dan Wewenang | 22 Tugas dan Wewenang | 22 Tugas dan Wewenang | 22 Tugas dan Wewenang | 22 Tugas dan Wewenang | 22 Tugas dan Wewenang | |
| | | 4 Jumlah Daerah yang melimpahkan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan kepada camat | 30 Kabupaten/ Kota | 40 Kabupaten/ Kota | 50 Kabupaten/ Kota | 50 Kabupaten/ Kota | 50 Kabupaten/ Kota | 50 Kabupaten/ Kota | 50 Kabupaten/ Kota | 50 Kabupaten/ Kota | 50 Kabupaten/ Kota | 50 Kabupaten/ Kota | 50 Kabupaten/ Kota | |
| | | 5 Jumlah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | |
| | | 6 Daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dengan daerah | 5 Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | 7 Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah | 10 Daerah | 48 daerah | 51 daerah | 83 daerah | 86 daerah | 86 daerah | 86 daerah | 86 daerah | 86 daerah | 86 daerah | 86 daerah | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|-------------|-------------|------------|------------|------------|----------|-----------------------------|------|------|------|----|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 8 Jumlah daerah yang dimonitoring pelaksanaan kerjasamanya | - | 7 daerah | 7 daerah | 7 daerah | 7 daerah | 7 daerah | | | | | | |
| | | 9 Program/kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan per UU | 30 DKTP | - | - | - | - | - | | | | | | |
| | | 10 Jumlah K/L yang menyelenggarakan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | - | 10 K/L | 10 K/L | 10 K/L | 10 K/L | 10 K/L | | | | | | |
| | | 11 Jumlah perizinan dengan kewenangan sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik | 29604 izin | 33393 izin | 36937 izin | 40829 izin | 45098 izin | | | | | | | |
| | | 12 Jumlah Daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik | 34 Provinsi | 75 Daerah | 74 Daerah | 76 Daerah | 76 Daerah | | | | | | | |
| | | 13 Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat Provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya | - | 34 daerah | 2 daerah | 2 daerah | 2 daerah | | | | | | | |
| | | 14 Jumlah daerah yang mengintegrasikan perjanjian kerjasamanya ke dalam dokumen perencanaan | - | 18 daerah | 18 daerah | 18 daerah | 18 daerah | | | | | | | |
| | | 15 Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP | - | 3 kerjasama | - | - | - | | | | | | | |
| | | 16 Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah | - | 4 daerah | 1 daerah | - | - | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1238 | Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara | Meningkatnya kualitas pengelolaan kawasan khusus, perkotaan dan batas negara, serta pertahanan | 6 Kawasan | 6 Kawasan | 6 Kawasan | 6 Kawasan | 6 Kawasan | 6 Kawasan | 6 Kawasan | 6 Kawasan | 6 Kawasan | 6 Kawasan | 6 Kawasan | 6 Kawasan | |
| | | 1 Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan khusus bagi kepentingan strategis Nasional | -* | -* | 5 Kota | 10 Kota | 15 Kota | 9.568 | 63.925 | 70.416 | 74.715 | 79.424 | Direktorat Kawasan Perkotaan dan Batas Negara | | |
| | | 2 Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Pelayanan Perkotaan kategori "Baik" | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara | Kesepakatan | Kesepakatan | Kesepakatan | Kesepakatan | Kesepakatan | | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah kesepakatan survei batas antar negara RI-Malaysia | - | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah daerah yang menerima bantuan Sarpras pemerintahan di kawasan perbatasan negara dan PPKT | - | 10 daerah | 10 daerah | 10 daerah | 10 daerah | | | | | | | | |
| | | 6 Jumlah permasalahan dan konflik pertanahan di daerah yang ditangani | 15 kasus | 20 kasus | 20 kasus | 25 kasus | 25 kasus | | | | | | | | |
| | | 7 Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik | - | - | 10 daerah | 10 daerah | 10 daerah | | | | | | | | |
| | | 8 Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 Kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah) | - | 16 daerah | 154 daerah | 186 daerah | 211 daerah | | | | | | | | |
| | | 9 Jumlah NSPK di bidang kawasan, perkotaan dan batas negara | 2 NSPK | 2 NSPK | 2 NSPK | 2 NSPK | 2 NSPK | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|----|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 10 Jumlah Provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara | - | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | | | | | | | | |
| | | 11 Jumlah daerah dengan PPKT berpenduduk yang dilakukan pembinaan Kewilayahan (Pemerintahan | - | 10 daerah | 10 daerah | 11 daerah | 11 daerah | | | | | | | | |
| 1241 | | Penataan Wilayah administrasi, Penegasan Batas Daerah dan Toponimi | | | | | | 10.201 | 21.533 | 23.366 | 27.292 | 23.746 | | Direktorat Toponimi dan Batas Daerah | |
| | | Peningkatan tertib wilayah administrasi pemerintahan dan pemanfaatan data kewilayahan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah NSPK di bidang Toponimi dan batas daerah | 1 NSPK | 1 NSPK | 1 NSPK | 1 NSPK | 1 NSPK | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah Daerah yang telah definitif batas daerahnya | 3 Daerah | 8 Daerah | 16 Daerah | 22 Daerah | 24 Daerah | | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah daerah yang membakukan unsur rupabumi | 40 Daerah | 40 Daerah | 40 Daerah | 40 Daerah | 40 Daerah | | | | | | | | |
| | | 4 Pemutakhiran kode dan data wilayah administrasi kewilayahan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah segmen batas antar daerah yang ditetapkan dengan Permendagri | 50 Segmen | 50 Segmen | 50 Segmen | 50 Segmen | 50 Segmen | | | | | | | | |
| | | 6 Jumlah daerah yang diintegrasikan segmen batasnya dengan informasi geospasial | - | 10 Provinsi | 10 Provinsi | 14 Provinsi | - | | | | | | | | |
| | | 7 Jumlah K/L yang mengintegrasikan data wilayah administrasi kewilayahan | - | - | 5 K/L | 10 K/L | 12 K/L | | | | | | | | |
| 1239 | | Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat | | | | | | 16.919 | 72.836 | 79.799 | 87.459 | 95.885 | | Direktorat Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat | |
| | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan Satpol PP sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase daerah dengan manajemen SDM satpol PP dengan kategori baik | 517 orang | 10% | 20% | 30% | 40% | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|---------------------------------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----|---|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 2 | Persentase daerah yang memenuhi rasio pejabat fungsional Pol PP | - | 5% | 10% | 15% | 20% | | | | | | | |
| | | 3 | Persentase daerah yang memenuhi rasio PPNS di Satpol PP | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | | | | | | | |
| | | 4 | Persentase daerah yang memenuhi Standardisasi Sarana Prasarana Satpol PP | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | | | | | | | |
| | | 5 | Persentase daerah yang Satpol PP -nya telah menegakkan perda secara efektif | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | | | | | | | |
| | | 6 | Persentase daerah yang berkinerja baik dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertarikan | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | | | | | | | |
| | | 7 | Persentase daerah yang telah menyelenggarakan perlindungan masyarakat secara optimal | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | | | | | | | |
| | | 8 | Jumlah Daerah yang menerapkan SPM sub bidang Trantibum | 102 daerah | 210 daerah | 318 daerah | 426 daerah | 542 daerah | | | | | | | |
| | | 9 | Jumlah NSPK di bidang Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat | 5 NSPK | 2 NSPK | 2 NSPK | 2 NSPK | 2 NSPK | | | | | | | |
| | | 10 | Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpas Tibumtranmas | - | 30 daerah | 30 daerah | 30 daerah | 30 daerah | | | | | | | |
| 1240 | Fasilitasi Pencegahan Kebakaran | Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran | 20.873 | 82.271 | 89.183 | 95.260 | 103.470 | | | | | | | Direktorat Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran | |
| | | Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan bencana secara terintegrasi | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub Bidang Bencana | 188 daerah | 282 daerah | 375 daerah | 468 daerah | 542 daerah | | | | | | | |
| | | 2 | Jumlah daerah yang mengembangkan prasarana dan informasi penanggulangan bencana sesuai standar | - | 20 Daerah | 20 Daerah | 20 Daerah | 20 Daerah | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|------------|------------------|------------------|------------------|------------|------------|-----------------------------|------|------|------|----|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 Jumlah NSPK di bidang Manajemen penanggulangan bencana | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 4 Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana | 5 daerah | 5 daerah NSPK | 5 daerah NSPK | 5 daerah NSPK | 5 daerah | 5 daerah | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibulinmas | 105 daerah | 105 daerah | 105 daerah | 105 daerah | 105 daerah | 105 daerah | | | | | | | |
| | | 6 Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah | 34 daerah | 34 daerah | 34 daerah | 34 daerah | 34 daerah | 34 daerah | | | | | | | |
| | | 7 Jumlah Provinsi yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar | 34 daerah | 34 daerah | 34 daerah | 34 daerah | 34 daerah | 34 daerah | | | | | | | |
| | | 8 Jumlah daerah yang menerima bantuan sarpras dalam rangka mitigasi bencana dan Kebakaran | - | 30 daerah | 30 daerah | 30 daerah | 30 daerah | 30 daerah | | | | | | | |
| | | 9 Jumlah Daerah yang menyelenggarakan bencana tepat fungsi | 15 daerah | 15 daerah | 15 daerah | 15 daerah | 15 daerah | 15 daerah | | | | | | | |
| | | Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan manajemen penanggulangan kebakaran sesuai standar | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub Bidang Kebakaran | 89 daerah | 178 daerah | 267 daerah | 354 daerah | 449 daerah | 449 daerah | | | | | | | |
| | | 2 Persentase daerah yang memiliki aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan berdasarkan standar kualifikasi dan kompetensi | 2% | 10% | 20% | 30% | 40% | 40% | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|--|--|--------------|------------|------------|------------|------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|----|------------------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 Persentase daerah yang memenuhi standardisasi Sarpras Pemadam Kebakaran dan penyelamatan | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 4 Persentase daerah yang menerapkan layanan bidang kebakaran dan penyelamatan (pencegahan kebakaran, penanganan berbahaya beracun kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, dan pemberdayaan masyarakat) sesuai standar | - | 5% | 10% | 15% | 20% | | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah NSPK di bidang kebakaran | 11 NSPK | 5 NSPK | 5 NSPK | 2 NSPK | 2 NSPK | | | | | | | | |
| | | 6 Layanan damkar sesuai standar di daerah | 1 Layanan | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 1258 | Fasilitasi KDH, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga | | | | | | | 10.300 | 15.750 | 23.700 | 36.050 | 60.167 | | Direktorat Fasilitasi KDH dan DPRD | |
| | | Meningkatnya Kinerja Penyelenggara Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Desk Pilkada yang terbentuk dan disupervisi pelaksanaannya untuk mendukung pilkada sesuai peraturan perundang-undangan | 270 Daerah | - | - | - | 541 Daerah | | | | | | | | |
| | | 2 Persentase penyelesaian permasalahan KDH dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah Asosiasi Pemerintahan Daerah dan DPRD yang disupervisi dalam penguatan koordinasi dan sosialisasi kebijakan | 7 Asosiasi | 7 Asosiasi | 7 Asosiasi | 7 Asosiasi | 7 Asosiasi | | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah Kepala Daerah yang menyampaikan LKPJ tepat waktu | 50 Daerah | 75 Daerah | 100 Daerah | 125 Daerah | 150 Daerah | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|----|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 5 Jumlah DPRD yang menyampaikan rekomendasi LKPJ tepat waktu | 50 Daerah | 75 Daerah | 100 Daerah | 125 Daerah | 150 Daerah | | | | | | | | |
| | | 6 Penyusunan Indeks kinerja KDH dan DPRD | -* | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | 7 Penguatan tugas dan fungsi KDH/WKDH dan DPRD | 6 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | | | | | | | | |
| | | 8 Persentase penyelesaian administrasi KDH dan DPRD secara tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 9 Jumlah Peraturan/ Kebijakan yang disusun terkait KDH dan DPRD | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 2 Regulasi | 1 Regulasi | - | | | | | | | | |
| | | 10 Evaluasi Kinerja KDH dan DPRD | - | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | | |
| 1259 | Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD | | | | | | | 5.650 | 17.000 | 24.250 | 30.900 | 35.650 | | Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus, dan DPOD | |
| | | Menguatnya Kapasitas Penataan Daerah dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Otonomi Asimetrik dan DPOD | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi diselesaikan permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan | 42 daerah | 86 daerah | 121 daerah | 17 daerah | 22 daerah | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah regulasi terkait pelaksanaan kebijakan penataan daerah, kekhurusan/ keistimewaan daerah, dan DPOD | 10 Regulasi | 10 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah daerah yang meningkat kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus | - | 5 daerah | 5 daerah | 5 daerah | 5 daerah | | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah dokumen usulan daerah persiapan otonom baru yang dievaluasi dan diverifikasi | - | 20 daerah | 20 daerah | 20 daerah | 20 daerah | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 5 | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | | | | | | | |
| | | 6 | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | | | | | | | |
| | | 7 | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | | | | | | | |
| | | 8 | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | | | | | | | |
| | | 9 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | | | | | | | |
| | | 10 | 4 Rekomen- dasi | 4 Rekomen- dasi | 4 Rekomen- dasi | 4 Rekomen- dasi | 4 Rekomen- dasi | | | | | | | |
| 1261 | | Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas | | | | | | 7.300 | 14.750 | 17.450 | 20.550 | 29.750 | Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas | |
| | | Meningkatnya Kinerja Evaluasi Penyelenggaraan dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 8 Provinsi | 10 Provinsi | 12 Provinsi | 14 Provinsi | 16 Provinsi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 172 Kabupaten/ Kota | 203 Kabupaten/ Kota | 234 Kabupaten/ Kota | 234 Kabupaten/ Kota | 234 Kabupaten/ Kota | | | | | | | |
| | | 3 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------------|------|------|------|----|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 4 Jumlah daerah yang meningkatkan kapasitas daerahnya dalam penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital (Smartcity) | 25 Daerah | 25 Daerah | 30 Daerah | 35 Daerah | 40 Daerah | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah daerah yang memiliki kinerja tertinggi dalam penyelenggaraan 6 urusan wajib pelayanan dasar | 5 Daerah | 6 Daerah | 7 Daerah | 8 Daerah | 10 Daerah | | | | | | | |
| | | 6 Jumlah daerah yang meningkatkan kapasitas pemerintahannya dalam penyelenggaraan 6 urusan wajib pelayanan dasar | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 6 Provinsi | | | | | | | |
| | | 7 Persentase Pengembangan sistem informasi LPPD dan evaluasi LPPD yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) | 50% | 100% | - | - | - | | | | | | | |
| | | 8 Jumlah Peraturan/ Kebijakan yang mendukung pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas daerah | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | | | | | | | |
| | | 9 Persentase daerah yang mendapatkan pembinaan desiminasi penyusunan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | | | | | | | |
| | | 10 Jumlah daerah yang difasilitasi bimbingan teknis penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) berbasis/ menggunakan sistem informasi | 9 Daerah | 120 Daerah | 135 Daerah | 140 Daerah | 144 Daerah | | | | | | | |
| | | 11 Jumlah data/ informasi capaian kinerja pemerintahan daerah yang terstruktur menuju e-database (one big data) | 32 data/ informasi terstruktur | 32 data/ informasi terstruktur | 32 data/ informasi terstruktur | 32 data/ informasi terstruktur | 32 data/ informasi terstruktur | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|---|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|----|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1264 | Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah | Meningkatnya Kualitas Penataan Kelembagaan dan Kepegawaian pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah | |
| | | 1 Indeks Kelembagaan Aparatur Pemerintah Daerah | -* | -* | Sedang | Tinggi | Sangat Tinggi | | | | | | | | |
| | | 2 Persentase penyelesaian permasalahan kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 3 Persentase penyelesaian pelanggaran netralitas ASN Daerah dalam Pilkada | 100% | - | - | - | 100% | | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah daerah yang tepat kelembagaan dan kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah Provinsi yang perangkat daerahnya yang disederhanakan | 5 Provinsi | 5 Provinsi | 10 Provinsi | 10 Provinsi | 4 Provinsi | | | | | | | | |
| | | 6 Jumlah Kabupaten/Kota yang perangkat daerahnya yang disederhanakan | 75 Kabupaten/Kota | 75 Kabupaten/Kota | 150 Kabupaten/Kota | 150 Kabupaten/Kota | 58 Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | 7 Jumlah daerah yang ditata ASN berdasarkan sistem merit | 5 Provinsi | 5 Provinsi | 10 Provinsi | 10 Provinsi | 4 Provinsi | | | | | | | | |
| | | 8 Persentase penyelesaian pengembangan SI penataan PKD terintegrasi dengan SIPD | 50% | 100% | - | - | - | | | | | | | | |
| | | 9 Jumlah Peraturan/Kebijakan yang mendukung pelaksanaan reformasi kelembagaan dan perangkat daerah | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | | | | | | | | |
| 3991 | Fasilitasi Penataan Produk Hukum Daerah | | | | | | | 4.850 | 11.500 | 15.367 | 19.300 | 24.500 | | Direktorat Produk Hukum Daerah | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan | 20 Provinsi | 25 Provinsi | 30 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan | 1 Database | 1 Database | 1 Database | 1 Database | | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah daerah yang produk hukumnya disederhanakan untuk meningkatkan kualitas urusan pelayanan masyarakat | 20 Provinsi, 200 Kabupaten/Kota | 30 Provinsi, 400 Kabupaten/Kota | 32 Provinsi, 450 Kabupaten/Kota | 34 Provinsi, 508 Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | 4 Persentase Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil review Kemendagri | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah daerah yg dilakukan Analisis Kebutuhan Pembentukan Perda (AKP) | 9 Provinsi | 20 Provinsi | 25 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | | |
| | | 6 Persentase penyelesaian revidi usulan Ranperda dan Ranperkada | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 7 Persentase daerah yang menindaklanjuti Ranperda hasil fasilitasi KDN | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 8 Persentase penyelesaian pengembangan SI-e perda terintegrasi dengan SIPD | 50% | - | - | - | | | | | | | | |
| | | 9 Jumlah daerah yang membentuk Portal e-Legislati di daerah dalam proses legislati. | 5 Provinsi | 10 Provinsi | 10 Provinsi | 4 Provinsi | | | | | | | | |
| 1251 | | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah I | | | | | | 37.400 | 49.177 | 122.943 | 307.358 | 768.394 | Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I | |
| | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah lingkup I | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah kebijakan/regulasi/pedoman di bidang pembinaan pembangunan daerah lingkup UPD I | - | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------------------------|------|------|------|----|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 2 Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasn dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup Urusan Pemerintahan Daerah I yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional | 18 Provinsi | 22 Provinsi | 28 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 3 Indeks Sinkronisasi NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah I | -* | 50 | 60 | 80 | 100 | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/ Kawasan Ekonomi Khusus) | 25 Daerah | 23 Daerah | 8 Daerah | - | - | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah daerah yang menyusun perda tentang rencana tata ruang dalam rangka pemindahan ibukota negara | - | 3 Daerah | 2 Daerah | 1 Daerah | - | | | | | | | |
| | | 6 Jumlah daerah yang mendapatkan rekomendasi hasil evaluasi raperda rencana tata ruang daerah | 33 daerah | 35 daerah | 40 daerah | 43 daerah | 45 daerah | | | | | | | |
| | | 7 Jumlah daerah yang melaksanakan Penyusunan, Perencanaan, dan Pengendalian Pengelolaan lahan pertanian beririgasi yang terintegrasi - IPDMIP | 88 Daerah | 88 Daerah | 88 Daerah | - | - | | | | | | | |
| | | 8 Jumlah daerah yang menyusun perencanaan dan pengendalian resiko banjir - FMSRB | 5 daerah | 5 daerah | 5 daerah | - | - | | | | | | | |
| | | 9 Jumlah daerah yang menerapkan Model Pengelolaan Lahan Kritis Berbasis Masyarakat (TP) | 4 Kabupaten | 4 Kabupaten | 4 Kabupaten | 4 Kabupaten | - | | | | | | | |
| | | 10 Jumlah daerah dengan rencana tata ruang daerah yang sinkron dan harmonis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah | 10 Provinsi | 15 Provinsi | 20 Provinsi | 30 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 11 Jumlah daerah yang melaksanakan program pengentasan daerah rentan rawan pangan | - | 20 kabupaten/kota | 40 kabupaten/kota | 60 kabupaten/kota | 88 kabupaten/kota | | | | | | |
| | | 12 Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan | - | 6 Provinsi | 12 Provinsi | 18 Provinsi | 25 Provinsi | | | | | | |
| | | 13 Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah bidang konservasi energi | - | 20 Provinsi | 25 Provinsi | 30 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |
| | | 14 Jumlah daerah yang menyusun Rencana Aksi Peningkatan EBT | - | 16 Provinsi | 25 Provinsi | 30 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |
| | | 15 Jumlah daerah yang mengendalikan Pencapaian target RUED-P | - | 16 Provinsi | 25 Provinsi | 30 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |
| | | 16 Jumlah daerah yang menyusun RAD Pengurangan dan Penghapusan Merkuri | - | 15 Provinsi | 25 Provinsi | 30 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |
| | | 17 Jumlah daerah yang melaksanakan perhutanan sosial | 4 daerah | 8 daerah | 12 daerah | 15 daerah | 20 daerah | | | | | | |
| | | 18 Jumlah Daerah yang difasilitasi dalam pelaksanaan penataan akses dalam rangka penyelenggaraan Reforma Agraria di Daerah | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |
| | | 19 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |
| | | 20 Jumlah daerah yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan (penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis-KLHS) dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah | - | 270 daerah | 135 Daerah | 135 Daerah | 548 Daerah | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|-------------|---|---|---|---|------|-----------------------------|------|------|------|----|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 21 Jumlah daerah yang meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan persampahan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup | 8 daerah | 184 Daerah | 284 Daerah | 384 Daerah | 448 Daerah | | | | | | | |
| | | 22 Pemenuhan Rasio SDM Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah I yang kompeten | 5% | 20% | 35% | 60% | 100% | | | | | | | |
| | | 23 Jumlah daerah yang meningkatkan pengelolaan sampah terpadu perkotaan di kawasan sungai citarum (ISWMP) | - | 8 Kabupaten/ Kota (6 Kabupaten, 2 Kota) | 8 Kabupaten/ Kota (6 Kabupaten, 2 Kota) | 8 Kabupaten/ Kota (6 Kabupaten, 2 Kota) | 8 Kabupaten/ Kota (6 Kabupaten, 2 Kota) | | | | | | | |
| | | 24 Jumlah daerah yang melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim | - | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 25 Jumlah daerah yang menyusun raperda RDTR di lokasi OSS | - | 5 Daerah | - | - | - | | | | | | | |
| | | 26 Jumlah daerah yang melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim | - | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 27 Jumlah daerah yang melaksanakan penguatan Ketahanan Pangan | - | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 28 Jumlah Daerah yang Meningkatkan kapasitas dan manajemen kelembagaan, ketahanan penyelamatan lingkungan, DAS, Tanah, Air dan Pangan | - | 100 Daerah | 120 Daerah | 150 Daerah | 150 Daerah | | | | | | | |
| | | 29 Jumlah Daerah yang menyusun kebijakan sinergitas OPD dan pemberdayaan masyarakat untuk pengendalian kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan/atau Daerah Tangkapan Air (DTA) | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 30 Jumlah Daerah yang meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam pengendalian pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 31 Jumlah Daerah yang memberdayakan dan mendorong kemandirian UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan | 28 Provinsi | 28 Provinsi | 28 Provinsi | 28 Provinsi | 28 Provinsi | | | | | | | |
| | | 32 Jumlah Daerah yang mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan | 10 Provinsi | 10 Provinsi | 10 Provinsi | 10 Provinsi | 10 Provinsi | | | | | | | |
| | | 33 Jumlah daerah yang mendukung percepatan penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan | 2 Provinsi | 2 Provinsi | 2 Provinsi | 2 Provinsi | 2 Provinsi | | | | | | | |
| | | 34 Jumlah daerah yang meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lahan basah yang menjadi kawasan lindung (Mangrove, Rawa, Gambut) | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 35 Jumlah Daerah yang menyusun kebijakan Pelaksanaan Konservasi Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di luar Appendix CITES | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| 1252 | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III | | | | | | | 34.578 | 48.868 | 122.170 | 305.426 | 763.565 | Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III | |
| | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah lingkup III | | | | | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI | |
|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|------|------|------|------|--------------------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 1 Jumlah kebijakan/ regulasi/pedoman dibidang pembinaan pembangunan daerah lingkup Urusan Pemerintahan Daerah III | 1 Kebijakan/R egulasi/ Pedoman | 1 Kebijakan/R egulasi/ Pedoman | 1 Kebijakan/R egulasi/ Pedoman | 1 Kebijakan/ Regulasi/ Pedoman | 1 Kebijakan/ Regulasi/ Pedoman | | | | | | |
| | | 2 Jumlah daerah yang mendaklanjuti rekomendasi penyelarasan dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup Urusan Pemerintahan Daerah III yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional | 18 Provinsi | 22 Provinsi | 28 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |
| | | 3 Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM Lingkup UPD III (Kesehatan, Sosial dan Trantubumlinmas) | 412 daerah | 412 daerah | 412 daerah | 412 daerah | 412 daerah | | | | | | |
| | | 4 Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata | 11 Provinsi | 11 Provinsi | 19 Provinsi | 19 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |
| | | 5 Jumlah daerah yang meningkat kapasitasnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting | 260 daerah | 360 daerah | 460 daerah | 514 daerah | 514 daerah | | | | | | |
| | | 6 Jumlah regulasi dan kebijakan daerah yang disederhanakan terkait urusan penanaman modal | 5 Kabupaten/ Kota | 10 Kabupaten/ Kota | 15 Kabupaten/ Kota | 20 Kabupaten/ Kota | 25 Kabupaten/ Kota | | | | | | |
| | | 7 Jumlah daerah yang menerapkan system pengendalian inflasi daerah | - | - | 1 Sistem | 10 Provinsi | 20 Provinsi | | | | | | |
| | | 8 Jumlah daerah yang melaksanakan pengembangan seni dan kerajinan nasional | - | 150 daerah | 300 daerah | 400 daerah | 514 daerah | | | | | | |
| | | 9 Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi penanggulangan kemiskinan | - | 10 daerah (10 Provinsi) | 110 daerah (10 Provinsi, 100 Kabupaten/ Kota) | 264 daerah (14 Provinsi, 250 Kabupaten/ Kota) | 150 daerah (150 Kabupaten/ Kota) | | | | | | |
| | | 10 Jumlah daerah yang mengoptimalkan Peran Satgas Percepatan Kemudahan Berusaha | 14 Provinsi | 17 Provinsi | 24 Provinsi | 34 Provinsi | - | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------|---------|---------|-----------|---|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 11 Jumlah DPMP/TSP menuju zona integritas | 10 Provinsi | 15 Provinsi | 25 Provinsi | 30 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 12 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam Program Penguatan Kapasitas Percepatan Penurunan Stunting (INEY) | 160 Daerah | 160 Daerah | - | - | - | | | | | | | |
| | | 13 Jumlah daerah yang menerapkan kebijakan tentang pelayanan Kesehatan | 15 Provinsi | 20 Provinsi | 25 Provinsi | 30 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 14 Jumlah daerah yang menyederhanakan perizinan dan pelayanan kemudahan berusaha/investasi | 15 Provinsi | 20 Provinsi | 25 Provinsi | 30 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 15 Jumlah daerah yang melaksanakan pendampingan stunting | 260 daerah | 360 daerah | 460 daerah | 514 daerah | 514 daerah | | | | | | | |
| 1253 | | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan Urusan Pemerintahan Daerah III | | | | | | 59.548 | 70.432 | 176.081 | 440.203 | 1.100.506 | Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II | |
| | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah lingkup II | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah kebijakan/regulasi/pedoman di bidang pembinaan pembangunan daerah lingkup UPD II | - | - | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasn dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup Urusan Pemerintahan Daerah II yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional | 18 Provinsi | 22 Provinsi | 28 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan) | 412 Daerah | 412 Daerah | 412 Daerah | 412 Daerah | 412 Daerah | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|------|------|------|----|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 4 Jumlah daerah yang sinkron antara RZWP3K dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah | 5 daerah | 10 daerah | 20 daerah | 30 daerah | 34 daerah | 5 daerah | | | | | | |
| | | 5 Jumlah Provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman | - | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |
| | | 6 Jumlah Provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman | - | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |
| | | 7 Jumlah Provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman | - | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |
| | | 8 Jumlah Provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (Kabupaten/Kota) | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |
| | | 9 Jumlah Provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi | 34 Daerah | 34 Daerah | 34 Daerah | 34 Daerah | 34 Daerah | 34 Daerah | | | | | | |
| | | 10 Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman | - | 48 Daerah | 48 Daerah | 48 Daerah | 48 Daerah | 48 Daerah | | | | | | |
| | | 11 Jumlah Provinsi yang melakukan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air | - | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 12 Jumlah Provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan | - | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | - | - | - | - | - | - |
| | | 13 Jumlah daerah yang menerapkan program pengelolaan sumber daya air strategis (SIMURP) | 18 Daerah | 18 Daerah | 18 Daerah | 18 Daerah | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 14 Jumlah daerah yang kapasitas kelembagaan daerahnya meningkat dalam pemenuhan kebutuhan perumahan yang terjangkau oleh masyarakat (NAHP) | 12 Daerah | 12 Daerah | 12 Daerah | 12 Daerah | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 15 Jumlah daerah yang menyusun RAD AMPL dan memiliki peningkatan APBD terkait sanitasi dan air minum (Pamsimas) | 118 Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 16 Jumlah daerah yang menerapkan program penyediaan air minum perkotaan di kawasan permukiman (NUWSP) | 12 Daerah | 12 Daerah | 12 Daerah | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 17 Perencanaan terpadu dalam pembangunan daerah (NUDP) | 5 Kota | 5 Kota | 5 Kota | 5 Kota | 5 Kota | 5 Kota | 5 Kota | 5 Kota | 5 Kota | 5 Kota | 5 Kota |
| | | 18 Jumlah daerah yang menerapkan rencana aksi terkait pengembangan infrastruktur bidang transportasi | - | 12 Provinsi | 19 Provinsi | 26 Provinsi | 33 Provinsi | - | - | - | - | - | - |
| | | 19 Jumlah daerah yang mendapatkan sarana dan prasarana perkantoran Provinsi dan Kabupaten/Kota | - | 25 daerah | 50 daerah | 75 daerah | 100 daerah | - | - | - | - | - | - |
| | | 20 Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan kawasan khusus bagi kepentingan kegiatan strategis nasional. | - | 8 Provinsi | 16 Provinsi | 24 Provinsi | 33 Provinsi | - | - | - | - | - | - |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------|--------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 21 Jumlah daerah yang menangani lahan kritis dan SDA dan kelautan dan perikanan | 9 Daerah | 15 daerah | 20 daerah | 25 daerah | 34 daerah | | | | | | | |
| | | 22 Jumlah daerah yang menangani kampung nelayan | - | 3 Provinsi | 3 Provinsi | 3 Provinsi | 3 Provinsi | | | | | | | |
| 1254 | Fasilitasi Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, implementasi dan pemanfaatan informasi pembangunan daerah serta partisipasi masyarakat berbasis SIPD | | | | | | 12.300 | 27.050 | 67.625 | 169.063 | 422.656 | Direktorat Perencanaan dan Evaluasi | |
| | | 1 Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasan dokumen perencanaan daerah yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional | 18 Provinsi | 22 Provinsi | 28 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah daerah yang mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional | 270 Daerah | 350 Daerah | 450 Daerah | 500 Daerah | 548 Daerah | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda) | - | 1 sistem | 1 sistem | 1 sistem | 1 sistem | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI | |
|------|---|--|-------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------------|-------|--------|--------|---------|--------------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 5 Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah | - | - | 1 sistem | 1 sistem | 1 sistem | | | | | | |
| | | 6 Jumlah daerah yang melaksanakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan daerah | 15 Provinsi | 20 Provinsi | 25 Provinsi | 30 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |
| | | 7 Jumlah daerah dengan rencana program dan kegiatan pembangunan daerahnya selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |
| | | 8 Perencanaan terpadu dalam pembangunan infrastruktur daerah (NUDP) | 5 Kota | 5 Kota | 5 Kota | 5 Kota | 5 Kota | | | | | | |
| | | 9 Jumlah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan perencanaan pengendalian serta evaluasi pembangunan daerah | 15 Provinsi | 20 Provinsi | 25 Provinsi | 30 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |
| | | 10 Jumlah SDM Aparatur daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian, evaluasi dan informasi Pembangunan Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya | 3600 orang | 3800 Orang | 4000 Orang | 4200 Orang | 4400 Orang | | | | | | |
| | | 11 Jumlah daerah yang menyusun profil daerah | - | 325 daerah | 400 daerah | 475 daerah | 548 daerah | | | | | | |
| 1255 | Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah IV | Pembinaan Penyelenggaraan dan Pembangunan | | | | | | 8.900 | 16.050 | 40.125 | 100.313 | 250.781 | Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV |
| | | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dan pembangunan urusan pemerintah daerah lingkup IV | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah kebijakan/regulasi/pedoman dibidang pembinaan pembangunan daerah lingkup UPD IV | - | - | 1 Kebijakan/Regulasi | - | - | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|------|------|------|----|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 2 Jumlah daerah yang menindaklanjuti rekomendasi penyelarasn dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup Urusan Pemerintahan Daerah IV yang selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan Nasional | 18 Provinsi | 22 Provinsi | 28 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 18 Provinsi | | | | | | |
| | | 3 Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan) | 412 daerah | 412 daerah | 412 daerah | 412 daerah | 412 daerah | 412 daerah | | | | | | |
| | | 4 Jumlah daerah yang diimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK | 6 daerah | 7 daerah | 7 daerah | 7 daerah | 7 daerah | 7 daerah | | | | | | |
| | | 5 Jumlah tim pembina di daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M | 7 tim | 7 tim | 7 tim | 7 tim | 7 tim | 7 tim | | | | | | |
| | | 6 Indeks gemar membaca dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca di daerah | 53,00 | 54,75 | 56,50 | 58,50 | 60,00 | 60,00 | | | | | | |
| | | 7 Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan KB berbasis Hak | - | 50 Daerah | 55 Daerah | 60 Daerah | 70 Daerah | 70 Daerah | | | | | | |
| | | 8 Jumlah daerah yang menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) | - | 22 Daerah | 24 Daerah | 28 Daerah | 34 Daerah | 34 Daerah | | | | | | |
| | | 9 Jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO) | - | 20 Daerah | 22 Daerah | 26 Daerah | 32 Daerah | 32 Daerah | | | | | | |
| | | 10 Jumlah Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA) | - | 22 Daerah | 24 Daerah | 28 Daerah | 34 Daerah | 34 Daerah | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 11 Jumlah daerah yang mendapat rekomendasi terkait penerapan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan kearsipan | - | 18 Daerah | 24 Daerah | 30 Daerah | 34 Daerah | | | | | | | |
| | | 12 Jumlah daerah yang menetapkan Upah Minimum sesuai dengan peraturan perundangan | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 13 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam Penguatan poljra daerah dalam penyusunan dan pemanfaatan GDPK | - | 40 daerah | 45 daerah | 50 daerah | 55 daerah | | | | | | | |
| | | 15 Jumlah daerah yang menerapkan kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja | - | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 16 Jumlah perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya dalam mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar | - | 16 Perangkat Daerah | 16 Perangkat Daerah | 16 Perangkat Daerah | 20 Perangkat Daerah | | | | | | | |
| | | 17 Jumlah Daerah yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam Dokumen Perencanaan Daerah | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 18 Jumlah Daerah yang melaksanakan gerakan nasional revolusi mental bidang Pendidikan | 6 Provinsi (105 Kabupaten/ Kota) | 7 Provinsi (119 Kabupaten/ Kota) | 7 Provinsi (99 Kabupaten/ Kota) | 7 Provinsi (90 Kabupaten/ Kota) | 7 Provinsi (95 Kabupaten/ Kota) | | | | | | | |
| 1243 | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Lingkup Regional | Meningkatnya Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Manajemen Pemerintahan Desa | | | | | | 38.222 | 90.326 | 131.498 | 133.733 | 136.594 | Balai Pemerintahan Desa | |
| | | 1 Jumlah Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional yang terlatih | 1470 Orang | 1470 Orang | 1470 Orang | 1470 Orang | 1470 Orang | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------|-----------------------------|------|------|------|--------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 6 | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% | | | | | | | |
| | | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| 1244 | Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa | Meningkatnya Kualitas Penataan dan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa | 20.900 | 39.019 | 44.092 | 51.420 | 58.902 | | | | | | Direktorat Penataan Desa | |
| | | 1 | 13 Kabupaten/Kota | 100 Kabupaten/Kota | 150 Kabupaten/Kota | 121 Kabupaten/Kota | 50 Kabupaten/Kota | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------|-----------------------------|------|------|------|----|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 2 | 40 Kabupaten/ Kota 120 Desa | 60 Kabupaten/ Kota 80 Desa | 70 Kabupaten/ Kota 100 Desa | 80 Kabupaten/ Kota 120 Desa | 90 Kabupaten/ Kota 140 Desa | | | | | | | |
| | | 3 | 15.000 Perangkat Desa | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 4 | - | 100 Desa | 125 Desa | 130 Desa | 175 Desa | | | | | | | |
| | | 5 | 120 Desa | 150 Desa | 200 Desa | 250 Desa | 300 Desa | | | | | | | |
| | | 6 | - | 90 Kabupaten/ Kota | 100 Kabupaten/ Kota | 110 Kabupaten/ Kota | 120 Kabupaten/ Kota | | | | | | | |
| | | 7 | 3 Kabupaten/ Kota | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | 8 | - | 50 Kabupaten/ Kota | 50 Kabupaten/ Kota | 50 Kabupaten/ Kota | 50 Kabupaten/ Kota | | | | | | | |
| | | 9 | 50 Desa/2 Kabupaten/ Kota | 60 Desa/3 Kabupaten/ Kota | 70 Desa/4 Kabupaten/ Kota | 80 Desa/4 Kabupaten/ Kota | 90 Desa/5 Kabupaten/ Kota | | | | | | | |
| | | 10 | 200 Kabupaten/ Kota | 87 Kabupaten/ Kota | 87 Kabupaten/ Kota | 87 Kabupaten/ Kota | 87 Kabupaten/ Kota | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 11 Jumlah Desa yang telah direhab kantor desanya | 200 Desa | 300 Desa | 400 Desa | 500 Desa | 600 Desa | | | | | | | |
| | | 12 Jumlah Kabupaten/Kota yang telah diukur indeks kinerja pembinaan dan pengawasannya dalam pembinaan pemerintahan desa | -* | 140 Kabupaten/Kota | 140 Kabupaten/Kota | 144 Kabupaten/Kota | 144 Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| 1246 | | Kelembagaan dan Kerjasama Desa | | | | | | 40.893 | 40.543 | 44.439 | 47.738 | 41.741 | Direktorat Kelembagaan dan Kerjasama | |
| | | Meningkatnya Fungsi Kelembagaan dan Kerjasama Desa | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman Bidang Kelembagaan dan Kerjasama Desa | 1 Kebijakan/Regulasi/Pedoman | 1 Kebijakan/Regulasi/Pedoman | - | - | - | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah daerah yang menyelenggarakan penguatan fungsi kelembagaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah daerah yang desanya melaksanakan fungsi Posyandu dalam Pelayanan Sosial Dasar | - | 8 Provinsi dan 750 Desa | 9 Provinsi dan 750 Desa | 9 Provinsi dan 750 Desa | 8 Provinsi dan 750 Desa | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah desa yang menyelenggarakan Penguatan Fungsi Trantib dan Linmas Desa | 200 Desa di 40 Kabupaten/Kota | 250 Desa di 50 Kabupaten/Kota | 375 Desa di 75 Kabupaten/Kota | 500 Desa 100 Kabupaten/Kota | 500 Desa 100 Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah Daerah yang Desanya telah menyusun tata tertib BPD | 100 Kabupaten/Kota | 100 Kabupaten/Kota | 100 Kabupaten/Kota | 100 Kabupaten/Kota | 100 Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | 6 Jumlah Kerjasama Antar Desa dan dengan Lembaga Non Pemerintah yang Terbentuk | 66 Kerjasama | 88 Dokumen Kerjasama/ 88 Desa | 108 Dokumen Kerjasama/ 108 Desa | 128 Dokumen Kerjasama/ 128 Desa | 148 Dokumen Kerjasama/ 148 Desa | | | | | | | |
| | | 7 Jumlah daerah dengan LKD dan LAD sebagai mitra pemerintah desa yang dibentuk, ditata dan diberdayakan kelembagaannya | 66 Kabupaten/Kota | 90 Kabupaten/Kota | 90 Kabupaten/Kota | 90 Kabupaten/Kota | 98 Kabupaten/Kota | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 8 Jumlah Desa yang Telah Menerapkan Model Perencanaan Pembangunan Partisipatif dengan Sistem Penyusunan RAPPDesa Secara Partisipatif | 40 Desa | 40 Desa | 40 Desa | 40 Desa | 40 Desa | 40 Desa | 40 Desa | 40 Desa | 40 Desa | 40 Desa | 40 Desa | |
| | | 9 Jumlah Desa yang mengintegrasikan perencanaan pembangunan desanya dengan perencanaan pembangunan daerah dan nasional | - | 40 Desa di 7 Kabupaten/ Kota | 40 Desa di 7 Kabupaten/ Kota | 40 Desa di 7 Kabupaten/ Kota | 40 Desa di 7 Kabupaten/ Kota | 40 Desa di 7 Kabupaten/ Kota | 40 Desa di 7 Kabupaten/ Kota | 40 Desa di 7 Kabupaten/ Kota | 40 Desa di 7 Kabupaten/ Kota | 40 Desa di 7 Kabupaten/ Kota | 40 Desa di 7 Kabupaten/ Kota | |
| | | 10 Jumlah Kerjasama Desa yang terbentuk dalam rangka pengelolaan air minum dan sanitasi | 66 Kerjasama | 32 Dokumen Kerjasama | 35 Dokumen Kerjasama | 38 Dokumen Kerjasama | 41 Dokumen Kerjasama | | | | | | | |
| 1247 | | Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa | | | | | | 13.000 | 709.635 | 710.971 | 713.309 | 713.489 | Direktorat Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa | 75 Kabupaten/ Kota | 85 Kabupaten/ Kota | 95 Kabupaten/ Kota | 105 Kabupaten/ Kota | 115 Kabupaten/ Kota | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah Daerah yang Desanya Mampu Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | 4 Kabupaten/ Kota | 50 Kabupaten/ Kota | 60 Kabupaten/ Kota | 70 Kabupaten/ Kota | 80 Kabupaten/ Kota | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah Daerah yang Desanya telah Mengelola Keuangan Desa yang Akuntabel | 100 Kabupaten/ Kota | 100 Kabupaten/ Kota | 100 Kabupaten/ Kota | 100 Kabupaten/ Kota | 100 Kabupaten/ Kota | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah Desa yang Menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan desa | 2.000 Desa | 1.100 Desa | 1.200 Desa | 1.300 Desa | 1.400 Desa | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah Desa yang Menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Aset Desa | 2.000 Desa | 1.100 Desa | 1.200 Desa | 1.300 Desa | 1.400 Desa | | | | | | | |
| | | 6 Jumlah daerah yang mendapatkan Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) | 80 Kabupaten | 180 Kabupaten | 250 Kabupaten | 330 Kabupaten | 380 Kabupaten | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|---|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|---|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1248 | Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa | Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan | 5 Pedoman | 5 Pedoman | 5 Pedoman | 5 Pedoman | 5 Pedoman | 22.500 | 23.288 | 24.103 | 24.946 | 25.819 | Direktorat Pengembangan Kapasitas Aparatur dan Kader Desa | | |
| | | 1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman Bidang Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa | 150 Orang | 150 Orang | 150 Orang | 150 Orang | 150 Orang | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah Aparatur Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota Sebagai Pelatih Pada Pelatihan Aparatur Desa (PAD) dan Pembinaan Teknis Pemerintahan Desa | 1.500 Orang | 1.500 Orang | 1.500 Orang | 1.500 Orang | 1.500 Orang | | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah Aparatur Kecamatan yang Terlatih Selaku Pembina Teknis Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | | | | |
| 1249 | Evaluasi Perkembangan Desa | Meningkatnya Prakarsa dan Inisiatif Pemerintah Desa dalam Mengisi Data Perkembangan Desa | | | | | | 10.687 | 41.658 | 41.691 | 44.850 | 44.901 | Direktorat Evaluasi Perkembangan Desa | | |
| | | 1 Jumlah desa yang mendapat status kategori "berkembang" | 9.000 Desa | 9.000 Desa | 9.000 Desa | 9.000 Desa | 9.000 Desa | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah Data Desa dan Kelurahan Yang Terpublikasi Secara <i>Online</i> | 25.000 Desa dan Kelurahan | 25.000 Desa dan Kelurahan | 25.000 Desa dan Kelurahan | 25.000 Desa dan Kelurahan | 25.000 Desa dan Kelurahan | | | | | | | | |
| 1274 | Pembinaan Perencanaan Daerah | Meningkatnya kualitas perencanaan anggaran daerah | | | | | | 6.700 | 7.850 | 8.700 | 9.550 | 10.350 | Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah | | |
| | | 1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Perencanaan Anggaran Daerah | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------|-------|-------|------------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 2 Jumlah Provinsi yang mengesahkan APBD tepat Waktu | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | |
| | | 3 Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM | 102 daerah | 210 daerah | 318 daerah | 426 daerah | 542 daerah | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah Daerah yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah (Si-Keuda) Bidang Perencanaan Anggaran | 102 daerah | 210 daerah | 318 daerah | 426 daerah | 542 daerah | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah Daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Infrastruktur | 300 daerah | 350 daerah | 400 daerah | 450 daerah | 542 daerah | | | | | | | |
| | | 6 Jumlah Provinsi yang patuh terhadap Hasil Evaluasi Ranperda APBD | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 7 Jumlah Data dan Informasi Perencanaan Anggaran Daerah 34 Provinsi | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | | | | | |
| 1275 | | Pembinaan Pengelolaan Pendapatan Daerah | | | | | | 5.500 | 6.800 | 7.650 | 8.600 | 9.450 | Direktorat Pendapatan Daerah | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Pendapatan Daerah | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah Daerah yang pendapatan pajak dan retribusi daerahnya meningkat minimal 5% pada Provinsi dan 8% dari tahun sebelumnya | 313 Daerah | 359 Daerah | 409 Daerah | 455 Daerah | 542 Daerah | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah Daerah yang menerapkan transaksi non tunai (Cashless) atas Penerimaan Daerah | - | 100 Daerah | 150 Daerah | 200 Daerah | 250 Daerah | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|---|---|---------------|------------|------------|------------|---------------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 4 Jumlah Daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi. | 102 daerah | 210 daerah | 318 daerah | 426 daerah | 542 daerah | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah Data dan Informasi bidang pengelolaan pendapatan daerah 34 Provinsi | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | | | | | |
| 1276 | Pembinaan dan Fasilitasi Pinjaman Daerah | Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah | | | | | | 5.400 | 6.600 | 7.650 | 8.700 | 10.150 | Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Dana Transfer dan Pinjaman Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Kebijakan/Regulasi/Pedoman di Bidang Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah | - | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah Daerah yang optimal memanfaatkan dana transfer | 108 Daerah | 217 Daerah | 325 Daerah | 434 Daerah | 542 Daerah | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah Daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan perundang-undangan | 50 daerah | 55 daerah | 60 daerah | 65 daerah | 70 daerah | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah Rekomendasi Tindaklanjut dan Peningkatan Efektifitas Perencanaan dan Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus | 1 Rekomendasi | - | - | - | 1 Rekomendasi | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah Data dan Informasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah 34 Provinsi | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | 1 dokumen | | | | | | | |
| 1277 | Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah | Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah | | | | | | 6.400 | 8.805 | 10.006 | 11.207 | 12.287 | Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|----|---|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 3 Jumlah Daerah yang menerapkan PPK BLUD | 542 Daerah | 542 Daerah | 542 Daerah | 542 Daerah | 542 Daerah | | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah Daerah yang melakukan penatausahaan BMD secara wajar | 284 daerah | 349 daerah | 413 daerah | 478 daerah | 542 daerah | | | | | | | | |
| 1280 | | Penelitian Dan Pengembangan Pembangunan Dan Keuangan Daerah | | | | | | 2.220 | 6.183 | 6.801 | 7.481 | 8.230 | | Pusat Litbang Pembangunan Dan Keuda | |
| | | Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan lingkup pembangunan dan keuangan daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan lingkup pembangunan dan keuangan daerah yang ditindaklanjuti oleh | 45% | 50% | 55% | 60% | 70% | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah daerah yang diukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerahnya | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | | |
| | | 3 Persentase rekomendasi Forum Diskusi Aktual/Seminar/Diskusi Publik yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan | 50% | 55% | 60% | 70% | 80% | | | | | | | | |
| 1281 | | Penelitian Dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, Dan Pemerintahan Umum | | | | | | 1.600 | 2.640 | 3.463 | 3.809 | 4.190 | | Pusat Litbang Otda, Politik Dan Pemerintahan Umum | |
| | | Meningkatnya kualitas kelitbangan lingkup Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan lingkup Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan Umum yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan | 45% | 50% | 55% | 60% | 70% | | | | | | | | |
| | | 2 Persentase Rekomendasi Forum Diskusi Aktual/Seminar/Diskusi Publik yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan | 50% | 55% | 60% | 70% | 80% | | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah Rekomendasi Perkiraan Strategik Nasional | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 4 Jumlah Rekomendasi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah | 4 1 Rekomendasi | 5 1 Rekomendasi | 6 1 Rekomendasi | 7 1 Rekomendasi | 8 1 Rekomendasi | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1282 | Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 1 Rekomendasi | 1.550 | 4.240 | 4.664 | 5.130 | 5.643 | Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | |
| | | Meningkatnya kualitas kelibangannya lingkup Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan lingkup administrasi kewilayahan, pemerintahan desa, dan kependudukan | 45% | 50% | 55% | 60% | 70% | | | | | | | |
| | | 2 Persentase rekomendasi forum diskusi aktual/seminar/diskusi publik yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan | 50% | 55% | 60% | 70% | 80% | | | | | | | |
| 1283 | Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur | | | | | | | 7.550 | 10.276 | 10.953 | 11.631 | 12.310 | Pusat Litbang Inovasi Daerah | |
| | | Meningkatnya kualitas inovasi daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah | 100 Daerah | 123 Daerah | 153 Daerah | 176 Daerah | 191 Daerah | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah daerah yang mendapatkan pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 3 | 5 Daerah | 3 Daerah | 6 Daerah | 5 Daerah | 5 Daerah | | | | | | | |
| | | yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/potensi daerah dan fokus pada daerah 3T) | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 546 Provinsi, Kabupaten/ Kota | 546 Provinsi, Kabupaten/ Kota | 546 Provinsi, Kabupaten/ Kota | 546 Provinsi, Kabupaten/ Kota | 546 Provinsi, Kabupaten/ Kota | | | | | | | |
| | | 5 | 45% | 50% | 55% | 60% | 70% | | | | | | | |
| | | hasil kelitbang Bidang Inovasi Daerah yang ditindaklanjuti oleh pemangku kebijakan | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 | 1 Kebijakan/Regulasi | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | Pemberian Insentif Bagi Pelaksanaan Inovasi Daerah | | | | | | | | | | | | |
| 1285 | Pengembangan dan Pelaksanaan Standarisasi dan Sertifikasi | | | | | | | 5.091 | 20.888 | 29.183 | 35.165 | 41.480 | Pusat Standarisasi Dan Sertifikasi | |
| | | Meningkatnya Kualitas Standarisasi dan Sertifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 8 Naskah | 40 Naskah | 45 Naskah | 55 Naskah | 68 Naskah | | | | | | | |
| | | Jumlah Standard Pengembangan Kompetensi SDM Substantif Pemerintahan Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 1 Komponen | 2 Komponen | 3 Komponen | 3 Komponen | 3 Komponen | | | | | | | |
| | | Jumlah standard Kompetensi Komponen Kementerian Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 | 110 Orang | 125 Orang | 205 Orang | 260 Orang | 320 Orang | | | | | | | |
| | | Jumlah pejabat strategis kementerian dalam negeri yang tersertifikasi | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 | 890 Orang | 6.000 Orang | 10.000 Orang | 12.000 Orang | 14.000 Orang | | | | | | | |
| | | Jumlah pejabat strategis pemerintah daerah yang tersertifikasi | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 | 4 Angkatan | 9 Angkatan | 12 Angkatan | 15 Angkatan | 18 Angkatan | | | | | | | |
| | | Jumlah Pengembangan Kompetensi Tenaga Kependidikan | | | | | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|---|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 6 Jumlah Pengembangan Kompetensi berbasis elektronik (e-Learning) | 7 Angkatan | 7 Angkatan | 8 Angkatan | 10 Angkatan | 10 Angkatan | | | | | | | |
| | | 7 Persentase Metode Pengembangan Kompetensi Berbasis Teknologi Informasi | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | | | | | | | |
| 1287 | | Pengembangan Kompetensi Kemendagri dan Pemda | | | | | | 8.299 | 17.200 | 21.150 | 27.100 | 32.150 | Pusat Pengembangan Kompetensi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah | |
| | | Meningkatnya kualitas pengembangan SDM Bidang Kompetensi Kemendagri dan Pemerintah Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri | - | 3 Naskah | 3 Naskah | 3 Naskah | 3 Naskah | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah Pengembangan Kompetensi KDH/WKDH (Orientasi dan Pembekalan) | 3 Angkatan | 5 Angkatan | 5 Angkatan | 7 Angkatan | 7 Angkatan | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah Pengembangan Kompetensi Pemerintahan bagi DPRD, dan Pejabat Strategis | 25 Angkatan | 35 Angkatan | 41 Angkatan | 46 Angkatan | 62 Angkatan | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam Hal Penerapan SPM di Daerah Lingkup Kantor Pusat | 16 Angkatan | 24 Angkatan | 32 Angkatan | 40 Angkatan | 48 Angkatan | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif Pemerintahan Dalam Negeri bagi ASN Kementerian Dalam Negeri | - | 12 Angkatan | 24 Angkatan | 36 Angkatan | 48 Angkatan | | | | | | | |
| | | 6 Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif Pemerintahan Dalam Negeri bagi ASN Pemerintah Daerah | 29 Angkatan | 42 Angkatan | 54 Angkatan | 67 Angkatan | 80 Angkatan | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|--|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1288 | Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan | Meningkatnya Kualitas Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan | - | 3 Naskah | 2 Naskah | 2 Naskah | 2 Naskah | 2 Naskah | 11.156 | 15.487 | 19.025 | 22.818 | 24.147 | Pusat Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan |
| | | | 6 Angkatan | 6 Angkatan | 6 Angkatan | 6 Angkatan | 6 Angkatan | 6 Angkatan | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Penyelenggaraan Pembangunan bagi Aparatur Pemda di Wilayah Perbatasan Antar Negara (Diklat Camat Wilayah Perbatasan) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah Pengembangan Kompetensi Manajemen Strategi Pengembangan Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Wilayah | | | | | | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah Pengembangan Kompetensi Latihan Dasar CPNS | | | | | | | | | | | | |
| | | 6 Jumlah Pengembangan Kompetensi Kepamongprajaan dan Administrasi Pemerintahan | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 Penguatan koordinasi penyelenggaraan pengembangan kompetensi Kepamongprajaan dan Manajemen Kepemimpinan | | | | | | | | | | | | |
| 1289 | Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis | | | | | | | | 3.019 | 5.000 | 6.900 | 8.800 | 9.650 | Pusat Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | Meningkatnya Kualitas Kompetensi Fungsional dan Teknis | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Pedoman Teknis Pengembangan Kompetensi Fungsional dan Teknis | - | 2 Naskah | 2 Naskah | 2 Naskah | 2 Naskah | 2 Naskah | | | | | | |
| | | 2 Pengembangan Kompetensi Penyusunan Legal Drafting (Perda dan Perkada) | 6 Angkatan | 6 Angkatan | 6 Angkatan | 6 Angkatan | 6 Angkatan | 6 Angkatan | | | | | | |
| | | 3 Pengembangan Kompetensi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) | 3 Angkatan | 4 Angkatan | 7 Angkatan | 10 Angkatan | 10 Angkatan | 10 Angkatan | | | | | | |
| | | 4 Jumlah Pengembangan Kompetensi Fungsional Binaan Kemendagri | - | 5 Angkatan | 10 Angkatan | 15 Angkatan | 20 Angkatan | 20 Angkatan | | | | | | |
| | | 5 Jumlah Pengembangan Kompetensi Teknis Fungsional Binaan Kementerian/Lembaga | 10 Angkatan | 16 Angkatan | 23 Angkatan | 30 Angkatan | 32 Angkatan | 32 Angkatan | | | | | | |
| | | 6 Jumlah Pedoman Pembentukan Jabatan Fungsional Baru Kementerian Dalam Negeri | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 9 Dokumen | | | | | | |
| 1290 | | Pengembangan SDM Regional | | | | | | 106.840 | 174.212 | 190.211 | 166.236 | 176.798 | Pusat Pengembangan SDM Regional | |
| | | Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri Lingkup Regional | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Pengembangan Kompetensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Dalam Hal Penerapan SPM di Daerah Lingkup Regional | 16 Angkatan | 24 Angkatan | 32 Angkatan | 40 Angkatan | 48 Angkatan | 48 Angkatan | | | | | | |
| | | 2 Jumlah Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Latihan Dasar CPNS Lingkup Regional | 43 Angkatan | 44 Angkatan | 62 Angkatan | 71 Angkatan | 71 Angkatan | 71 Angkatan | | | | | | |
| | | 3 Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintahan Dalam Negeri Lingkup Regional | 63 Angkatan | 79 Angkatan | 101 Angkatan | 127 Angkatan | 152 Angkatan | 152 Angkatan | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|--------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|----|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 7 | 37% | 58% | 76% | 90% | 100% | | | | | | | |
| | | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI | |
|--------|----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 010.03 | PROGRAM TATA KELOLA KEPENDUDUKAN | <p>Sasaran Program 1 Meningkatnya Kualitas Database Kependudukan Nasional sebagai Pelayanan Publik dan Pembangunan Nasional serta Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada</p> <p>1 Jumlah database kependudukan yang update</p> <p>2 Persentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran</p> <p>3 Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan</p> <p>4 Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat</p> <p>5 Persentase cakupan kepemilikan akta perceraan dari semua individu yang perceraiannya tercatat</p> <p>6 Jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di</p> <p>7 Jumlah lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik</p> <p>8 Persentase kendala Regulasi dalam mewujudkan <i>Single Identity Number</i> yang teratasi</p> | 1 Database | 1 Database | 1 Database | 1 Database | 1 Database | 1 Database | 1.436.005 | 1.400.294 | 1.376.854 | 1.384.258 | 1.835.070 | Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | | 1 Database | 95% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran | 97% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran | 98% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran | 99% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran | 100% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran | 100% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran | 100% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran | 100% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran | 100% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran | 100% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran | |
| | | | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | | |
| | | | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | | |
| | | | 50 lokasi | 50 lokasi | 50 lokasi | 50 lokasi | 50 lokasi | 50 lokasi | 50 lokasi | 50 lokasi | 50 lokasi | 50 lokasi | | |
| | | | 300 Lembaga Pengguna | 600 Lembaga Pengguna | 900 Lembaga Pengguna | 1250 Lembaga Pengguna | 1500 Lembaga Pengguna | | | | | | | |
| | | | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 9 Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikembangkan dan diintegrasikan | 1 Sistem | 1 Sistem | 1 Sistem | 1 Sistem | 1 Sistem | 1 Sistem | | | | | |
| | | 10 Jumlah Daerah Yang Meningkatkan Kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil | 514 Inovasi | 1.028 Inovasi | 1.542 Inovasi | 2.056 Inovasi | 2.570 Inovasi | | | | | | |
| | | 11 Jumlah OPD Duplek yang membentuk zona Integritas | 5 OPD | 10 OPD | 20 OPD | 30 OPD | 34 OPD | | | | | | |
| 1268 | | Pengelolaan Informasi Kependudukan | | | | | | 956.624 | 1.087.984 | 1.054.754 | 1.054.008 | 1.408.800 | Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |
| | | Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Kebijakan/ Pedoman/Juknis Pedoman pelaksanaan pengelolaan informasi kependudukan yang ditetapkan | 1 Kebijakan/ Pedoman | 1 Kebijakan/ Pedoman | 1 Kebijakan/ Pedoman | 1 Kebijakan/ Pedoman | 1 Kebijakan/ Pedoman | | | | | | |
| | | 2 Jumlah Kabupaten/Kota yang terpenuhi Sarpras database kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional secara online | 514 Kabupaten/ Kota | 514 Kabupaten/ Kota | 514 Kabupaten/ Kota | 514 Kabupaten/ Kota | 514 Kabupaten/ Kota | | | | | | |
| | | 3 Persentase Pejabat Struktural Pengelola SIAK bersertifikat | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | | | | | | |
| | | 4 Persentase Administrator Data Base (ADB) Pengelola SIAK bersertifikat | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | | | | | | |
| | | 5 Persentase operator pengelola SIAK bersertifikat | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | | | | | | |
| | | 6 Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelayanan SIAK | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | | | | | | |
| | | 7 Persentase pejabat fungsi konsuler bersertifikat | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|------|------|------|----|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 8 | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | | | | | | | | |
| | | 9 | 60% | 80% | 100% | - | - | | | | | | | | |
| | | 10 | 1 Data Recovery Center | 1 Data Recovery Center | 1 Data Recovery Center | 1 Data Recovery Center | 1 Data Recovery Center | 1 Data Recovery Center | | | | | | | |
| | | 11 | 25% | 50% | 75% | 100% | - | | | | | | | | |
| | | 12 | 1 Data Center | 1 Data Center | 1 Data Center | 1 Data Center | 1 Data Center | 1 Data Center | | | | | | | |
| | | 13 | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | | | | | | | |
| | | 14 | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | | | | | | | |
| | | 15 | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | | | | | | | |
| | | 16 | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | | | | | | | |
| | | 17 | 514 Kabupaten/Kota | 514 Kabupaten/Kota | 514 Kabupaten/Kota | 514 Kabupaten/Kota | 514 Kabupaten/Kota | 514 Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | | 18 | 1 Database | 1 Database | 1 Database | 1 Database | 1 Database | 1 Database | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|--|--|--|--|---|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 19 Persentase pemenuhan sarana prasarana DC di Ibu Kota Negara Baru (IKN) Terbangun | - | - | - | 10% | 30% | | | | | | | |
| | | 20 Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk zona Integritas | 5 OPD | 10 OPD | 20 OPD | 30 OPD | 34 OPD | | | | | | | |
| 1269 | | Pembinaan Administrasi Pencatatan Sipil | | | | | | 8.750 | 14.780 | 18.430 | 20.790 | 21.550 | Direktorat Pencatatan Sipil | |
| | | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase Kabupaten/ Kota yang melakukan pelayanan pencatatan kelahiran secara online | 50% | 65% | 75% | 85% | 95% | | | | | | | |
| | | 2 Persentase anak (usia 0 s.d. 18 Tahun) yang memiliki akta kelahiran | 92% | 95% | 97% | 98% | 99% | | | | | | | |
| | | 3 Persentase cakupan Akta Kematian yang diterbitkan | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | | | | | | | |
| | | 4 Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinan tercatat | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | | | | | | | |
| | | 5 Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraiannya tercatat | 100% dilaporkan diberikan akta perceraian | 100% yang dilaporkan diberikan akta perceraian | 100% yang dilaporkan diberikan akta perceraian | 100% yang dilaporkan diberikan akta perceraian | 100% yang dilaporkan diberikan akta perceraian | | | | | | | |
| | | 6 Persentase integrasi data anak berkebangsaan ganda dan pelepasan kewarganegaraan (WNI menjadi WNA) antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dan Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi Kemendikhum dan HAM | - | 25% Terwujudnya integrasi data antara SIAK-SIAK-SIMKIM dan SAKE | 50% Terwujudnya integrasi data antara SIAK-SIAK-SIMKIM dan SAKE | 75% Terwujudnya integrasi data antara SIAK-SIAK-SIMKIM dan SAKE | 100% Terwujudnya integrasi data antara SIAK-SIAK-SIMKIM dan SAKE | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|----|---------------------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 7 Jumlah daerah yang meningkatkan kualitas Layanan Publik dan Reformasi Birokrasi | 514 Inovasi | 1028 Inovasi | 1542 Inovasi | 2056 Inovasi | 2570 Inovasi | | | | | | | | |
| | | 8 Jumlah daerah yang melaksanakan perluasan jangkauan pelayanan pencatatan sipil berbasis teknologi berbasis lintas sektor | 50 Daerah | 100 Daerah | 200 Daerah | 300 Daerah | 400 Daerah | | | | | | | | |
| | | 9 Jumlah daerah yang melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk perluasan jangkauan layanan pencatatan perkawinan | - | 100 Daerah | 150 Daerah | 250 Daerah | 300 Daerah | | | | | | | | |
| | | 10 Jumlah daerah yang melaksanakan pendokumentasian bidang pencatatan sipil sesuai ketentuan | 20 Kabupaten/ Kota | 40 Kabupaten/ Kota | 80 Kabupaten/ Kota | 160 Kabupaten/ Kota | 320 Kabupaten/ Kota | | | | | | | | |
| | | 11 Jumlah OPD Dupleks yang membentuk zona Integritas | 5 OPD | 10 OPD | 20 OPD | 30 OPD | 34 OPD | | | | | | | | |
| 1270 | | Pembinaan Administrasi Pendaftaran Penduduk | | | | | | 456.400 | 280.310 | 283.840 | 287.600 | 379.730 | | Direktorat Pendaftaran Penduduk | |
| | | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Kebijakan/ Pedoman Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk | 2 Kebijakan/ Pedoman | 2 Kebijakan/ Pedoman | 2 Kebijakan/ Pedoman | 2 Kebijakan/ Pedoman | 2 Kebijakan/ Pedoman | | | | | | | | |
| | | 2 Persentase penduduk rentan yang terselesaikan dalam pengurusan dokumen | 30% | 45% | 60% | 80% | 100% | | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah Perwakilan RI yang melaksanakan pendataan WNI yang memiliki SKPLN | 5 Perwakilan RI | 10 Perwakilan RI | 15 Perwakilan RI | 20 Perwakilan RI | 25 Perwakilan RI | | | | | | | | |
| | | 4 Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 5 Persentase penerbitan identitas bagi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME | 0,05% | 0,10% | 0,15% | 0,20% | 0,25% | | | | | | | | |
| | | 6 Jumlah daerah yang menerbitkan dokumen kependudukan bagi petugas khusus sesuai ketentuan | 5 Kabupaten/Kota | 10 Kabupaten/Kota | 15 Kabupaten/Kota | 20 Kabupaten/Kota | 25 Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | 7 Persentase penerbitan identitas bagi penduduk rentan | 5% | 8% | 11% | 14% | 17% | | | | | | | | |
| | | 8 Jumlah daerah yang melakukan pelayanan adminduk secara daring melalui Kios Layanan Dukcapil Mandiri atau Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) | 10% | 30% | 50% | 70% | 90% | | | | | | | | |
| | | 9 Jumlah pemenuhan Blangko KTP-el untuk | 41.000.000 Keping | 25.000.000 Keping | 25.000.000 Keping | 25.000.000 Keping | 32.000.000 Keping | | | | | | | | |
| | | 10 Jumlah daerah melakukan pendataan penduduk non permanen | 20 Kabupaten/Kota | 40 Kabupaten/Kota | 60 Kabupaten/Kota | 80 Kabupaten/Kota | 100 Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | 11 Jumlah daerah yang melayani perpindahan penduduk dari penduduk non permanen menjadi penduduk permanen | 20 Kabupaten/Kota | 40 Kabupaten/Kota | 60 Kabupaten/Kota | 80 Kabupaten/Kota | 100 Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | 12 Jumlah daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk sesuai ketentuan | 20 Kabupaten/Kota | 40 Kabupaten/Kota | 60 Kabupaten/Kota | 80 Kabupaten/Kota | 100 Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| | | 13 Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk Zona Integritas | 5 OPD | 10 OPD | 20 OPD | 30 OPD | 34 OPD | | | | | | | | |
| | | 14 Jumlah daerah yang melaksanakan korespondensi kedinasan secara elektronik | 20 Kabupaten/Kota | 40 Kabupaten/Kota | 80 Kabupaten/Kota | 160 Kabupaten/Kota | 320 Kabupaten/Kota | | | | | | | | |
| 1271 | Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Pembinaan Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | 7.650 | 9.485 | 11.690 | 13.355 | 16.070 | Direktorat Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 Meningkatnya kualitas aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan 1 Jumlah Kebijakan/ Pedoman/Juknis Pembinaan Aparatur Kependudukan dan 2 Jumlah daerah yang meningkatkan kinerja dalam penggunaan DAK sesuai dengan juknis 3 Jumlah perguruan tinggi yang melakukan kerjasama Pengembangan SDM dengan Ditjen Dukkcapil 4 Jumlah daerah yang melakukan inventarisasi aset dukcapil di daerah 5 Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola adminduk di daerah 6 Persentase Administrator Database (ADB) pengelola SIAK di daerah Berstatus ASN 7 Persentase Operator pengelola SIAK di daerah Berstatus ASN 8 Jumlah daerah yang melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani urusan adminduk daerah sesuai undang-undang adminduk 9 Jumlah daerah yang dievaluasi dan dinilai kinerja pejabat pada unit kerja yang menangani urusan adminduk daerah sesuai undang-undang | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | | 3 Kebijakan/ Pedoman/ Juknis 34 Provinsi | 3 Kebijakan/ Pedoman/ Juknis 34 Provinsi | 3 Kebijakan/ Pedoman/ Juknis 34 Provinsi | 3 Kebijakan/ Pedoman/ Juknis 34 Provinsi | 3 Kebijakan/ Pedoman/ Juknis 34 Provinsi | 3 Kebijakan/ Pedoman/ Juknis 34 Provinsi | 3 Kebijakan/ Pedoman/ Juknis 34 Provinsi | 3 Kebijakan/ Pedoman/ Juknis 34 Provinsi | 3 Kebijakan/ Pedoman/ Juknis 34 Provinsi | 3 Kebijakan/ Pedoman/ Juknis 34 Provinsi | | | |
| | | | 2 Perguruan Tinggi | 2 Perguruan Tinggi | 2 Perguruan Tinggi | 2 Perguruan Tinggi | 2 Perguruan Tinggi | 2 Perguruan Tinggi | 2 Perguruan Tinggi | 2 Perguruan Tinggi | 2 Perguruan Tinggi | 2 Perguruan Tinggi | | | |
| | | | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | | | |
| | | | 1 Kabupaten/ Kota | 1 Kabupaten/ Kota | 1 Kabupaten/ Kota | 1 Kabupaten/ Kota | 1 Kabupaten/ Kota | 1 Kabupaten/ Kota | 1 Kabupaten/ Kota | 1 Kabupaten/ Kota | 1 Kabupaten/ Kota | 1 Kabupaten/ Kota | | | |
| | | | 60% ADB berstatus ASN | 65% ADB berstatus ASN | 75% ADB berstatus ASN | 85% ADB berstatus ASN | 90% ADB berstatus ASN | 60% Operator berstatus ASN | 40% Operator berstatus ASN | 50% Operator berstatus ASN | 60% Operator berstatus ASN | 75% Operator berstatus ASN | | | |
| | | | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | | | |
| | | | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|---|---|---|--|--|------------|-----------------------------|-------|-------|-------|----|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 10 Jumlah daerah yang menerapkan aplikasi database pejabat dukcapil secara <i>online</i> dan mengelola Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dan Operator SIAK | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | | | | | | | |
| | | 11 Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk zona Integritas | 5 OPD | 10 OPD | 20 OPD | 30 OPD | 34 OPD | | | | | | | | |
| 1272 | | Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | | | | | | 6.581 | 7.735 | 8.140 | 8.505 | 8.920 | | Direktorat Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | |
| | | Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Kebijakan/ Pedoman/Juknis Pedoman pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan | 1 Kebijakan/ Pedoman | 1 Kebijakan/ Pedoman | 1 Kebijakan/ Pedoman | 1 Kebijakan/ Pedoman | 1 Kebijakan/ Pedoman | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan | 300 Lembaga Pengguna | 300 Lembaga Pengguna | 300 Lembaga Pengguna | 350 Lembaga Pengguna | 250 Lembaga Pengguna | 600 | 900 | 1.250 | 1.500 | | | | |
| | | 3 Jumlah Eksternal Sistem yang terkoneksi dengan SIAK | 750 Eksternal Sistem terkoneksi dengan SIAK | 800 Eksternal Sistem terkoneksi dengan SIAK | 900 Eksternal Sistem terkoneksi dengan SIAK | 1000 Eksternal Sistem terkoneksi dengan SIAK | 1268 Eksternal Sistem terkoneksi dengan SIAK | | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah Sistem Pengamanan dan Pengendalian Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan | 1 Sistem | 1 Sistem | 1 Sistem | 1 Sistem | 1 Sistem | | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah lembaga pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI | |
|------|----------------------|--|---|---|---|---|---|-----------------------------|------|------|------|------|--------------------|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 6 Persentase kendala Regulasi dalam mewujudkan Single Identity Number teratasi. | 4 10% Kendala Regulasi dalam mewujudkan Single Identity Number Teratasi | 5 20% Kendala Regulasi dalam mewujudkan Single Identity Number Teratasi | 6 30% Kendala Regulasi dalam mewujudkan Single Identity Number Teratasi | 7 40% Kendala Regulasi dalam mewujudkan Single Identity Number Teratasi | 8 50% Kendala Regulasi dalam mewujudkan Single Identity Number Teratasi | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 7 Jumlah OPD Dukcapil yang membentuk Zona Integritas | 5 OPD | 10 OPD | 20 OPD | 30 OPD | 34 OPD | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|--------|----------------------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|----|-------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| 010.04 | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN | | | | | | | 2.091.855 | 2.311.360 | 2.558.900 | 3.008.926 | 4.090.372 | | | |
| | | Sasaran Program 1 Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | Sekretariat Jenderal | |
| | | 1 Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Dalam Negeri | Nilai 85,01 | Nilai 87,01 | Nilai 89,01 | Nilai 91,01 | Nilai 93,01 | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | 74 Unit Kerja | 1585 Unit Kerja | 242 Unit Kerja | 329 Unit Kerja | 431 Unit Kerja | | | | | | | | |
| | | 3 Indeks peningkatan kualitas pelayanan publik Kementerian Dalam Negeri | 4,20 (baik) | 4,30 (baik) | 4,50 (baik) | 4,60 (sangat baik) | 4,90 (sangat baik) | | | | | | | | |
| | | 4 Opini Laporan Keuangan Kementerian Dalam Negeri | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | | | | | | | |
| | | 5 Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Dalam Negeri | BB | BB | BB | A | A | | | | | | | | |
| | | 6 Indeks penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Dalam Negeri | Nilai 3,3 | Nilai 3,5 | Nilai 3,6 | Nilai 3,7 | Nilai 3,8 | | | | | | | | |
| | | 7 Indeks keterbukaan informasi publik Kementerian Dalam Negeri | Nilai 90 | Nilai 90,5 | Nilai 91 | Nilai 91,5 | Nilai 91,7 | | | | | | | | |
| | | 8 Persentase Penerapan Merit Sistem di lingkungan Kemendagri menuju Birokrasi kelas dunia | 42% | 64% | 79% | 90% | 100% | | | | | | | | |
| | | 9 Jumlah Rancangan peraturan perundang- undangan dalam Prosundagri yang diselesaikan | 35 Ranc PerUU | 45 Ranc PerUU | 45 Ranc PerUU | 40 Ranc PerUU | 40 Ranc PerUU | | | | | | | | |
| | | 10 Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu | 70 Nilai | 75 Nilai | 80 Nilai | 85 Nilai | 90 Nilai | | | | | | | | |
| | | 11 Tingkat Kematangan UKPBJ II Kementerian Dalam Negeri (skala 1-5) | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|------|------|------|----|------------------------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Inspektorat Jenderal |
| | | Sasaran Program 2 Meningkatnya Kapabilitas Auditor Kemendagri dan PPUPD Secara Nasional | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Tingkat Kapabilitas Auditor Kemendagri | Level 3 (75%) | Level 3 (80%) | Level 3 (85%) | Level 3 (90%) | Level 3 (100%) | | | | | | | |
| | | 2 Tingkat Kapasitas PPUPD Secara Nasional | Level 3 (75%) | Level 3 (80%) | Level 3 (85%) | Level 3 (90%) | Level 3 (100%) | | | | | | | |
| | | Sasaran Program 3 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pemerintahan Daerah dan Kapasitas Inspektorat Daerah | | | | | | | | | | | | Inspektorat Jenderal |
| | | 1 Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah | Nilai 80 | Nilai 85 | Nilai 90 | Nilai 100 | Nilai 100 | Nilai 100 | | | | | | |
| | | 2 Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah | -* | Nilai 75 (B) | Nilai 80 (B) | Nilai 85 (B) | Nilai 90 (A) | | | | | | | |
| | | Sasaran Program 4 Meningkatnya Kualitas Pengawasan di Lingkungan Kemendagri | | | | | | | | | | | | Inspektorat Jenderal |
| | | 1 Indeks pengawasan Internal | Nilai 80 | Nilai 85 | Nilai 90 | Nilai 100 | Nilai 100 | Nilai 100 | | | | | | |
| | | 2 Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus | Nilai 80 | Nilai 81 | Nilai 82 | Nilai 83 | Nilai 85 | | | | | | | |
| | | Sasaran Program 5 Tersedianya Kader Pemerintahan Dalam Negeri yang Unggul, Profesional, Berdaya Saing dan Berintegritas | | | | | | | | | | | | Institut Pemerintahan Dalam Negeri |
| | | 1 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi | 10% | 30% | 50% | 60% | 80% | | | | | | | |
| | | 2 Persentase lulusan dengan Predikat Cumlaude | 18% (DIV&S1), 20% (S2), 20% (S3), 10% (Pr) | 19% (DIV&S1), 21% (S-2), 21% (S-3), 11% (Pr) | 20% (DIV&S1), 22% (S-2), 22% (S-3), 12% (Pr) | 21% (DIV&S1), 23% (S-2), 23% (S-3), 13% (Pr) | 22% (DIV&S1), 24% (S-2), 24% (S-3), 14% (Pr) | 22% (DIV&S1), 24% (S-2), 24% (S-3), 14% (Pr) | | | | | | |
| | | 3 Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni | Nilai 3,00 | Nilai 3,20 | Nilai 3,30 | Nilai 3,40 | Nilai 3,60 | | | | | | | |
| | | 4 Akreditasi Institusi Lembaga IPDN | B Akreditasi | A Akreditasi | A Akreditasi | A Akreditasi | A Akreditasi | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah B | 7 Prodi | 9 Prodi | 11 Prodi | 12 Prodi | 13 Prodi | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|-----------------------------|------|------|------|----|---|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 6 Jumlah Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPDN dalam Jurnal Nasional/ Internasional Terakreditasi | 33 Publikasi | 36 Publikasi | 39 Publikasi | 42 Publikasi | 45 Publikasi | | | | | | | | |
| | | 7 Persentase Penerapan Smart Campus di lingkungan IPDN | 25% | 50% | 75% | 85% | 95% | | | | | | | | |
| | | 8 Jumlah MoU kemitraan strategis yang diimplementasikan (PKS) | 10 PKS | 12 PKS | 13 PKS | 14 PKS | 15 PKS | | | | | | | | |
| | | Sasaran Program 6 Meningkatnya Kualitas Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Bina Administrasi | |
| | | 1 Persentase dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 2 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Jenderal | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | Nilai 20 | | | | | | | | |
| | | 3 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Jenderal | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | Nilai 20 | | | | | | | | |
| | | 4 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | Nilai 13 | Nilai 15 | Nilai 17 | Nilai 19 | Nilai 20 | | | | | | | | |
| | | 5 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Orda | Nilai 10 | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | | | | | | | | |
| | | 6 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Bangsa | Nilai 11 | Nilai 13 | Nilai 15 | Nilai 17 | Nilai 20 | | | | | | | | |
| | | 7 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pemdes | Nilai 10 | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----------------------------|------|------|------|----|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 8 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Keuda | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | Nilai 20 | | | | | | | |
| | | 9 Nilai capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Nilai 10 | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | | | | | | | |
| | | 10 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Polpum | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | Nilai 20 | | | | | | | |
| | | 11 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Dukcapil | Nilai 11 | Nilai 13 | Nilai 15 | Nilai 17 | Nilai 20 | | | | | | | |
| | | 12 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan | Nilai 10 | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | | | | | | | |
| | | 13 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada IPDN | Nilai 10 | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | | | | | | | |
| | | 14 Nilai capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada DKPP | Nilai 10 | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | | | | | | | |
| | | 15 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Sekretariat Jenderal | Nilai 20 | Nilai 28 | Nilai 36 | Nilai 44 | Nilai 54 | | | | | | | |
| | | 16 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Inspektorat Jenderal | Nilai 3 | Nilai 5 | Nilai 7 | Nilai 9 | Nilai 10 | | | | | | | |
| | | 17 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | Nilai 3 | Nilai 10 | Nilai 17 | Nilai 25 | Nilai 35 | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----------------------------|------|------|------|----|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 18 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Otda | Nilai 3 | Nilai 10 | Nilai 17 | Nilai 25 | Nilai 35 | | | | | | | |
| | | 19 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah | Nilai 2 | Nilai 10 | Nilai 17 | Nilai 25 | Nilai 35 | | | | | | | |
| | | 20 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pemdes | Nilai 2 | Nilai 12 | Nilai 21 | Nilai 28 | Nilai 39 | | | | | | | |
| | | 21 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Keuangan Daerah | Nilai 3 | Nilai 10 | Nilai 17 | Nilai 25 | Nilai 35 | | | | | | | |
| | | 22 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Nilai 5 | Nilai 13 | Nilai 21 | Nilai 28 | Nilai 34 | | | | | | | |
| | | 23 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Polpum | Nilai 2 | Nilai 10 | Nilai 17 | Nilai 25 | Nilai 35 | | | | | | | |
| | | 24 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Dukcapil | Nilai 6 | Nilai 10 | Nilai 17 | Nilai 25 | Nilai 35 | | | | | | | |
| | | 25 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan | Nilai 5 | Nilai 9 | Nilai 13 | Nilai 17 | Nilai 21 | | | | | | | |
| | | 25 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada IPDN | Nilai 20 | Nilai 29 | Nilai 38 | Nilai 47 | Nilai 56 | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|--|---|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----------------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 26 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada DKPP | - | Nilai 2 | Nilai 4 | Nilai 6 | Nilai 7 | | | | | | | |
| | | Sasaran Program 7 Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Litbang Daerah | | | | | | | | | | | Badan Penelitian dan Pengembangan | |
| | | 1 Jumlah kelembagaan litbang daerah dengan kategori "Utama" | 55 Daerah | 82 Daerah | 110 Daerah | 137 Daerah | 165 Daerah | | | | | | | |
| 1214 | Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum | Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum | | | | | | 9.500 | 9.962 | 10.465 | 11.058 | 11.702 | Biro Hukum | |
| | | Meningkatnya keselarasan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan melalui kajian hukum dan kebijakan daerah, serta penyiapan produk hukum, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah kebijakan pusat dan daerah yang diselesaikan | 110 Kebijakan | 165 Kebijakan | 170 Kebijakan | 175 Kebijakan | 180 Kebijakan | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah penanganan sengketa hukum di lembaga peradilan | 98 Penanganan | 102 Penanganan | 110 Penanganan | 120 Penanganan | 125 Penanganan | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah rancangan Perda dan hasil kajian perda dan perkara yang diharmonisasi | 475 Kepmendagri | 476 Kepmendagri | 477 Kepmendagri | 478 Kepmendagri | 479 Kepmendagri | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang disimplifikasi dan dideregulasi | 5 Permendagri | 5 Permendagri | 5 Permendagri | 5 Permendagri | 5 Permendagri | | | | | | | |
| | | 5 Jumlah peraturan perundang-undangan yang dilakukan pencermatan kembali menuju <i>Omnibus Law</i> | 23 Undang-Undang | 1 Peraturan Pemerintah | 1 Permendagri | 1 Permendagri | 1 Permendagri | | | | | | | |
| | | 6 Tingkat ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan lingkup Kementerian Dalam Negeri | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------|--------|-------------------------------|--|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| 1215 | Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia | Meningkatnya kualitas pengelolaan pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 1 Indeks Profesionalitas ASN | Nilai 80 | Nilai 82 | Nilai 85 | Nilai 87 | Nilai 91 | 36.128 | 43.985 | 52.394 | 55.759 | 57.685 | Biro Kepegawaian | | | |
| 1216 | Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan, kualitas layanan administrasi dan konsultasi, serta implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah 1 Jumlah daerah yang menyusun Anjab, ABK, dan Evjab 2 Persentase penerapan SOP pada setiap Satker Kementerian Dalam Negeri 3 Jumlah unit organisasi yang telah menerapkan budaya kerja 4 Jumlah daerah yang terfasilitasi dalam penyusunan budaya kerja 5 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Sekretariat Jenderal 6 Jumlah daerah Provinsi dengan indeks RB ≥ baik 7 Jumlah daerah Kabupaten/Kota dengan indeks RB ≥ baik 8 Persentase Unit Kerja Eselon I Kementerian Dalam Negeri yang Indeks Kelembagaan statusnya ≥ (p4) | 6 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 10.500 | 10.995 | 11.470 | 11.520 | 11.859 | Biro Organisasi dan Tataksana | | | |
| | | | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | | |
| | | | 3 Unit Kerja Eselon I | 5 Unit Kerja Eselon I | 7 Unit Kerja Eselon I | 9 Unit Kerja Eselon I | 12 Unit Kerja Eselon I | | | | | | | | | |
| | | | 6 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | 7 Provinsi | | | | | | | | | |
| | | | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | Nilai 20 | | | | | | | | | |
| | | | 24 Provinsi | 26 Provinsi | 28 Provinsi | 31 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | | | |
| | | | 103 Kabupaten/Kota (20%) | 155 Kabupaten/Kota (30%) | 257 Kabupaten/Kota (50%) | 309 Kabupaten/Kota (60%) | 360 Kabupaten/Kota (75%) | | | | | | | | | |
| | | | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|----|------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 9 Persentase Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang Indeks Kelembagaan statusnya \geq (p4) | 20% | 30% | 50% | 60% | 80% | | | | | | | | |
| | | 10 Indeks kepuasan pengguna layanan atas kualitas layanan administrasi dan konsultasi Kementerian Dalam Negeri | 85 (baik) | 89 (sangat baik) | 90 (sangat baik) | 91 (sangat baik) | 92 (sangat baik) | | | | | | | | |
| | | 11 Jumlah satuan kerja yang melaksanakan Reformasi Birokrasi Substantif untuk 8 Area Perubahan di semua Satker Eselon I | 4 Satker | 6 Satker | 8 Satker | 12 Satker | 12 Satker | | | | | | | | |
| | | 12 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Sekretariat Jenderal | Nilai 20 | Nilai 28 | Nilai 36 | Nilai 44 | Nilai 54 | | | | | | | | |
| 1217 | | Perencanaan Program dan Anggaran | | | | | | 10.900 | 11.618 | 12.014 | 12.425 | 12.850 | | Biro Perencanaan | |
| | | Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja program dan anggaran lingkup Kementerian Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase konsistensi dokumen perencanaan tahunan dengan dokumen jangka menengah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 2 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri | Nilai 95 | Nilai 95 | Nilai 95 | Nilai 95 | Nilai 95 | | | | | | | | |
| 1218 | | Pengelolaan Ketatausahaan, Rumah Tangga, serta Sarana Prasarana Perkantoran | | | | | | 115.735 | 121.346 | 125.491 | 129.778 | 134.211 | | Biro Umum | |
| | | Meningkatnya kualitas pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, layanan pengadaan, keamanan serta sarana dan prasarana perkantoran sesuai kebutuhan | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------------------------|-------|--------|--------|----------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 1 Jumlah satuan kerja Kementerian Dalam Negeri yang menerapkan standar pengelolaan persuratan dan kearsipan berkategori "Baik" | 4 Satker | 6 Satker | 8 Satker | 10 Satker | 12 Satker | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah pemerintah daerah Provinsi yang dilakukan pengawasan arsip | 18 Provinsi | 22 Provinsi | 26 Provinsi | 30 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 3 Tingkat keamanan ASN, stakeholder serta Sarana dan Prasarana di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | 92% | 93% | 94% | 95% | 96% | | | | | | | |
| | | 4 Persentase penyelesaian seluruh paket pengadaan barang/jasa lingkup Kementerian Dalam Negeri yang diajukan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 5 Persentase penyediaan, perbaikan dan pengelolaan sarana dan prasarana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai kebutuhan yang direncanakan | 94% | 95% | 96% | 97% | 98% | | | | | | | |
| | | 6 Persentase pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| 1219 | | Penataan Administrasi Kerjasama | | | | | | 8.000 | 8.800 | 9.680 | 10.648 | 11.713 | Pusat Fasilitas Kerja Sama | |
| | | Meningkatnya penataan fasilitas kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah dengan mitra dalam dan luar negeri | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase penyelesaian rekomendasi ijin perjalanan dinas luar negeri tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga non pemerintah, Organisasi Internasional dan Ormas Asing yang diselesaikan | 17 MoU/PKS | 18 MoU/PKS | 15 MoU/PKS | 16 MoU/PKS | 14 MoU/PKS | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 3 Jumlah program kerjasama Kementerian Dalam Negeri dengan organisasi internasional dan lembaga asing yang diselesaikan | 3 Kerjasama | 3 Kerjasama | 4 Kerjasama | 4 Kerjasama | 4 Kerjasama | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah kerjasama pemerintah daerah dengan pemerintah luar negeri yang diselesaikan | 8 Naskah Kerjasama | 8 Naskah Kerjasama | 8 Naskah Kerjasama | 8 Naskah Kerjasama | 10 Naskah Kerjasama | | | | | | | |
| 1220 | | Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset | | | | | | 198.756 | 205.023 | 211.491 | 218.160 | 225.613 | Biro Administrasi Keuangan dan Aset | |
| | | Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN Kementerian Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait penyelesaian pengelolaan BMN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri | 50 Surat Keputusan | 50 Surat Keputusan | 50 Surat Keputusan | 50 Surat Keputusan | 50 Surat Keputusan | | | | | | | |
| | | 2 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian Dalam Negeri | Nilai 95 | Nilai 96 | Nilai 96 | Nilai 96 | Nilai 96 | | | | | | | |
| | | 3 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal | Nilai 95 | Nilai 96 | Nilai 96 | Nilai 96 | Nilai 96 | | | | | | | |
| | | 4 Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) lingkup Sekretariat Jenderal yang terselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 5 Persentase Hibah dan penghapusan BMN hasil kegiatan dekonstruksi/ tugas pembantuan/ urusan bersama yang diselesaikan | 25% | 45% | 65% | 80% | 100% | | | | | | | |
| | | 6 Persentase status penggunaan BMN (PSP) yang ditetapkan | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | | | | | | | |
| | | 7 Persentase BMN bermasalah pada Kementerian Dalam Negeri yang diselesaikan | 25% | 45% | 65% | 80% | 100% | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|----|---------------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 8 Persentase pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| 1221 | | Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi | | | | | | 54.022 | 68.664 | 70.033 | 65.166 | 67.490 | | Pusat Data dan Sistem Informasi | |
| | | Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi serta pelayanan komunikasi dan telekomunikasi lingkup Kementerian Dalam Negeri | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah data dan informasi kemandagri yang terstruktur dalam e-database | 10 data set | 20 data set | 30 data set | 40 data set | 50 data set | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah data/informasi lingkup Sekretariat Jenderal yang terstruktur menuju e-database Kementerian Dalam Negeri | 1 Data/Informasi terstruktur | 2 Data/Informasi terstruktur | 3 Data/Informasi terstruktur | 4 Data/Informasi terstruktur | 5 Data/Informasi terstruktur | | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah Sistem Informasi Infrastruktur TIK Kemandagri yang dikembangkan | 2 Sistem Informasi | 2 Sistem Informasi | 3 Sistem Informasi | 3 Sistem Informasi | 3 Sistem Informasi | | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah Daerah Provinsi yang Indeks SPBE ≥ Baik | 4 Provinsi | 11 Provinsi | 18 Provinsi | 25 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | | |
| | | 5 Persentase pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| 1222 | | Pengelolaan Administrasi Pimpinan | | | | | | 18.925 | 19.652 | 20.344 | 24.333 | 25.164 | | Biro Administrasi Pimpinan | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan dan administrasi pimpinan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase tingkat kepuasan pimpinan terhadap pelayanan ketatausahaan dan penyiapan materi pimpinan | 89% | 91% | 93% | 95% | 97% | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------------------------|------|------|------|---------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 2 | 89% | 91% | 93% | 95% | 97% | | | | | | | |
| | | 3 | 15 Daerah | 19 Daerah | 171 Daerah | 171 Daerah | 172 Daerah | | | | | | | |
| | | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| 1223 | Pengelolaan Kehumasan, Informasi Publik dan Perpustakaan | 4 | 27.974 | 28.930 | 29.918 | 30.940 | 31.997 | | | | | | Pusat Penerangan | |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan komunikasi dan penyebaran informasi kepada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat serta pelayanan perpustakaan dan pendokumentasian | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 2 | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | | | | | | | |
| | | 3 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | | | | | | | |
| | | 4 | 10 Provinsi | 16 Provinsi | 22 Provinsi | 28 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 5 | 70% | 71% | 72% | 73% | 74% | | | | | | | |
| | | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|---|---|---|---|---|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|---|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 7 Nilai tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan lingkup Sekretariat Jenderal | Nilai 3,5 | Nilai 3,6 | Nilai 3,7 | Nilai 3,8 | Nilai 3,9 | | | | | | | |
| | | 8 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik lingkup Sekretariat Jenderal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 9 Jumlah Daerah yang Layanan Dukungan Pembinaan SDM Perustakaan dan Kehumasan meningkat | 204 Daerah | 272 Daerah | 340 Daerah | 408 Daerah | 476 Daerah | | | | | | | |
| | | 10 Jumlah daerah yang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Bidang Kehumasan sesuai ketentuan perundang-undangan | 10 Provinsi | 15 Provinsi | 25 Provinsi | 30 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| 4255 | | Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu | | | | | | 157.890 | 142.184 | 148.129 | 149.797 | 151.591 | Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu | |
| | | Meningkatnya Kemandirian, Integritas dan Kredibilitas Penyelenggara Pemilu | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase Putusan Hasil Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang Ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 2 Indeks Kepuasan Penanganan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | | | | | | | |
| | | 3 Persentase Pemberitaan Positif Kinerja DKPP | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah Instansi Penyelenggara Pemilu yang Indeks Kepatuhan Etika dengan Nilai 65 | 60% instansi penyelenggara Pemilihan Umum | 65% instansi penyelenggara Pemilihan Umum | 70% instansi penyelenggara Pemilihan Umum | 75% instansi penyelenggara Pemilihan Umum | 80% instansi penyelenggara Pemilihan Umum | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|-------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 5 Persentase Seluruh Pengaduan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang terselesaikan sesuai Ketentuan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 6 Persentase Penyelenggaraan Persidangan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 7 Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Sekretariat DKPP sesuai Kebutuhan yang Direncanakan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 8 Persentase Pelayanan Dukungan Operasional Kerja yang Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 9 Nilai capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada DKPP | Nilai 10 | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | | | | | | | |
| | | 10 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada DKPP | - | Nilai 2 | Nilai 4 | Nilai 6 | Nilai 7 | | | | | | | |
| 1225 | Pengawasan Fungsional Inspektorat I | Sasaran Kegiatan 1 Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat I □ | | | | | | 5.183 | 5.710 | 5.882 | 6.058 | 6.240 | Inspektorat I | |
| | | 1 Opini Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | | | | | | | |
| | | 2 Nilai Revu PIPK | Nilai B | Nilai B | Nilai B | Nilai A | Nilai A | | | | | | | |
| | | 3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | | | | | | | |
| | | 4 Persentase tingkat Penyelesaian TLHP | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 5 Persentase Permintaan Pengawasan yang direpson minimal 7 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 6 Indeks Efektifitas Pendampingan dan Konsultasi | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|----|----------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kepatuhan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Aspek Umum dan Urusan Teknis Wilayah Kerja Inspektorat I | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | 1 Indeks Pengawasan Umum | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | 2 Indeks Pengawasan Teknis | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | Sasaran Kegiatan 3 Peningkatan Kapasitas PPUPD Wilayah Kerja Inspektorat I | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Tingkat kapasitas PPUPD | Level 3 (75%) | Level 3 (80%) | Level 3 (85%) | Level 3 (90%) | Level 3 (100%) | | | | | | | | |
| | | Sasaran Kegiatan 4 Peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah lingkup wilayah kerja Inspektorat I | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah | B | B | B | A | A | | | | | | | | |
| 1226 | | Pengawasan Fungsional Inspektorat II | | | | | | 3.649 | 4.585 | 4.722 | 4.864 | 5.010 | | Inspektorat II | |
| | | Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat II | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Nilai Laporan Kinerja Kementerian Dalam Negeri | A (81) | A (82) | A (83) | A (84) | A (85) | | | | | | | | |
| | | 2 Persentase tingkat Penyelesaian TLHP | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 3 Persentase Permintaan Pengawasan yang direpson minimal 7 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 4 Persentase Efektifitas Pendampingan dan Konsultasi | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | | | | | | | | |
| | | Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kepatuhan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Aspek Umum dan Urusan Teknis Wilayah Kerja Inspektorat II | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|----|-----------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 1 Indeks Pengawasan Umum | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | 2 Indeks Pengawasan Teknis | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | Sasaran Kegiatan 3 Peningkatan Kapasitas PPUPD Wilayah Kerja Inspektorat II | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Tingkat kapasitas PPUPD | Level 3 (75%) | Level 3 (80%) | Level 3 (85%) | Level 3 (90%) | Level 3 (100%) | | | | | | | | |
| | | Sasaran Kegiatan 4 Peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah lingkup wilayah kerja Inspektorat II | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah | B | B | B | A | A | | | | | | | | |
| 1227 | | Pengawasan Fungsional Inspektorat III | | | | | | 4.499 | 5.230 | 5.386 | 5.548 | 5.714 | | Inspektorat III | |
| | | Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat III | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemendagri | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | | | | | | | | |
| | | 2 Persentase Tingkat Konsistensi Dokumen Perencanaan BMN | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | | | | | | | | |
| | | 3 Persentase tingkat Penyelesaian TLHP | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 4 Persentase Permintaan Pengawasan yang direpson minimal 7 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 5 Indeks Efektifitas Pendampingan dan Konsultasi | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | | | | | | | | |
| | | Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kepatuhan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Aspek Umum dan Urusan Teknis Wilayah Kerja Inspektorat III | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Indeks Pengawasan Umum | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | 2 Indeks Pengawasan Teknis | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------|-----------------------------|-------|-------|-------|----------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | Sasaran Kegiatan 3 Peningkatan Kapasitas PPUPD Wilayah Kerja Inspektorat III | Level 3 (75%) | Level 3 (80%) | Level 3 (85%) | Level 3 (90%) | Level 3 (100%) | | | | | | | |
| | | 1 Tingkat kapasitas PPUPD | | | | | | | | | | | | |
| | | Sasaran Kegiatan 4 Peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah lingkup wilayah kerja Inspektorat III | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah | B | B | B | A | A | | | | | | | |
| 1228 | | Pengawasan Fungsional Inspektorat IV | | | | | | 3.463 | 4.355 | 4.486 | 4.620 | 4.759 | Inspektorat IV | |
| | | Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja Kementerian Dalam Negeri lingkup wilayah kerja Inspektorat IV | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Nilai Maturitas SPIP | Nilai 3 | Nilai 3 | Nilai 3 | Nilai 4 | Nilai 4 | | | | | | | |
| | | 2 Nilai Kapabilitas APIP | Nilai 3 | Nilai 3 | Nilai 3 | Nilai 4 | Nilai 4 | | | | | | | |
| | | 3 Nilai Reformasi Birokrasi Kemendagri | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 4 Persentase tingkat Penyelesaian TLHP | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 5 Persentase Permintaan Pengawasan yang direpson minimal 7 hari kerja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 6 Persentase Efektifitas Pendampingan dan Konsultasi | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | | | | | | | |
| | | Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kepatuhan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Aspek Umum dan Urusan Teknis Wilayah Kerja Inspektorat IV | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Indeks Pengawasan Umum | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | | | | | | | |
| | | 2 Indeks Pengawasan Teknis | 80 | 85 | 90 | 100 | 100 | | | | | | | |
| | | Sasaran Kegiatan 3 Peningkatan Kapasitas PPUPD Wilayah Kerja Inspektorat IV | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Tingkat kapasitas PPUPD | Level 3 (75%) | Level 3 (80%) | Level 3 (85%) | Level 3 (90%) | Level 3 (100%) | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|-----------------------------|-------|-------|---|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | Sasaran Kegiatan 4 Peningkatan kapasitas Inspektoral Daerah lingkup wilayah kerja Inspektoral IV 1 Indeks Kapasitas Inspektoral Daerah | B | B | B | A | A | | | | | | | | |
| 1230 | | Pengakuan Integritas, Pemeriksaan dan Pengusutan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah | | | | | | 3.006 | 3.333 | 3.433 | 3.536 | 3.642 | Inspektoral Khusus | | |
| | | Terlaksananya Pembangunan Integritas, Penanganan Pengaduan Masyarakat, dan Pemeriksaan Khusus Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Indeks Pembangunan Integritas | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| | | 2 Indeks Penanganan Pemeriksaan Khusus | 80 | 81 | 82 | 83 | 85 | | | | | | | | |
| | | 3 Tingkat Efektivitas Pendampingan dan Konsultasi Pengawasan | 75% | 80% | 85% | 90% | 95% | | | | | | | | |
| 1286 | | Penyelenggaraan Administrasi Kerja Sama Dan Hukum | | | | | | 3.813 | 4.665 | 4.897 | 5.133 | 5.293 | Biro Administrasi Kerja Sama Dan Hukum | | |
| | | Meningkatnya kemitraan strategis IPDN dengan Lembaga Kependidikan dan Non Kependidikan, dan meningkatkan kualitas tenaga kependidikan | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan | 10 PKS | 12 PKS | 13 PKS | 14 PKS | 15 PKS | | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah Regulasi lingkup IPDN yang ditetapkan sesuai Program Penyusunan Peraturan Perundang- undangan lingkup Kemendagri (Prosundagri) | 5 Regulasi | 3 Regulasi | 2 Regulasi | 1 Regulasi | 3 Regulasi | | | | | | | | |
| | | 3 Persentase Penanganan Sengketa Hukum terkait IPDN di Lembaga Peradilan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------------------------|------|------|------|----|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 5 | Nilai 10 | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | | | | | | | | |
| | | 6 | Nilai 3,5 | Nilai 3,6 | Nilai 3,7 | Nilai 3,8 | Nilai 3,9 | | | | | | | | |
| | | 7 | 50 Orang | 55 Orang | 60 Orang | 65 Orang | 70 Orang | | | | | | | | |
| | | 8 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 9 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 10 | Nilai 20 | Nilai 29 | Nilai 38 | Nilai 47 | Nilai 56 | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|-----------|--|---|---|---|---|---|---|------|-----------------------------|------|------|------|----|---|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 1292 | 2 Penyelenggaraan Administrasi Akademik Dan Perencanaan Pendidikan Kepamongprajaan | 3 Meningkatnya Kualitas Pengajaran/Pelatihan, Kuantitas dan Kualitas Penelitian/Kajian dan Penggabdian Masyarakat serta Mutu Layanan Pendidikan | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Biro Administrasi Akademik Dan Perencanaan |
| | | 1 Akreditasi Institusi lembaga IPDN | B | A | A | A | A | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah Program Studi (Prodi) terakreditasi paling rendah B | 7 Prodi | 9 Prodi | 11 Prodi | 12 Prodi | 13 Prodi | | | | | | | |
| | | 3 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi | 10% | 30% | 50% | 60% | 80% | | | | | | | |
| | | 4 Persentase Lulusan dengan Predikat Cumlaude | 18% (DIV&S1), 20% (S-2), 20% (S-3), 10% (Profesi) | 19% (DIV&S1), 21% (S-2), 21% (S-3), 11% (Profesi) | 20% (DIV&S1), 22% (S-2), 22% (S-3), 12% (Profesi) | 21% (DIV&S1), 23% (S-2), 23% (S-3), 13% (Profesi) | 22% (DIV&S1), 24% (S-2), 24% (S-3), 14% (Profesi) | | | | | | | |
| | | 5 Persentase Dosen Dengan Jabatan Lektor Kepala | 20% | 22% | 24% | 26% | 30% | | | | | | | |
| | | 6 Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | | | | | | | |
| | | 7 Jumlah Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPDN Dalam Jurnal Nasional/ Internasional Terakreditasi | 33 Publikasi | 36 Publikasi | 39 Publikasi | 42 Publikasi | 45 Publikasi | | | | | | | |
| | | 8 Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | | | | | | | |
| | | 9 Jumlah Sitasi Karya Ilmiah | 1.000 Sitasi | 1.050 Sitasi | 1.100 Sitasi | 1.150 Sitasi | 1.200 Sitasi | | | | | | | |
| | | 10 Nilai kenaikan rata rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Program Vokasi, Akademik dan Profesi Kepamongprajaan | 0,02 (dari IPK tahun sebelumnya) | 0,03 (dari IPK tahun sebelumnya) | 0,04 (dari IPK tahun sebelumnya) | 0,05 (dari IPK tahun sebelumnya) | 0,06 (dari IPK tahun sebelumnya) | | | | | | | |
| | | 11 Persentase Pemanfaatan Media Berbasis Teknologi Informasi dalam Mendukung Penerapan Smart Campus | 25% | 50% | 75% | 85% | 95% | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|----|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 12 Persentase Pemanfaatan Media Informasi Elektronik dalam Mendukung Proses Pembelajaran Praja IPDN | 75% | 77% | 79% | 81% | 83% | | | | | | | | |
| | | 13 Persentase Penyelesaian Layanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Administrasi Akademik dan Perencanaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 14 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 15 Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| 1293 | | Penyelenggaraan Administrasi Keprajaan Dan Alumni | | | | | | 28.111 | 38.095 | 39.276 | 40.494 | 41.749 | | Biro Administrasi Keprajaan Dan Alumni | |
| | | Meningkatnya Kualitas Pembinaan Pengasuhan Praja | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Prestasi Ekstrakurikuler Praja pada Tingkat Nasional | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | | | | |
| | | 2 Nilai kenaikan Rata-rata Nilai Indeks Prestasi (IP) Pengasuhan | 0,02 (dari IP tahun sebelumnya) | 0,03 (dari IP tahun sebelumnya) | 0,04 (dari IP tahun sebelumnya) | 0,05 (dari IP tahun sebelumnya) | 0,06 (dari IP tahun sebelumnya) | | | | | | | | |
| | | 3 Indeks kepuasan stakeholder terhadap kinerja alumni | Nilai 3 | Nilai 3,2 | Nilai 3,3 | Nilai 3,4 | Nilai 3,6 | | | | | | | | |
| | | 4 Jumlah Praja Pelopor Revolusi Mental (PPRM) sebagai Calon Kader Pelopor Revolusi Mental (KPRM) | 6.059 Praja | 6.376 Praja | 6.041 Praja | 5.249 Praja | 4.800 Praja | | | | | | | | |
| | | 5 Persentase penyelesaian administrasi data pokok praja | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| 1294 | | Pengelolaan Administrasi Umum Dan Keuangan Pendidikan Kepamongprajaan | | | | | | 335.862 | 342.074 | 321.844 | 326.950 | 334.852 | | Biro Administrasi Umum Dan Keuangan | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI | | | | | | | |
|------|----------------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | |
| | | <p>Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Memadainya sarana prasarana yang mendukung pendidikan</p> <p>1 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai) yang tepat waktu</p> <p>2 Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar mutu pendidikan</p> <p>3 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran IPDN</p> <p>4 Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan</p> <p>5 Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu</p> <p>6 Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan</p> <p>7 Persentase penyelesaian hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP</p> <p>8 Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya pada Biro Umum dan Keuangan</p> | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | <p>Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan Di Daerah</p> | 261.220 | 303.485 | 321.763 | 335.285 | 344.092 | 344.092 | 344.092 | 344.092 | 344.092 | 344.092 | 344.092 | 344.092 | | | | | | | | | |
| 1295 | | <p>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Kepamongprajaan pada IPDN Kampus Daerah</p> <p>1 Jumlah Publikasi Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IPDN Dalam Jurnal Nasional Terakreditasi</p> <p>2 Persentase penyelesaian hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP</p> | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | | | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|----------------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 3 | 0,02 (dari IP tahun sebelumnya) | 0,03 (dari IP tahun sebelumnya) | 0,04 (dari IP tahun sebelumnya) | 0,05 (dari IP tahun sebelumnya) | 0,06 (dari IP tahun sebelumnya) | | | | | | | |
| | | 4 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | | | | | | | |
| | | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 7 | 25% | 50% | 75% | 85% | 95% | | | | | | | |
| | | 8 | 0,02 (dari IP tahun sebelumnya) | 0,03 (dari IP tahun sebelumnya) | 0,04 (dari IP tahun sebelumnya) | 0,05 (dari IP tahun sebelumnya) | 0,06 (dari IP tahun sebelumnya) | | | | | | | |
| | | 9 | Nilai 95 | Nilai 96 | Nilai 96 | Nilai 96 | Nilai 96 | | | | | | | |
| 1229 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektoral Jenderal | | | | | | | 56.937 | 61.162 | 73.367 | 75.628 | 77.958 | Sekretariat Inspektoral Jenderal | |
| | | Meningkatnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan tugas lintas Unit Kerja lingkup Inspektoral Jenderal serta kualitas API di daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-----------------------------|------|------|------|----|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 3 Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 4 Persentase Penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan, akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 5 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang Disusun | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 6 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Inspektorat Jenderal | Nilai 95 | Nilai 96 | Nilai 96 | Nilai 96 | Nilai 96 | Nilai 96 | | | | | | | |
| | | 7 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Jenderal | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | Nilai 20 | | | | | | | | |
| | | 8 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi publik pada Inspektorat Jenderal | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 9 Jumlah Daerah yang telah terbangun Konektivitas Sistem Informasi Pengawasan dengan Pemerintah Daerah | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | | |
| | | 10 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 11 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran serta Langganan Daya dan Jasa) Tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 12 Indeks Kepuasan Penggunaan Layanan Ijten | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | | | | | | | | |
| | | 13 Jumlah Auditor Kemendagri yang ditingkatkan | 70 orang | 70 orang | 70 orang | 70 orang | 70 orang | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|-----------------------------|--------|--------|---------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 14 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Inspektorat Jenderal | Nilai 3 | Nilai 5 | Nilai 7 | Nilai 9 | Nilai 10 | | | | | | | |
| 1242 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Bina Adwil | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen Bina Adwil | | | | | | 64.841 | 76.867 | 85.346 | 94.833 | 105.461 | Sekretariat Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | |
| | | Peningkatan dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 2 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 3 Persentase Penyelesaian verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 4 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 5 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | | | | | | | |
| | | 6 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | Nilai 13 | Nilai 15 | Nilai 17 | Nilai 19 | Nilai 20 | | | | | | | |
| | | 7 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | Nilai 3,5 | Nilai 3,6 | Nilai 3,7 | Nilai 3,8 | Nilai 3,10 | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|----|-----------------------------------|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 8 Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 9 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi publik pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 10 Jumlah Data/Informasi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan yang terstruktur menuju e-Database Kementerian Dalam Negeri | 1 Data/Informasi Terstruktur | 2 Data/Informasi Terstruktur | 3 Data/Informasi Terstruktur | 4 Data/Informasi Terstruktur | 5 Data/Informasi Terstruktur | | | | | | | | |
| | | 11 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 12 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 13 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 14 Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan Teknis Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | | |
| | | 15 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan | Nilai 3 | Nilai 10 | Nilai 17 | Nilai 25 | Nilai 35 | | | | | | | | |
| 1265 | | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Otonomi Daerah | | | | | | 56.767 | 61.000 | 64.000 | 66.000 | 68.000 | | Sekretariat Ditjen Otonomi Daerah | |
| | | Terselesaikannya pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|----|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 1 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | 2 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | 3 Persentase Penyelesaian verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan laporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | 4 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | 5 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Ditjen Otda | Nilai 95 | Nilai 96 | Nilai 96 | Nilai 96 | Nilai 96 | Nilai 96 | | | | | | |
| | | 6 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Otda | Nilai 10 | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | Nilai 18 | | | | | | |
| | | 7 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan lingkup Ditjen Otda | Nilai 3.5 | Nilai 3.6 | Nilai 3.7 | Nilai 3.8 | Nilai 3.9 | Nilai 3.9 | | | | | | |
| | | 8 Persentase Pengaduan Masyarakat Lingkup Ditjen Otda yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | 9 Persentase penyelesaian permohonan informasi publik lingkup Ditjen Otda | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | 10 Jumlah data/informasi lingkup Ditjen Otda yang terstruktur menuju e-Database Kementerian Dalam Negeri | 1 Data/ informasi terstruktur | 2 Data/ informasi terstruktur | 3 Data/ informasi terstruktur | 4 Data/ informasi terstruktur | 5 Data/ informasi terstruktur | 5 Data/ informasi terstruktur | | | | | | |
| | | 11 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|-----------------------------|---------|---------|-----------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 12 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langganan Daya dan Jasa) yang tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 13 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 14 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Otda | Nilai 3 | Nilai 10 | Nilai 17 | Nilai 25 | Nilai 35 | | | | | | | |
| 1256 | | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Bina Bangda | | | | | | 81.434 | 105.586 | 263.966 | 659.915 | 1.649.788 | Sekretariat Ditjen Bina Pembangunan Daerah | |
| | | Meningkatnya kualitas layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya lingkup Ditjen Bina Pembangunan Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan Teknis Pembangunan Daerah | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 2 Jumlah daerah yang melaksanakan dan melaporkan penerapan SPM | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 3 Jumlah Pokja SPM Provinsi yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pelaporan pelaksanaan SPM tingkat Kabupaten/Kota | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 4 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 5 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------------|------|------|------|----|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 7 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 8 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | | | | | | | |
| | | 9 | Nilai 1.1 | Nilai 13 | Nilai 15 | Nilai 17 | Nilai 20 | | | | | | | |
| | | 10 | 3.5 Nilai | 3.6 Nilai | 3.7 Nilai | 3.8 Nilai | 3.9 Nilai | | | | | | | |
| | | 11 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 13 | 1 Data/Informasi Terstruktur | 2 Data/Informasi Terstruktur | 3 Data/Informasi Terstruktur | 4 Data/Informasi Terstruktur | 5 Data/Informasi Terstruktur | | | | | | | |
| | | 14 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 15 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|---------------|----------|----------|----------|----------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|------|---|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 17 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pembangunan Daerah | Nilai 2 | Nilai 10 | Nilai 17 | Nilai 25 | Nilai 35 | | | | | | | | |
| 1250 | | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Ditjen Bina Pemerintahan Desa | | | | | | 114.323 | 117.290 | 121.395 | 125.644 | 130.041 | | Sekretariat Ditjen Bina Pemerintahan Desa | |
| | | Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Tugas Lintas Unit Kerja Lingkup Ditjen Bina Pemerintahan desa | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Jumlah Kabupaten yang mampu meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa | 100 Kabupaten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 2 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 3 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Serta Hasil-hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 4 Persentase Penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang Tepat Waktu sesuai Simak BMN lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 5 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |
| | | 6 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|---|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 7 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Pemdes | Nilai 10 | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | | | | | | | |
| | | 8 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa | Nilai 3,5 | Nilai 3,6 | Nilai 3,7 | Nilai 3,8 | Nilai 3,9 | | | | | | | |
| | | 9 Persentase Pengaduan Masyarakat lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 10 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 11 Jumlah Data atau Informasi lingkup Ditjen Bina Pemerintahan Desa yang terstruktur menuju e-Database Kemendagri | 1 Data/Informasi terstruktur | 2 Data/Informasi terstruktur | 3 Data/Informasi terstruktur | 4 Data/Informasi terstruktur | 5 Data/Informasi terstruktur | | | | | | | |
| | | 12 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Pemdes | Nilai 2 | Nilai 12 | Nilai 21 | Nilai 28 | Nilai 39 | | | | | | | |
| 1278 | | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah | | | | | | 49.891 | 58.595 | 64.750 | 71.224 | 78.347 | Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah | |
| | | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel dan transparan dilingkungan Ditjen Bina Keuangan Daerah | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase Penyelesaian Layanan Hukum Lingkup Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 2 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------|-----------------------------|------|------|------|----|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 3 Persentase Penyelesaian verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan pelaporan Keuangan yang tepat waktu sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Tindak Lanjut LHP Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | 4 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | | | | | | | |
| | | 5 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 6 Jumlah data/informasi Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah yang terstruktur menuju e-Database Kementerian Dalam Negeri | 1 Data/ informasi terstruktur | 2 Data/ informasi terstruktur | 3 Data/ informasi terstruktur | 4 Data/ informasi terstruktur | 5 Data/ informasi terstruktur | | | | | | | |
| | | 7 Persentase Penyelesaian Layanan Umum, Rumah Tangga dan Perlengkapan Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 8 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 9 Persentase Penyelesaian Layanan Kehumasan dan Protokol Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 10 Persentase Penyelesaian Layanan SDM Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 11 Persentase Penyelesaian Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Lingkup Ditjen Bina Keuangan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------------------------|---------|--------|--------|----|--|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 12 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Bina Keuda | Nilai 1,2 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | Nilai 20 | | | | | | | |
| | | 13 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Bina Keuangan Daerah | Nilai 3 | Nilai 10 | Nilai 17 | Nilai 25 | Nilai 35 | | | | | | | |
| 1291 | | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | | 75.741 | 120.884 | 122.384 | 88.884 | 90.384 | | Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Tugas Lintas Unit Kerja Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 2 Persentase Penyelesaian Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi, serta Hasil-Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut LHP | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 3 Persentase Penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pelaporan Keuangan yang tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 4 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% | | | | | | | |
| | | 5 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukungan Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langgan Daya dan Jasa) yang tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 6 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 7 Persentase Penyelesaian Rancangan Program Legislasi dan Bahan Kebijakan yang disusun | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | |
| | | 8 Persentase Pembangunan Database (basis data) SDM ASN | 2% | 50% | 70% | 85% | 100% | | | | | | | |
| | | 9 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | | | | | | | |
| | | 10 Nilai capaian Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Nilai 10 | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | | | | | | | |
| | | 11 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Nilai 3,5 | Nilai 3,6 | Nilai 3,7 | Nilai 3,8 | Nilai 3,9 | | | | | | | |
| | | 12 Persentase Pengaduan Masyarakat Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 13 Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi Publik Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 14 Jumlah Data/Informasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang terstruktur menuju e-Database Kementerian Dalam Negeri | 1 Data/ Informasi Terstruktur | 2 Data/ Informasi Terstruktur | 3 Data/ Informasi Terstruktur | - | 4 Data/ Informasi Terstruktur | | | | | | | |
| | | 15 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Nilai 5 | Nilai 13 | Nilai 21 | Nilai 28 | Nilai 34 | | | | | | | |
| 1236 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | | | | | | | 61.314 | 67.750 | 74.975 | 82.923 | 91.665 | Sekretariat Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|------|------|------|----|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 Meningkatnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas teknis lintas unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 1 Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan Teknis Politik dan Pemerintahan Umum | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | | | | | | | |
| | | 2 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 3 Persentase penyelesaian dokumen hasil money, serta hasil-hasil pemeriksaan tindaklanjut LHP Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 4 Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 5 Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan yang tepat waktu sesuai SAI Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 6 Persentase penyelesaian rancangan program legislasi dan bahan kebijakan yang disusun Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 7 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | 95 | 96 | 96 | 96 | 98 | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 8 Capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Ditjen Polpum | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | Nilai 20 | | | | | | | |
| | | 9 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | Nilai 3,5 | Nilai 3,6 | Nilai 3,7 | Nilai 3,8 | Nilai 3,9 | | | | | | | |
| | | 10 Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 11 Persentase penyelesaian permohonan informasi lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 12 Persentase data/informasi pokok lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum yang terstruktur | 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | | | | | | | |
| | | 13 Persentase penyelesaian layanan perkantoran Lingkup Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 14 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Polpum | Nilai 2 | Nilai 10 | Nilai 17 | Nilai 25 | Nilai 35 | | | | | | | |
| 1273 | | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | 142.100 | 149.985 | 157.590 | 164.805 | 168.770 | Sekretariat Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| | | Dukungan pelayanan teknis dan administrasi yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | |
| | | 1 Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan dan Anggaran | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|------|------|----|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 4 | 5 OPD | 10 OPD | 20 OPD | 30 OPD | 34 OPD | | | | | | | | |
| | | 5 | - | 10 OPD | 20 OPD | 25 OPD | 34 OPD | | | | | | | | |
| | | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 7 | 1 Undang-undang | 1 Undang-undang | 1 PP, Perpres, Permen | 1 PP, Perpres, Permen | - | | | | | | | | |
| | | 8 | 20 Pedoman/ Kebijakan | 30 Pedoman/ Kebijakan | 40 Pedoman/ Kebijakan | 50 Pedoman/ Kebijakan | 60 Pedoman/ Kebijakan | | | | | | | | |
| | | 9 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | | | | | | | | |
| | | 10 | Nilai 11 | Nilai 13 | Nilai 15 | Nilai 17 | Nilai 20 | | | | | | | | |
| | | 11 | Nilai 3,5 | Nilai 3,6 | Nilai 3,7 | Nilai 3,8 | Nilai 3,9 | | | | | | | | |
| | | 12 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| | | 13 Jumlah data/informasi lingkup Ditjen Dukung yang terstruktur menuju e- Database Kementerian Dalam Negeri | 1 Data/ informasi terstruktur | 2 Data/ informasi terstruktur | 3 Data/ informasi terstruktur | 4 Data/ informasi terstruktur | 5 Data/ informasi terstruktur | | | | | | | |
| | | 14 Integrasi dan Operasionalisasi SIAK ke Portal Luar Negeri | 10 Negara | 20 Negara | 30 Negara | 40 Negara | 50 Negara | | | | | | | |
| | | 15 Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Sesuai Kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 16 Persentase Penyelesaian Pelayanan Dukung Operasional Kerja (Pembayaran Gaji, Operasional, dan Pemeliharaan Perkantoran, serta Langanan Daya dan Jasa) yang tepat Waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 17 Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 18 Jumlah Daerah yang difasilitasi Pembinaan Teknis Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | 548 Daerah | | | | | | | |
| | | 19 Persentase Pengaduan Masyarakat lingkup Ditjen Dukung yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 20 Persentase pemeliharaan peralatan KTP-el Kabupaten dan Kecamatan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | |
| | | 21 Jumlah daerah yang tertangani dalam kegiatan affirmatif | 50 Lokasi | 50 Lokasi | 50 Lokasi | 50 Lokasi | 50 Lokasi | | | | | | | |
| | | 22 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Ditjen Dukung | Nilai 6 | Nilai 10 | Nilai 17 | Nilai 25 | Nilai 35 | | | | | | | |
| 1284 | Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri | | | | | | | 43.942 | 51.807 | 56.988 | 62.686 | 68.955 | Sekretariat Badan Penelitian Dan Pengembangan | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| | | <p>Meningkatnya Koordinasi dan Sinergitas Pelaksanaan Tugas Lintas Unit Kerja lingkup Badan Litbang, serta kualitas penyelenggaraan fungsi Litbang daerah</p> <p>1 Persentase penyelesaian dokumen Perencanaan dan Anggaran lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan</p> <p>2 Persentase penyelesaian dokumen hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan</p> <p>3 Persentase penyelesaian Verifikasi, Perbendaharaan, Akuntansi, Pelaporan Keuangan dan aset yang tepat waktu</p> <p>4 Persentase penyelesaian administrasi dan pengelolaan kepegawaian</p> <p>5 Persentase penguatan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah</p> <p>6 Jumlah Pejabat Fungsional Peneliti Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri dan Badan Litbang Daerah yang ditingkatkan standar kompetensinya</p> <p>7 Persentase penyelesaian bahan kebijakan dan dokumen legislasi yang disusun sesuai Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan lingkup Kemendagri (Prosudagri)</p> <p>8 Persentase pengelolaan kerjasama kelitbangan</p> <p>9 Persentase pengelolaan perpustakaan dan jurnal ilmiah</p> | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | |

| KODE | PROGRAM/ KEGIATAN | SASARAN STRATEGIS/ SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN/ INDIKATOR | TARGET | | | | | | ALOKASI (dalam juta rupiah) | | | | | | UNIT ORGANISASI |
|------|----------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------------------------|------|------|------|----|--|--------------------|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | |
| | | 10 Persentase layanan administrasi ketatausahaan pimpinan dan keremahantangaan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 11 Persentase pengelolaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 12 Nilai capaian kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | | | | | | | | |
| | | 13 Nilai capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan | Nilai 10 | Nilai 12 | Nilai 14 | Nilai 16 | Nilai 18 | | | | | | | | |
| | | 14 Nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan | Nilai 3.5 | Nilai 3.6 | Nilai 3.7 | Nilai 3.8 | Nilai 3.9 | | | | | | | | |
| | | 15 Persentase pengelolaan data dan informasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 16 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | | | | | | |
| | | 17 Nilai capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi pada Badan Penelitian dan Pengembangan | Nilai 5 | Nilai 9 | Nilai 13 | Nilai 17 | Nilai 21 | | | | | | | | |

* Dalam proses penyusunan instrumen dokumen indeks

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN



**LAMPIRAN III
REKAPITULASI INDIKATOR
DAN INDIKASI TARGET
KINERJA PRIORITAS
NASIONAL RPJMN**

Lampiran III

Rekapitulasi Indikator dan Indikasi Target Kinerja Prioritas Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 Lingkup Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri

1. PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas, dengan 4 target indikator meliputi:

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target Kinerja | | | | | Unit Pelaksana |
|----|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan | - | 6 Provinsi | 12 Provinsi | 18 Provinsi | 25 Provinsi | Ditjen Bina Bangda |
| 2. | Jumlah daerah yang menyusun dan menerapkan rencana aksi destinasi wisata | 11 Provinsi | 11 Provinsi | 19 Provinsi | 19 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Bina Bangda |
| 3. | Jumlah daerah yang menerapkan sistem pengendalian inflasi daerah | - | - | 1 Sistem | 10 Provinsi | 20 Provinsi | Ditjen Bina Bangda |
| 4. | Jumlah daerah yang sinkron antara RZWP3K dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah | 5 Provinsi | 10 Provinsi | 20 Provinsi | 30 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Bina Bangda |

2. PN-2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan 57 target indikator kinerja meliputi:

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|----|--|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik | 8 Tugas dan Wewenang | 16 Tugas dan Wewenang | 22 Tugas dan Wewenang | 22 Tugas dan Wewenang | 22 Tugas dan Wewenang | Ditjen Bina Adwil |
| 2. | Jumlah daerah yang mendapatkan bimbingan teknis, dimonev, dan yang melapor SPM bidang Trantibumlinmas | 105 Daerah | 105 Daerah | 105 Daerah | 105 Daerah | 105 Daerah | Ditjen Bina Adwil |

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|-----|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 3. | Jumlah provinsi dengan laporan pelaksanaan tugas GWPP di bidang pemerintahan, hukum dan organisasi, keuangan, perencanaan, dan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundangan. | - | 33 Provinsi | 33 Provinsi | 33 Provinsi | 33 Provinsi | Ditjen Bina Adwil |
| 4. | Jumlah Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan di kecamatan yang efektif | 7 Daerah | 7 Daerah | 7 Daerah | 7 Daerah | 6 Daerah | Ditjen Bina Adwil |
| 5. | Jumlah Perjanjian Kerja Sama daerah yang dimonitoring pelaksanaannya | - | 7 Daerah | 7 Daerah | 7 Daerah | 7 Daerah | Ditjen Bina Adwil |
| 6. | Jumlah Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama daerah dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik | - | - | 10 Daerah | 10 Daerah | 10 Daerah | Ditjen Bina Adwil |
| 7. | Jumlah daerah yang mengaktifkan 1 SKPD tingkat provinsi untuk berfungsi sebagai Sekber kerjasama antar daerah di wilayahnya | - | 34 Daerah | 2 Daerah | 2 Daerah | 2 Daerah | Ditjen Bina Adwil |
| 8. | Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik | 34 Daerah | 75 Daerah | 74 Daerah | 76 Daerah | 76 Daerah | Ditjen Bina Adwil |
| 9. | Jumlah daerah yang menginisiasi kesepakatan kerja sama daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai potensi daerah | 10 Daerah | 48 Daerah | 51 Daerah | 83 Daerah | 86 Daerah | Ditjen Bina Adwil |
| 10. | Persentase perjanjian kerja sama yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan penganggaran | - | 18 Daerah | 18 Daerah | 18 Daerah | 18 Daerah | Ditjen Bina Adwil |

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|-----|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 11. | Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang difasilitasi kerjasama antar daerahnya dalam peningkatan kepariwisataan terutama di lokasi DPP | - | 3 Daerah | - | - | - | Ditjen Bina Adwil |
| 12. | Jumlah pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik di 10 kota metropolitan (terutama permasalahan transportasi, banjir, air minum, serta sampah dan limbah | - | 16 Daerah | 154 Daerah | 186 Daerah | 211 Daerah | Ditjen Bina Adwil |
| 13. | Jumlah daerah yang meningkat daya saingnya dalam pengembangan ekonomi melalui kerjasama daerah | - | 4 Daerah | 1 Daerah | - | - | Ditjen Bina Adwil |
| 14. | Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Trantibum | 102 Daerah | 210 Daerah | 318 Daerah | 426 Daerah | 542 Daerah | Ditjen Bina Adwil |
| 15. | Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Bencana | 188 Daerah | 282 Daerah | 375 Daerah | 468 Daerah | 542 Daerah | Ditjen Bina Adwil |
| 16. | Jumlah daerah yang menerapkan SPM Sub bidang Pemadam Kebakaran | 89 Daerah | 178 Daerah | 267 Daerah | 354 Daerah | 449 Daerah | Ditjen Bina Adwil |
| 17. | Jumlah dokumen usulan daerah persiapan otonom baru yang dievaluasi dan diverifikasi | - | 20 Daerah | 20 Daerah | 20 Daerah | 20 Daerah | Ditjen Otda |
| 18. | Jumlah provinsi yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 8 Provinsi | 10 Provinsi | 12 Provinsi | 14 Provinsi | 16 Provinsi | Ditjen Otda |

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|-----|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 19. | Jumlah kab/kota yang berkinerja sangat tinggi berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | 172 Kab/Kota | 203 Kab/Kota | 234 Kab/Kota | 230 Kab/Kota | 240 Kab/Kota | Ditjen Otda |
| 20. | Jumlah Daerah Otonom hasil pemekaran (2007-2014) yang difasilitasi diselesaikan permasalahannya berdasarkan 10 aspek penyelenggaraan pemerintahan | 42 Daerah | 86 Daerah | 121 Daerah | 17 Daerah | 22 Daerah | Ditjen Otda |
| 21. | Jumlah pembinaan peningkatan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan Otsus | - | 5 Daerah | 5 Daerah | 5 Daerah | 5 Daerah | Ditjen Otda |
| 22. | Jumlah regulasi terkait pelaksanaan kebijakan penataan daerah, kekhususan/keistimewaan daerah, dan DPOD | 10 Regulasi | 10 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | 2 Regulasi | Ditjen Otda |
| 23. | Jumlah database Peraturan Daerah yang dibentuk dan dimutakhirkan | 1 Database | 1 Database | 1 Database | 1 Database | 1 Database | Ditjen Otda |
| 24. | Jumlah daerah yang produk hukumnya disederhanakan untuk meningkatkan kualitas urusan pelayanan masyarakat | 20 Provinsi, 200 Kab/Kota | 25 Provinsi, 300 Kab/Kota | 30 Provinsi, 400 Kab/Kota | 32 Provinsi, 450 Kab/Kota | 34 Provinsi, 508 Kab/Kota | Ditjen Otda |
| 25. | Persentase Perda dan Perkada yang sesuai dengan hasil review Kemendagri | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Ditjen Otda |
| 26. | Jumlah provinsi yang memiliki indeks kepatuhan tinggi dalam penyusunan produk hukum | - | 20 Provinsi | 25 Provinsi | 30 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Otda |

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|-----|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 27. | Jumlah Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD II (Sanitasi, Air Minum dan Perumahan) | 412 Daerah | 412 Daerah | 412 Daerah | 412 Daerah | 412 Daerah | Ditjen Bina Bangda |
| 28. | Jumlah Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM Lingkup UPD III (Kesehatan, Sosial dan Trantibumlinmas) | 412 Daerah | 412 Daerah | 412 Daerah | 412 Daerah | 412 Daerah | Ditjen Bina Bangda |
| 29. | Jumlah Daerah yang melakukan integrasi dan penerapan SPM lingkup UPD IV (Pendidikan) | 412 Daerah | 412 Daerah | 412 Daerah | 412 Daerah | 412 Daerah | Ditjen Bina Bangda |
| 30. | Jumlah daerah yang menyusun raperda tentang RDTR di Sekitar Kawasan Khusus (Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus) | 25 Daerah | 23 Daerah | 8 Daerah | - | - | Ditjen Bina Bangda |
| 31. | Jumlah aplikasi pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (data pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, profil dan analisis daerah, e-rakortek, monev Bangda) | - | 1 Sistem | 1 Sistem | 1 Sistem | 1 Sistem | Ditjen Bina Bangda |
| 32. | Jumlah sertifikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah | - | - | 1 Sistem | 1 Sistem | 1 Sistem | Ditjen Bina Bangda |
| 33. | Jumlah regulasi yang mendukung penyelarasan perencanaan pusat dan daerah | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | 1 Regulasi | Ditjen Bina Bangda |
| 34. | Jumlah aparatur pemerintahan desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa lingkup regional yang dilatih | 1.470 Orang | 2.312 Orang | 2.430 Orang | 2.484 Orang | 2.240 Orang | Ditjen Bina Pemdes |
| 35. | Jumlah provinsi yang menetapkan batas desa | 50 Desa | 33 Provinsi | 33 Provinsi | 33 Provinsi | 33 Provinsi | Ditjen Bina Pemdes |

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 36. | Jumlah kab/kota yang desanya tertib adminitrasi pengelolaan aset desa | 75 Kab/Kota | 118 Kab/Kota | 124 Kab/Kota | 127 Kab/Kota | 114 Kab/Kota | Ditjen Bina Pemdes |
| 37. | Jumlah daerah yang mendapatkan penguatan Pemerintahan dan Pembangunan desa (P3PD) | 80 Kabupaten | 180 Kabupaten | 250 Kabupaten | 330 Kabupaten | 380 Kabupaten | Ditjen Bina Pemdes |
| 38. | Jumlah Daerah yang belanja APBD nya berorientasi pada pelayanan masyarakat yang diwujudkan dengan pemenuhan SPM | 102 Daerah | 210 Daerah | 318 Daerah | 426 Daerah | 542 Daerah | Ditjen Bina Keuda |
| 39. | Jumlah daerah yang menerapkan sistem informasi keuangan daerah (Si-Keuda) | 102 Daerah | 210 Daerah | 318 Daerah | 426 Daerah | 542 Daerah | Ditjen Bina Keuda |
| 40. | Jumlah Daerah yang mengelola pinjaman daerah dan obligasi daerah secara efektif dan efisien serta sesuai ketentuan perundang-undangan | 50 Daerah | 55 Daerah | 60 Daerah | 65 Daerah | 70 Daerah | Ditjen Bina Keuda |
| 41. | Jumlah daerah yang pajak daerah dan retribusinya meningkat minimal 5% pada Provinsi dan 8% pada Kab/Kota dari tahun sebelumnya | 313 Daerah | 359 Daerah | 409 Daerah | 455 Daerah | 542 Daerah | Ditjen Bina Keuda |
| 42. | Jumlah daerah yang Belanja APBD nya memenuhi indikator mandatory spending yaitu Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan dan Belanja Infrastruktur | 300 Daerah | 350 Daerah | 400 Daerah | 450 Daerah | 542 Daerah | Ditjen Bina Keuda |
| 43. | Jumlah provinsi yang capaian realisasi belanjanya minimal 90% | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Bina Keuda |
| 44. | Jumlah provinsi yang mengesahkan APBD tepat waktu | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Bina Keuda |

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|-----|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 45. | Jumlah daerah yang BUMDnya memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Daerah | 115 Daerah | 145 Daerah | 180 Daerah | 225 Daerah | 281 Daerah | Ditjen Bina Keuda |
| 46. | Jumlah daerah yang melakukan penatausahaan BMD secara wajar | 284 Daerah | 349 Daerah | 413 Daerah | 478 Daerah | 542 Daerah | Ditjen Bina Keuda |
| 47. | Jumlah daerah yang melakukan deregulasi/ harmonisasi dan penyesuaian Perda PDRD dalam rangka memberikan kemudahan investasi | 102 Daerah | 210 Daerah | 318 Daerah | 426 Daerah | 542 Daerah | Ditjen Bina Keuda |
| 48. | Jumlah daerah yang mendapatkan Pembinaan inovasi daerah secara lintas K/L | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | Badan Litbang |
| 49. | Jumlah daerah pilot project yang menerapkan inovasi daerah yang bersifat tematik guna mendukung iklim investasi (berbasis urusan pemerintahan/ potensi daerah dan fokus pada daerah 3T) | 5 Daerah | 3 Daerah | 6 Daerah | 5 Daerah | 5 Daerah | Badan Litbang |
| 50. | Penilaian Inovasi Daerah secara terpadu berbasis Indeks Inovasi Daerah | 542 Provinsi, Kab/Kota | 542 Provinsi, Kab/Kota | 542 Provinsi, Kab/Kota | 542 Provinsi, Kab/Kota | 542 Provinsi, Kab/Kota | Badan Litbang |
| 51. | Jumlah daerah yang menerapkan Inovasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Platform Sistem Informasi Layanan Inovasi Daerah | 100 Daerah | 123 Daerah | 153 Daerah | 176 Daerah | 191 Daerah | Badan Litbang |
| 52. | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat penyusunan Perda dan Perkada | 180 Orang | 260 Orang | 280 Orang | 300 Orang | 316 Orang | BPSDM |
| 53. | Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat Percepatan Pelaksanaan SPM di Daerah | 938 Orang | 959 Orang | 976 Orang | 993 Orang | 1009 Orang | BPSDM |

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|-----|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 54. | Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat manajemen inovasi daerah di wilayah perbatasan | 176 Orang | 178 Orang | 180 Orang | 182 Orang | 184 Orang | BPSDM |
| 55. | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Camat | 136 Orang | 136 Orang | 136 Orang | 136 Orang | 136 Orang | BPSDM |
| 56. | Jumlah aparatur yang mengikuti orientasi kepemimpinan pemerintahan dalam negeri bagi KDH/WKDH | 68 Orang | 68 Orang | 68 Orang | 68 Orang | 68 Orang | BPSDM |
| 57. | Jumlah aparatur yang mengikuti diklat bagi JF Auditor dan JF Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemda (PPUPD) | 272 Orang | 272 Orang | 272 Orang | 272 Orang | 272 Orang | BPSDM |

3. PN-3 Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan 15 target indikator kinerja meliputi:

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|----|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Jumlah daerah yang meningkat kapasitasnya aparaturnya dalam penilaian kinerja penanganan stunting | 260 Daerah | 360 Daerah | 460 Daerah | 514 Daerah | 514 Daerah | Ditjen Bina Bangda |
| 2. | Jumlah daerah yang mengimplementasikan kebijakan daerah sebagai tindak lanjut inpres No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK | 6 Daerah | 7 Daerah | 7 Daerah | 7 Daerah | 7 Daerah | Ditjen Bina Bangda |
| 3. | Jumlah tim pembina di daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan UKS/M | 7 Tim | 7 Tim | 7 Tim | 7 Tim | 7 Tim | Ditjen Bina Bangda |

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|-----|--|--|--|--|--|--|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 4. | Jumlah daerah yang menerapkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) | - | 22 Daerah | 24 Daerah | 28 Daerah | 34 Daerah | Ditjen Bina Bangsa |
| 5. | Jumlah daerah yang melaporkan pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan orang (GT PP-TPPO) | - | 20 Daerah | 22 Daerah | 26 Daerah | 32 Daerah | Ditjen Bina Bangsa |
| 6. | Jumlah Daerah yang melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak anak (KLA) | - | 22 Daerah | 24 Daerah | 28 Daerah | 34 Daerah | Ditjen Bina Bangsa |
| 7. | Jumlah daerah yang mendapat rekomendasi terkait penerapan rencana aksi pada penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan kearsipan | - | 18 Daerah | 24 Daerah | 30 Daerah | 34 Daerah | Ditjen Bina Bangsa |
| 8. | Jumlah daerah yang mengintegrasikan dan mempunyai rencana aksi daerah program kesehatan ibu dan Kb berbasis hak | - | 50 Daerah | 55 Daerah | 60 Daerah | 70 Daerah | Ditjen Bina Bangsa |
| 9. | Jumlah database kependudukan yang update | 1 Database | 1 Database | 1 Database | 1 Database | 1 Database | Ditjen Dukcapil |
| 10. | Presentase anak (usia 0 s.d. 18 Tahun) yang memiliki akta kelahiran | 92% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran | 95% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran | 97% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran | 98% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran | 99% Cakupan anak yang memiliki akta kelahiran | Ditjen Dukcapil |
| 11. | Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | 100% Kematian yang dilaporkan dibuatkan akta kematian | Ditjen Dukcapil |

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|-----|---|--|--|--|--|--|-----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 12. | Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | 100% yang dilaporkan diberikan akta perkawinan | Ditjen Dukcapil |
| 13. | Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraian tercatat | 100% yang dilaporkan diberikan akta perceraian | 100% yang dilaporkan diberikan akta perceraian | 100% yang dilaporkan diberikan akta perceraian | 100% yang dilaporkan diberikan akta perceraian | 100% yang dilaporkan diberikan akta perceraian | Ditjen Dukcapil |
| 14. | Jumlah layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang mudah dan inovatif di wilayah 3T | 50 Lokasi | 50 Lokasi | 50 Lokasi | 50 Lokasi | 50 Lokasi | Ditjen Dukcapil |
| 15. | Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik | 300 Lembaga Pengguna | 300 Lembaga Pengguna | 300 Lembaga Pengguna | 350 Lembaga Pengguna | 250 Lembaga Pengguna | Ditjen Dukcapil |

4. PN-4 Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, dengan 4 target indikator kinerja meliputi:

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|----|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Jumlah daerah yang Kerukunan Umat Beragamanya meningkat | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Polpum |
| 2. | Jumlah provinsi melaksanakan kampanye Gerakan Indonesia Bersatu dalam kebhinekaan | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Polpum |
| 3. | Jumlah Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) yang berkinerja tinggi | 15 Daerah | 16 Daerah | 17 Daerah | 18 Daerah | 19 Daerah | Ditjen Polpum |

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|----|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 4. | Indeks gemar membaca dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca di daerah | 53,00 | 54,75 | 56,50 | 58,50 | 60,00 | Ditjen Bina Bangda |

5. PN-5 Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan 8 target indikator kinerja meliputi:

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|----|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Jumlah provinsi yang melakukan integrasi arah kebijakan dan sasaran nasional dalam dokrenda untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman | - | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Bina Bangda |
| 2. | Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan komitmen dan kapasitas untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak aman | - | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Bina Bangda |
| 3. | Jumlah provinsi yang mengalami peningkatan kualitas dokrenda melalui Sistem Informasi untuk penyediaan air minum dan sanitasi layak dan aman | - | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Bina Bangda |
| 4. | Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sanitasi (kab/kota) | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Bina Bangda |
| 5. | Jumlah provinsi yang terfasilitasi penyusunan pengaturan bidang sanitasi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Bina Bangda |
| 6. | Jumlah provinsi yang melakukan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam | - | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Bina Bangda |

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|----|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | pengelolaan sumber daya air | | | | | | |
| 7. | Jumlah provinsi yang melaksanakan penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana hidrometeorologi, geologi, dan lingkungan | - | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Bina Bangda |
| 8. | Jumlah kab/kota yang difasilitasi dalam pengaturan dan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman | - | 48 Daerah | 48 Daerah | 48 Daerah | 48 Daerah | Ditjen Bina Bangda |

6. PN-6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dengan 3 target indikator kinerja meliputi:

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|----|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Asistensi dan supervisi penerapan standar pelayanan minimal bidang bencana | 5 Daerah | 5 Daerah | 5 Daerah | 5 Daerah | 5 Daerah | Ditjen Bina Adwil |
| 2. | Penerapan Pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana di Daerah | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Bina Adwil |
| 3. | Jumlah provinsi yang memiliki kesiapan dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan pada saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Bina Adwil |

7. PN-7 Memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan transformasi pelayanan publik, dengan 9 target indikator kinerja meliputi:

| No | Indikator Kinerja | Indikasi Target | | | | | Unit Pelaksana |
|----|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik | 400 Orang | 1.800 Orang | 3.000 Orang | 3.300 Orang | 4.200 Orang | Ditjen Polpum |
| 2. | Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | 34 Provinsi | Ditjen Polpum |
| 3. | Jumlah peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang politik | 2 Peraturan | 2 Peraturan | 2 Peraturan | N/A | N/A | Ditjen Polpum |
| 4. | Jumlah pengurus partai politik yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik | 100 Orang | 200 Orang | 500 Orang | 700 Orang | 800 Orang | Ditjen Polpum |
| 5. | Jumlah masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik | 3.000 Orang | 5.000 Orang | 6.000 Orang | 8.000 Orang | 10.000 Orang | Ditjen Polpum |
| 6. | Persentase Timdu PKS Provinsi yang melaksanakan RAD secara efektif | 61% | 62% | 63% | 64% | 65% | Ditjen Polpum |
| 7. | Jumlah aparatur pusat dan daerah yang ditingkatkan kapasitasnya dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini tingkat dasar | 600 Orang | 2.000 Orang | 2.200 Orang | 2.400 Orang | 3.000 Orang | Ditjen Polpum |
| 8. | Jumlah Bantuan Keuangan yang tersalurkan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPR-RI | 126.376. 418 Suara Sah | 126.376. 418 Suara Sah | 126.376. 418 Suara Sah | 126.376. 418 Suara Sah | 126.376. 418 Suara Sah | Ditjen Polpum |
| 9. | Jumlah kesepakatan Perundingan Batas dan Kerjasama Wilayah Negara | 6 Kesepaka- tan | 5 Kesepaka- tan | 5 Kesepaka- tan | 5 Kesepaka- tan | 5 Kesepaka- tan | Ditjen Bina Adwil |

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIC INDONESIA
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN





**PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI
NO 67 TAHUN 2020
TENTANG RENSTRA KEMENDAGRI
TAHUN 2020-2024**



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang di maksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian adalah dokumen perencanaan jangka menengah

- Kementerian Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2

Renstra Kementerian terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup.

Pasal 3

Renstra Kementerian digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dalam menyusun rencana strategis unit kerja eselon I dan penyusunan kerja tahunan.

Pasal 4

Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Pimpinan tinggi madya pada unit kerja eselon I melakukan pemantauan dan penyusunan rencana kerja unit kerja masing-masing sesuai dengan Renstra Kementerian.

Pasal 6

Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimuat dalam sistem informasi kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 978), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2020

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 892

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


F. Gani, Muhammad, S.H., M.A.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1960818 199603 1 001







KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

✉ Biro.perencanaan@kemendagri.co.id
📍 Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat 10110
🌐 www.kemendagri.go.id
☎ (021) 3450038